



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.01.1.483005/2025**



DS:0052-5000-8696-4650

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 15

Tanggal : 12 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 4. Kode>Nama Satker : (483005) DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
- Sebesar : Rp. 68.647.209.000 (ENAM PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 68.647.209.000
010.01.WA.	Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Rp. 68.647.209.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	68.647.209.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 68.647.209.000

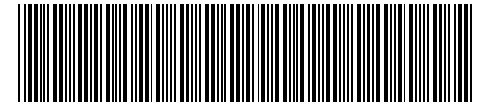
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.483005/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0052-5000-8696-4650

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (483005) DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Halaman : I A. 1

Program	:	010.01.WA	Program Dukungan Manajemen			68.647.209.000
Kegiatan	:	4255	Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu			68.647.209.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu			
		2. 02	Persentase Kualitas Pelayanan Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Data dan Informasi, Kearsipan serta Pengembangan Infrastruktur Jaringan dan Teknologi Informasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4255.BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	76,00	Lembaga, Unit Kerja, Hektar, Bidang	4.464.721.000
Rincian Output	:	01 BAB.001	Layanan Penilaian Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu	76.00	Lembaga	4.464.721.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4255.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	33.071.730.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	1.00	layanan	33.071.730.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4255.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	31.110.758.000
Rincian Output	:	01 EBA.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.00	Layanan	2.780.400.000
		02 EBA.957	Layanan Hukum	1.00	Layanan	118.190.000
		03 EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	172.653.000
		04 EBA.959	Layanan Protokoler	1.00	Layanan	50.040.000
		05 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	1.913.235.000
		06 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	51.950.000
		07 EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1.00	Layanan	6.800.000
		08 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	26.017.490.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.01.1.483005/2025

I B. SUMBER DANA



DS:0052-5000-8696-4650

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (483005) DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	68.647.209.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	68.647.209.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.483005/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0052-5000-8696-4650

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (483005) DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Kewenangan : (KP)

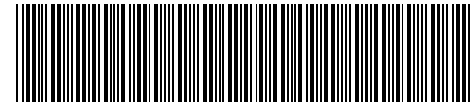
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU	11.777.549	54.089.260	2.780.400	-	-	68.647.209		
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	11.777.549	54.089.260	2.780.400	-	-	68.647.209		
4255	Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	11.777.549	54.089.260	2.780.400	-	-	68.647.209		
4255.BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	4.464.721	-	-	-	4.464.721	01 . 00	
01	RM	-	4.464.721	-	-	-	4.464.721	133	
4255.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	-	33.071.730	-	-	-	33.071.730	01 . 00	
01	RM	-	33.071.730	-	-	-	33.071.730	133	
4255.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.00 DKI JAKARTA / DKI JAKARTA)	11.777.549	16.552.809	2.780.400	-	-	31.110.758	01 . 00	
01	RM	11.777.549	16.552.809	2.780.400	-	-	31.110.758	133	
JUMLAH		11.777.549	54.089.260	2.780.400	-	-	68.647.209		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.483005/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0052-5000-8696-4650

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode>Nama Satker : (483005) DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	483005	DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	7.325.527	4.400.302	6.035.124	1.406.754	6.174.897	4.324.943	5.731.148	5.035.199	3.937.632	9.056.820	9.083.820	6.135.043	68.647.209
		BELANJA PEGAWAI	1.062.769	656.261	1.346.944	625.938	1.251.383	694.071	873.678	974.459	1.133.233	1.071.184	1.196.652	890.976	11.777.549
		BELANJA BARANG	5.960.365	3.655.541	4.456.860	752.858	4.917.513	3.628.097	4.412.852	4.030.740	2.577.366	6.985.636	7.587.168	5.124.264	54.089.260
		BELANJA MODAL	302.393	88.500	231.320	27.959	6.000	2.775	444.618	30.000	227.033	1.000.000	300.000	119.802	2.780.400
	010.01.WA.4255	Kegiatan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu	7.325.527	4.400.302	6.035.124	1.406.754	6.174.897	4.324.943	5.731.148	5.035.199	3.937.632	9.056.820	9.083.820	6.135.043	68.647.209
		51 BELANJA PEGAWAI	1.062.769	656.261	1.346.944	625.938	1.251.383	694.071	873.678	974.459	1.133.233	1.071.184	1.196.652	890.976	11.777.549
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	5.960.365	3.655.541	4.456.860	752.858	4.917.513	3.628.097	4.412.852	4.030.740	2.577.366	6.985.636	7.587.168	5.124.264	54.089.260
		53 BELANJA MODAL	302.393	88.500	231.320	27.959	6.000	2.775	444.618	30.000	227.033	1.000.000	300.000	119.802	2.780.400

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.483005/2025
IV A. B L O K I R**



DS:0052-5000-8696-4650

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [483005] DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Tomsu Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.483005/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:0052-5000-8696-4650

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [483005] DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Tomsy Tohir
69010187



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.01.1.403200/2025**



DS:0001-6483-1610-0716

Revisi ke 26

Tanggal : 15 Januari 2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 4. Kode>Nama Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL
- Sebesar : Rp. 547.171.051.000 (LIMA RATUS EMPAT PULUH TUJUH MILIAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	547.171.051.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 547.171.051.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025



DS:0001-6483-1610-0716

Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	547.171.051.000
WA.6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal	Rp.	13.692.024.000
WA.6084	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal	Rp.	339.718.068.000
WA.6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal	Rp.	180.689.521.000
WA.6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal	Rp.	13.071.438.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : I A. 1

Program	:	010.01.WA	Program Dukungan Manajemen			547.171.051.000
Kegiatan	:	6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal			13.692.024.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah penanganan sengketa hukum di lembaga peradilan			
		2. 01	Jumlah penyelesaian kerja sama kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah dengan mitra dalam dan luar negeri			
		3. 02	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam advokasi hukum			
		4. 02	Jumlah penyelesaian rekomendasi ijin perjalanan luar negeri tepat waktu			
		5. 03	Jumlah penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan			
		6. 03	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada pusat fasilitasi kerja sama			
		7. 04	Jumlah telaahan dan kajian terkait kebijakan pusat dan kebijakan daerah serta pemberian nomor registrasi produk hukum daerah			
		8. 05	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Hukum			
		9. 06	Indeks Kualitas Kebijakan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6083.AEC	Kerja sama	35,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	1.488.844.000
Rincian Output	:	01 AEC.001	Kerjasama Dalam Negeri	15.00	Kesepakatan	500.669.000
		02 AEC.002	Kerjasama Luar Negeri	20.00	Kesepakatan	988.175.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6083.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	226.505.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Rekomendasi Perjalanan Luar Negeri	1,00	layanan	226.505.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6083.BCB	Perkara Hukum Lembaga	80,00	Perkara, Berkas Perkara	1.614.023.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan Perkara Litigasi	80.00	Perkara	1.614.023.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	4	:	6083.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	10.362.652.000
Rincian Output		:	01	EBA.001 Layanan Non Litigasi Hukum	1.00	Layanan	266.050.000
			02	EBA.002 Layanan Fasilitasi Penyusunan Peraturan PerundangUndangan	1.00	Layanan	2.013.076.000
			03	EBA.003 Layanan Fasilitasi Telaahan Kebijakan Pusat dan Kebijakan Daerah	1.00	Layanan	1.018.737.000
			04	EBA.004 Layanan Dukungan Manajemen Biro Hukum	1.00	Layanan	1.018.241.000
			05	EBA.005 Layanan Dukungan Manajemen Pusat Fasilitasi Kerja Sama	1.00	Layanan	668.274.000
			06	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	575.159.000
			07	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	4.803.115.000
Kegiatan		:	6084	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal			339.718.068.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah unit kerja lingkup kemendagri dengan Nilai SAKIP minimal "BB"			
			2. 01	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri			
			3. 01	Persentase layanan penyelenggaraan persuratan dan kearsipan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemda			
			4. 01	Persentase tingkat kepuasan pimpinan terhadap pelayanan ketatausahaan, penyiapan materi pimpinan, dan keprotokolan			
			5. 02	Indeks Tata Kelola Pengadaan			
			6. 02	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal			
			7. 02	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Administrasi Pimpinan			
			8. 02	Persentase penyelesaian rekomendasi Area of Improvement (AOI) pada SPIP Kemendagri			
			9. 03	Indeks Manajemen Risiko Kementerian Dalam Negeri			
			10. 03	Persentase layanan penyelesaian dokumen laporan keuangan Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan			
			11. 03	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Umum			
			12. 04	Indeks Pengelolaan Aset			
			13. 04	Persentase penyelesaian rencana mitigasi risiko yang ditindaklanjuti lingkup Sekretariat Jenderal			
			14. 05	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Kemendagri			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL

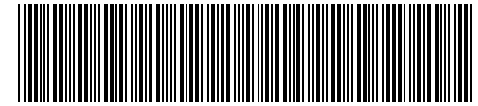
Halaman : I A. 3

Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal

- 15. 05 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Keuangan dan Aset
- 16. 06 Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Perencanaan
- 17. 07 Jumlah regulasi bidang perencanaan

Klasifikasi Rincian Output	5	:	6084.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	316.687.859.000
Rincian Output		:	01	EBA.001 Layanan Dukungan Manajemen Biro Perencanaan	1,00	Layanan	2.969.177.000
		:	02	EBA.002 Layanan Dukungan Manajemen Biro Keuangan dan Aset	1,00	Layanan	507.459.000
		:	03	EBA.003 Layanan Dukungan Manajemen Biro Umum	1,00	Layanan	89.963.000
		:	04	EBA.004 Layanan Dukungan Manajemen Biro Administrasi Pimpinan	1,00	Layanan	1.456.578.000
		:	05	EBA.005 Layanan Ketatausahaan dan Koordinasi Tugas Pimpinan	1,00	Layanan	20.505.418.000
		:	06	EBA.956 Layanan BMN	1,00	Layanan	606.077.000
		:	07	EBA.959 Layanan Protokoler	1,00	Layanan	3.764.286.000
		:	08	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	1.540.944.000
		:	09	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	285.247.957.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6084.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	355,00	Unit, m2, Paket	15.269.125.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	350,00	Unit	8.116.947.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	5,00	Unit	7.152.178.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6084.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	17,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	7.761.084.000
Rincian Output		:	01	EBD.001 Layanan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) untuk Kementerian/Lembaga dengan Jumlah di atas 6 unit	1,00	Dokumen	110.791.000
		:	02	EBD.002 Layanan Penyusunan Dokumen Implementasi SAKIP, Manajemen Kinerja dan Penugasan Lainnya Bidang Monitoring dan Evaluasi lingkup Kemendagri	1,00	Dokumen	1.471.860.000
		:	03	EBD.003 Layanan Penyusunan Dokumen Monitoring Pelaksanaan	1,00	Dokumen	356.845.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : I A. 4

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Jenderal

				Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	
				Dokumen	
04	EBD.004	Layanan Penyusunan Dokumen SPIP lingkup Kemendagri	1.00	Dokumen	87.160.000
05	EBD.005	Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko lingkup Kemendagri	1.00	Dokumen	105.550.000
06	EBD.006	Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Sekretariat Jenderal	1.00	Dokumen	100.891.000
07	EBD.007	Layanan Penyusunan Kebijakan Program dan Kegiatan Kemendagri	1.00	Dokumen	1.520.140.000
08	EBD.008	Layanan Penyusunan Kebijakan Belanja Kegiatan Kementerian Dalam Negeri	1.00	Dokumen	1.320.685.000
09	EBD.009	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat Jenderal	1.00	Dokumen	429.362.000
10	EBD.010	Layanan Manajemen Keuangan Kementerian Dalam Negeri	1.00	Layanan	177.495.000
11	EBD.011	Layanan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Jenderal	1.00	Layanan	333.217.000
12	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.00	Dokumen	159.175.000
13	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	174.639.000
14	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	929.103.000
15	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Dokumen	484.171.000

Kegiatan : 6085 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal 180.689.521.000

Indikator Kinerja Kegiatan		
1. 01	Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Dalam Negeri Melalui Media	
2. 01	Tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	
3. 02	Nilai hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik	
4. 02	Persentase implementasi kebijakan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	
5. 03	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat Data dan Sistem Informasi	
6. 03	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	
7. 04	Tingkat kepuasan pengguna layanan perpustakaan	
8. 05	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Pusat Penerangan	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : I A. 5

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal

Klasifikasi Rincian Output	8	:	6085.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	489.263.000
Rincian Output		:	01	BAH.001 Layanan Pengaduan	1,00	layanan	489.263.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	6085.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,00	Unit	5.073.356.000
Rincian Output		:	01	CAN.001 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3,00	Unit	5.073.356.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	6085.CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,00	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	136.305.082.000
Rincian Output		:	01	CBT.001 Pengadaan Data Center	1,00	Unit	134.779.095.000
		:	02	CBT.002 Pengadaan Jaringan	3,00	Unit	851.015.000
		:	03	CBT.003 Pengadaan Sistem Keamanan	1,00	Unit	674.972.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	6085.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	26.258.488.000
Rincian Output		:	01	EBA.001 Layanan Dukungan Manajemen Pusat Data dan Sistem Informasi	1,00	Layanan	1.626.058.000
		:	02	EBA.002 Layanan Dukungan Manajemen Pusat Penerangan	1,00	Layanan	496.045.000
		:	03	EBA.003 Layanan Publikasi	1,00	Layanan	20.129.796.000
		:	04	EBA.005 Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan PPID Kemendagri	1,00	Layanan	821.047.000
		:	05	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,00	Layanan	112.000.000
		:	06	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	620.347.000
		:	07	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	2.453.195.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



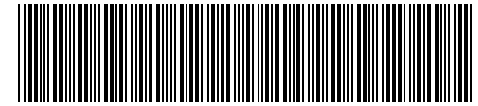
DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : I A. 6

Klasifikasi Rincian Output	12	:	6085.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	12,00	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	12.563.332.000	
Rincian Output		:	01	FAB.001	Pengelolaan dan Implementasi SI Manajemen	1,00	Sistem Informasi	346.108.000
		:	02	FAB.002	Pengelolaan Implementasi SIPD	10,00	Sistem Informasi	12.146.989.000
		:	03	FAB.003	Pengelolaan Aplikasi Situs Web ULA	1,00	Sistem Informasi	70.235.000
Kegiatan		:	6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal			13.071.438.000	
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Presentase penerapan manajemen SDM ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri				
		:	2. 01	Tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi				
		:	3. 02	Indeks pelayanan publik				
		:	4. 02	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro SDM				
		:	5. 03	Jumlah provinsi dengan Indeks Reformasi Birokrasi meningkat				
		:	6. 04	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya pada Biro Organisasi dan Tatalaksana				
Klasifikasi Rincian Output	13	:	6086.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	660,00	Orang	7.422.000	
Rincian Output		:	01	ADG.U01	Penilaian Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kemendagri	360,00	Orang	7.362.000
		:	02	ADG.U02	Penilaian Kompetensi Jabatan administrator, pengawas dan fungsional di Lingkungan Kemendagri	120,00	Orang	30.000
		:	03	ADG.U03	Penilaian Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemendagri	180,00	Orang	30.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	6086.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	600.445.000	
Rincian Output		:	01	BAH.001	Layanan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi	1,00	layanan	600.445.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : I A. 7

Klasifikasi Rincian Output	15	:	6086.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.556.864.000
Rincian Output		:	01	EBA.001 Layanan Dukungan Manajemen Biro Organisasi dan Tata Laksana	1.00	Layanan	741.412.000
		:	02	EBA.002 Layanan Dukungan Manajemen Biro Kepegawaian	1.00	Layanan	537.379.000
		:	03	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	1.278.073.000
Klasifikasi Rincian Output	16	:	6086.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.287,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	9.249.914.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	3287.00	Orang	9.249.914.000
Klasifikasi Rincian Output	17	:	6086.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	152,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	656.793.000
Rincian Output		:	01	FBA.001 Asistensi dan Supervisi Ketatalaksanaan Pemda	38.00	Provinsi	12.999.000
		:	02	FBA.002 Asistensi dan Supervisi Kelembagaan Sekretariat Daerah	38.00	Provinsi	127.309.000
		:	03	FBA.003 Asistensi dan Supervisi Reformasi Birokrasi Pemda	38.00	Provinsi	372.735.000
		:	04	FBA.004 Layanan Administrasi dan Konsultasi Pemda	38.00	Provinsi	143.750.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025

I B. SUMBER DANA



DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	547.171.051.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	547.171.051.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



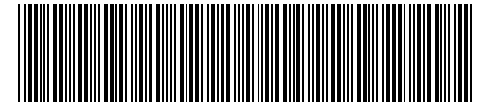
DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403200	SEKRETARIAT JENDERAL	130.256.765	252.150.624	164.763.662	-	-	547.171.051		
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	130.256.765	252.150.624	164.763.662	-	-	547.171.051		
6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal	-	13.602.434	89.590	-	-	13.692.024		
6083.AEC	Kerja sama (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.488.844	-	-	-	1.488.844	01 . 51	
01	RM	-	1.488.844	-	-	-	1.488.844	133	
6083.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	136.915	89.590	-	-	226.505	01 . 51	
01	RM	-	136.915	89.590	-	-	226.505	133	
6083.BCB	Perkara Hukum Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.614.023	-	-	-	1.614.023	01 . 51	
01	RM	-	1.614.023	-	-	-	1.614.023	133	
6083.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	10.362.652	-	-	-	10.362.652	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



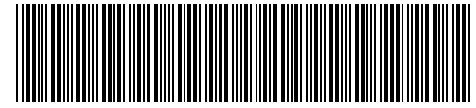
DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	10.362.652	-	-	-	10.362.652	133	
6084	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal	130.256.765	194.192.178	15.269.125	-	-	339.718.068		
6084.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	130.256.765	186.431.094	-	-	-	316.687.859	01 . 51	
01 RM		130.256.765	186.431.094	-	-	-	316.687.859	133@	
6084.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	15.269.125	-	-	15.269.125	01 . 51	
01 RM		-	-	15.269.125	-	-	15.269.125	133	
6084.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	7.761.084	-	-	-	7.761.084	01 . 51	
01 RM		-	7.761.084	-	-	-	7.761.084	133	
6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal	-	33.162.899	147.526.622	-	-	180.689.521		
6085.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	489.263	-	-	-	489.263	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



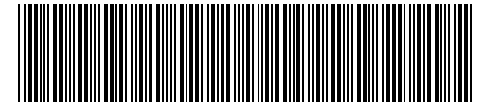
DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	489.263	-	-	-	489.263	133	
6085.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.872.336	201.020	-	-	5.073.356	01 . 51	
01 RM		-	4.872.336	201.020	-	-	5.073.356	133	
6085.CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	724.927	135.580.155	-	-	136.305.082	01 . 51	
01 RM		-	724.927	135.580.155	-	-	136.305.082	133	
6085.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	24.835.138	1.423.350	-	-	26.258.488	01 . 51	
01 RM		-	24.835.138	1.423.350	-	-	26.258.488	133	
6085.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.241.235	10.322.097	-	-	12.563.332	01 . 51	
01 RM		-	2.241.235	10.322.097	-	-	12.563.332	133	
6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal	-	11.193.113	1.878.325	-	-	13.071.438		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6086.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	7.422	-	-	-	7.422	01 . 51	
01	RM	-	7.422	-	-	-	7.422	133	
6086.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	600.445	-	-	-	600.445	01 . 51	
01	RM	-	600.445	-	-	-	600.445	133	
6086.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.556.864	-	-	-	2.556.864	01 . 51	
01	RM	-	2.556.864	-	-	-	2.556.864	133	
6086.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	7.371.589	1.878.325	-	-	9.249.914	01 . 51	
01	RM	-	7.371.589	1.878.325	-	-	9.249.914	133	
6086.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	656.793	-	-	-	656.793	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	656.793	-	-	-	656.793	133	
JUMLAH		130.256.765	252.150.624	164.763.662	-	-	547.171.051		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



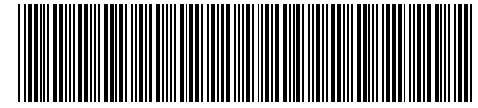
DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	403200	SEKRETARIAT JENDERAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	14.334.110	38.162.979	42.109.983	22.980.280	30.147.796	39.146.775	28.269.231	31.862.156	115.363.072	41.180.412	48.275.199	95.339.059	547.171.051
		BELANJA PEGAWAI	8.636.518	9.532.621	18.306.185	8.812.575	8.664.912	17.807.356	9.050.585	8.902.029	10.337.242	10.226.920	10.406.661	9.573.163	130.256.765
		BELANJA BARANG	5.697.593	28.009.381	18.821.405	13.936.102	21.431.672	21.192.584	18.610.052	17.657.794	15.510.246	27.415.902	28.618.166	35.249.725	252.150.624
		BELANJA MODAL	0	620.977	4.982.392	231.603	51.212	146.835	608.593	5.302.334	89.515.584	3.537.590	9.250.372	50.516.171	164.763.662
	010.01.WA.6083	Layanan Legislasi dan Litigasi Sekretariat Jenderal	0	412.339	797.818	250.814	283.640	629.174	640.286	843.733	823.840	2.823.810	2.531.477	3.655.093	13.692.024
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	412.339	797.818	250.814	283.640	629.174	640.286	843.733	823.840	2.823.810	2.531.477	3.565.503	13.602.434
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.590	89.590
	010.01.WA.6084	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal	13.131.400	36.515.064	39.389.204	20.940.970	27.335.936	36.314.504	23.129.141	28.012.039	21.843.150	28.925.135	28.959.993	35.221.531	339.718.068
		51 BELANJA PEGAWAI	8.636.518	9.532.621	18.306.185	8.812.575	8.664.912	17.807.356	9.050.585	8.902.029	10.337.242	10.226.920	10.406.661	9.573.163	130.256.765
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	4.494.883	26.368.837	16.109.823	11.901.167	18.652.538	18.442.212	13.973.573	14.118.607	11.445.046	18.186.831	17.524.269	22.974.392	194.192.178
		53 BELANJA MODAL	0	613.606	4.973.196	227.229	18.487	64.936	104.983	4.991.403	60.862	511.383	1.029.063	2.673.977	15.269.125
	010.01.WA.6085	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal	574.944	921.812	1.556.936	1.619.610	2.398.226	1.499.744	3.531.937	2.612.487	92.198.603	8.003.696	11.568.385	54.203.142	180.689.521
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	574.944	921.812	1.556.936	1.619.610	2.366.694	1.499.744	3.129.444	2.304.121	2.745.074	5.167.121	3.350.921	7.926.480	33.162.899
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	31.532	0	402.493	308.365	89.453.529	2.836.575	8.217.464	46.276.662	147.526.622
	010.01.WA.6086	Pengelolaan Organisasi dan SDM Sekretariat Jenderal	627.766	313.763	366.025	168.885	129.994	703.353	967.867	393.898	497.479	1.427.771	5.215.343	2.259.293	13.071.438
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	627.766	306.393	356.829	164.512	128.800	621.454	866.750	391.333	496.286	1.238.140	5.211.499	783.351	11.193.113
		53 BELANJA MODAL	0	7.370	9.196	4.374	1.193	81.898	101.117	2.565	1.193	189.631	3.845	1.475.942	1.878.325
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.652	1.652	1.652	187.439	1.689	1.689	1.731	709.799	1.777	1.717	528.844	8.411	1.448.052

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403200) SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		- PNBP (425122)	0	0	0	185.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.750
		- PNBP (425131)	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652	1.652	709.674	1.652	1.652	1.652	8.411	734.602	
		- PNBP (425429)	0	0	0	38	38	38	79	125	125	66	527.192	0	527.700	

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025
IV A. B L O K I R**



DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [403200] SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
403200	<p>SEKRETARIAT JENDERAL</p> <p style="padding-left: 20px;">Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 2.110.474</p> <p style="padding-left: 40px;">52 Belanja Barang Rp. 2.110.474</p>		
010.01.WA 6084	<p>Program Dukungan Manajemen</p> <p>Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Sekretariat Jenderal</p>		
6084.EBA	<p>Layanan Dukungan Manajemen Internal</p> <p>521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 589.300 Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait</p> <p>521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.231.174 Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait</p> <p>522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 290.000 Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait</p>		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.403200/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:0001-6483-1610-0716

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [403200] SEKRETARIAT JENDERAL

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

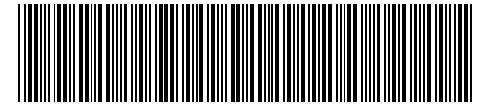
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.01.1.448302/2025**



DS:7062-7890-6993-3299

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 16

Tanggal : 11 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 3. Provinsi : (02) JAWA BARAT
 4. Kode>Nama Satker : (448302) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
- Sebesar : Rp. 423.391.008.000 (EMPAT RATUS DUA PULUH TIGA MILIAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.03 PELAYANAN UMUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	409.270.387.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	14.120.621.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SUMEDANG (087) Rp. 423.391.008.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.448302/2025



DS:7062-7890-6993-3299

Satker : (448302) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	423.391.008.000
WA.6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	Rp.	442.280.000
WA.6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	Rp.	359.615.319.000
WA.6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	Rp.	325.577.000
WA.6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	Rp.	3.467.814.000
WA.6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	Rp.	59.540.018.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.448302/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7062-7890-6993-3299

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (448302) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Halaman : I A. 1

Program	:	010.01.WA	Program Dukungan Manajemen			423.391.008.000
Kegiatan	:	6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN			442.280.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Regulasi lingkup IPDN yang ditetapkan sesuai Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Kemendagri (Prosundagri)			
		2. 02	Persentase Layanan Hukum Lingkup IPDN			
		3. 03	Persentase Penanganan Sengketa Hukum terkait IPDN di Lembaga Peradilan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6088.AAG	Peraturan Menteri	2,00	PerMen, Perka, RPermen	30.536.000
Rincian Output	:	01	AAG.S01 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Statuta IPDN	1,00	PerMen	20.294.000
		02	AAG.S02 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN	1,00	PerMen	10.242.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6088.AAH	Peraturan lainnya	6,00	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	118.752.000
Rincian Output	:	01	AAH.001 Keputusan Menteri Dalam Negeri Terkait IPDN	2,00	peraturan	36.259.000
		02	AAH.002 Peraturan Rektor IPDN	4,00	peraturan	82.493.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6088.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	292.992.000
Rincian Output	:	01	EBA.957 Layanan Hukum	1,00	Layanan	283.384.000
		02	EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	2,00	Layanan	9.608.000
Kegiatan	:	6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN			359.615.319.000
	:	1. 01	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran			
	:	2. 02	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan			
	:	3. 03	Hasil penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPDN			
	:	4. 04	Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.448302/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7062-7890-6993-3299

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (448302) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Halaman : I A. 2

Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN

- 5. 05 Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan praja
- 6. 06 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu
- 7. 07 Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
- 8. 08 Persentase penyelesaian hasil-hasil pemeriksaan dan tindaklanjut LHP
- 9. 09 Persentase penyelesaian administrasi data pokok praja
- 10. 10 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Unit Kerja Esselon II Lingkup IPDN
- 11. 11 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada IPDN Kampus Daerah

Klasifikasi Rincian Output	4	:	6089.ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	352.950.000
Rincian Output		:	01 ABO.001	Penyusunan Grand Design Pengembangan Smart Campus IPDN	1.00	Kajian	352.950.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6089.AEA	Koordinasi	8,00	kegiatan	464.645.000
Rincian Output		:	01 AEA.001	Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	8.00	kegiatan	464.645.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6089.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	333.587.429.000
Rincian Output		:	01 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	2.967.627.000
		:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	330.619.802.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6089.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6.216,00	Unit, m2, Paket	24.555.472.000
Rincian Output		:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	6179.00	Unit	19.351.132.000
		:	02 EBB.971	Layanan Prasarana Internal	37.00	Unit	5.204.340.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.448302/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7062-7890-6993-3299

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (448302) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	8	:	6089.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	654.823.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.00	Dokumen	251.426.000
		:	02 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	403.397.000
Kegiatan		:	6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN			325.577.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat lingkup IPDN yang ditindaklanjuti			
		:	2. 02	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup IPDN			
		:	3. 03	Persentase Aplikasi Yang Terintegrasi Pada Portal Utama IPDN Dalam Mendukung Penerapan Smart Campus			
Klasifikasi Rincian Output	9	:	6090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	325.577.000
Rincian Output		:	01 EBA.959	Layanan Keprotokolan	1.00	Layanan	101.925.000
		:	02 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	31.843.000
		:	03 EBA.S01	Layanan Kehumasan dan Informasi	1.00	Layanan	191.809.000
Kegiatan		:	6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN			3.467.814.000
		:	1. 01	Jumlah kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditindaklanjuti			
		:	2. 02	Akreditasi Institusi Baik Sekali			
		:	3. 03	Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah Baik Sekali			
		:	4. 04	Jumlah tenaga Kependidikan yang telah tersertifikasi			
		:	5. 05	Persentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala			
		:	6. 06	Persentase Dosen Dengan Jabatan Guru Besar			
		:	7. 07	Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi			
		:	8. 08	Jumlah karya tulis yang diterbitkan			
		:	9. 09	Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.448302/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



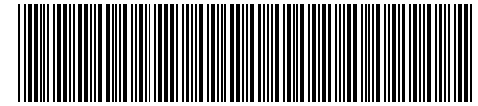
DS:7062-7890-6993-3299

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (448302) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	10	:	6091.ADB	Akreditasi Produk	3,00	produk	882.428.000
Rincian Output		:	01	ADB.001 Akreditasi Institusi dan Prodi	3,00	produk	882.428.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	6091.AEC	Kerja sama	8,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	276.123.000
Rincian Output		:	01	AEC.001 Kerjasama Dalam Negeri	7,00	Kesepakatan	102.195.000
Rincian Output		:	02	AEC.002 Kerjasama Luar Negeri	1,00	Kesepakatan	173.928.000
Klasifikasi Rincian Output	12	:	6091.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	205.377.000
Rincian Output		:	01	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5,00	Layanan	205.377.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	6091.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.298,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	918.472.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	1298,00	Orang	918.472.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	6091.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.185.414.000
Rincian Output		:	01	EBD.001 Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	3,00	Laporan	328.764.000
Rincian Output		:	02	EBD.965 Layanan Audit Internal	2,00	Dokumen	726.882.000
Rincian Output		:	03	EBD.S02 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	2,00	Dokumen	129.768.000
Kegiatan		:	6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN			59.540.018.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi			
Indikator Kinerja Kegiatan		:	2. 02	Persentase Lulusan D.IV dengan Predikat Cumlaude			
Indikator Kinerja Kegiatan		:	3. 03	Persentase Lulusan Program S-2 Dengan Predikat Cumlaude			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.448302/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7062-7890-6993-3299

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (448302) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Halaman : I A. 5

Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN

- 4. 04 Persentase Lulusan Program S-3 Dengan Predikat Cumlaude
- 5. 05 Jumlah Publikasi Hasil Penelitian IPDN Dalam Jurnal Nasional/Internasional Terakreditasi Dan Bereputasi
- 6. 06 Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang Diimplementasikan Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Daerah
- 7. 07 Jumlah Kader Pamong Praja Muda (PPM)
- 8. 08 Jumlah Prestasi Ekstrakurikuler Praja Pada Tingkat Nasional
- 9. 09 Persentase Lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan

Klasifikasi Rincian Output	15	:	6092.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	14,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.690.831.000
Rincian Output		:	01	ABL.005 Pengabdian Masyarakat	1,00	Rekomendasi Kebijakan	436.152.000
		:	02	ABL.S01 Publikasi Bereputasi Nasional Hasil Riset dan Inovasi	10,00	Rekomendasi Kebijakan	1.075.553.000
		:	03	ABL.S03 Naskah Kebijakan Aktual Strategis	3,00	Rekomendasi Kebijakan	179.126.000
Klasifikasi Rincian Output	16	:	6092.DBA	Pendidikan Tinggi	260,00	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	11.540.233.000
Rincian Output		:	01	DBA.001 Layanan Pendidikan Program Pasca Sarjana	160,00	Orang	8.700.813.000
		:	02	DBA.002 Layanan Pendidikan Program Profesi Kepamongprajaan	100,00	Orang	2.839.420.000
Klasifikasi Rincian Output	17	:	6092.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.882,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	46.308.954.000
Rincian Output		:	01	EBC.001 Seleksi Penerimaan Calon Praja	1061,00	Orang	13.847.006.000
		:	02	EBC.968 Layanan Pendidikan Kedinasan	2821,00	Orang	32.461.948.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

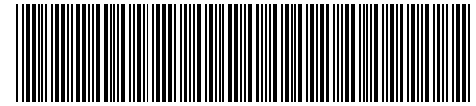
ttd.
Toms Tohir
69010187

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.01.1.448302/2025

I B. SUMBER DANA



DS:7062-7890-6993-3299

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 Provinsi : (02) JAWA BARAT
 Kode>Nama Satker : (448302) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	423.391.008.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	409.270.387.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.448302/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7062-7890-6993-3299

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (448302) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	175.050.318	224.549.322	23.791.368	-	-	423.391.008		
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	175.050.318	224.549.322	23.791.368	-	-	423.391.008		
6088	Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	-	442.280	-	-	-	442.280		
6088.AAG	Peraturan Menteri (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	-	30.536	-	-	-	30.536	02 . 13	
01	RM	-	30.536	-	-	-	30.536	087	
6088.AAH	Peraturan lainnya (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	-	118.752	-	-	-	118.752	02 . 13	
01	RM	-	118.752	-	-	-	118.752	087	
6088.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	-	292.992	-	-	-	292.992	02 . 13	
01	RM	-	292.992	-	-	-	292.992	087	
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	175.050.318	160.773.633	23.791.368	-	-	359.615.319		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.448302/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7062-7890-6993-3299

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (448302) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6089.ABO	Kebijakan Bidang Teknologi Informasi (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	-	352.950	-	-	-	352.950	02 . 13	
01	RM	-	352.950	-	-	-	352.950	087	
6089.AEA	Koordinasi (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	-	464.645	-	-	-	464.645	02 . 13	
01	RM	-	464.645	-	-	-	464.645	087	
6089.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	175.050.318	158.537.111	-	-	-	333.587.429	02 . 13	
01	RM	175.050.318	158.532.724	-	-	-	333.583.042	087	
04	PNBP	-	4.387	-	-	-	4.387	087	
6089.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	-	764.104	23.791.368	-	-	24.555.472	02 . 13	
01	RM	-	751.604	21.682.452	-	-	22.434.056	087	
04	PNBP	-	12.500	2.108.916	-	-	2.121.416	087	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.448302/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7062-7890-6993-3299

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (448302) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6089.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	-	654.823	-	-	-	654.823	02 . 13	
01	RM	-	654.823	-	-	-	654.823	087	
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	-	325.577	-	-	-	325.577		
6090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	-	325.577	-	-	-	325.577	02 . 13	
01	RM	-	325.577	-	-	-	325.577	087	
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	-	3.467.814	-	-	-	3.467.814		
6091.ADB	Akreditasi Produk (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	-	882.428	-	-	-	882.428	02 . 13	
01	RM	-	621.890	-	-	-	621.890	087	
04	PNBP	-	260.538	-	-	-	260.538	087	
6091.AEC	Kerja sama (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	-	276.123	-	-	-	276.123	02 . 13	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.448302/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7062-7890-6993-3299

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (448302) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	276.123	-	-	-	276.123	087	
6091.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	-	205.377	-	-	-	205.377	02 . 13	
01 RM		-	205.377	-	-	-	205.377	087	
6091.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	-	918.472	-	-	-	918.472	02 . 13	
01 RM		-	918.472	-	-	-	918.472	087	
6091.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	-	1.185.414	-	-	-	1.185.414	02 . 13	
01 RM		-	1.185.414	-	-	-	1.185.414	087	
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	-	59.540.018	-	-	-	59.540.018		
6092.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	-	1.690.831	-	-	-	1.690.831	02 . 13	
01 RM		-	1.602.340	-	-	-	1.602.340	087	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.448302/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7062-7890-6993-3299

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (448302) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
Kewenangan : (KP)

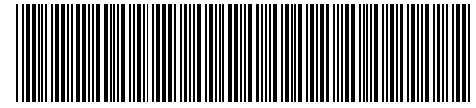
Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNPB		-	88.491	-	-	-	88.491	087	
6092.DBA	Pendidikan Tinggi (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	-	11.540.233	-	-	-	11.540.233	02 . 13	
04 PNPB		-	11.540.233	-	-	-	11.540.233	087	
6092.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (02.13 JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG)	-	46.308.954	-	-	-	46.308.954	02 . 13	
01 RM		-	46.203.398	-	-	-	46.203.398	087	
04 PNPB		-	105.556	-	-	-	105.556	087	
JUMLAH		175.050.318	224.549.322	23.791.368	-	-	423.391.008		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.448302/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7062-7890-6993-3299

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal

Provinsi : (02) JAWA BARAT

Kode>Nama Satker : (448302) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	448302	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	35.560.360	21.513.568	47.607.973	22.611.694	28.776.483	38.507.412	26.118.626	30.117.478	31.531.540	42.121.487	41.353.428	57.570.959	423.391.008
		BELANJA PEGAWAI	8.222.664	11.897.101	24.298.518	11.970.339	11.831.287	24.410.505	11.981.926	13.040.177	13.661.398	13.919.953	14.003.889	15.812.562	175.050.318
		BELANJA BARANG	27.337.696	9.366.502	23.309.455	10.641.356	16.945.197	13.903.805	13.472.192	17.077.301	17.359.827	26.375.072	19.408.503	29.352.418	224.549.322
		BELANJA MODAL	0	249.965	0	0	0	193.102	664.508	0	510.316	1.826.462	7.941.035	12.405.979	23.791.368
010.01.WA.6088		Layanan Legislasi dan Litigasi IPDN	8.159	20.137	90.844	57.996	52.861	9.028	13.529	39.840	34.391	45.401	13.959	56.136	442.280
010.01.WA.6089		52 BELANJA BARANG DAN JASA Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	8.159	20.137	90.844	57.996	52.861	9.028	13.529	39.840	34.391	45.401	13.959	56.136	442.280
010.01.WA.6090		51 BELANJA PEGAWAI 52 BELANJA BARANG DAN JASA 53 BELANJA MODAL Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	8.222.664	11.897.101	24.298.518	11.970.339	11.831.287	24.410.505	11.981.926	13.040.177	13.661.398	13.919.953	14.003.889	15.812.562	175.050.318
010.01.WA.6091		52 BELANJA BARANG DAN JASA 53 BELANJA MODAL Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	25.981.767	7.486.092	19.272.912	8.111.393	13.083.264	11.057.507	10.598.636	9.095.945	7.808.436	16.575.112	13.086.670	18.615.900	160.773.633
010.01.WA.6092		52 BELANJA BARANG DAN JASA 53 BELANJA MODAL Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	0	249.965	0	0	0	193.102	664.508	0	510.316	1.826.462	7.941.035	12.405.979	23.791.368
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	74.050	91.226	56.105	53.700	1.329	16.740	1.881	0	4.689	10.250	15.608	325.577
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	125.513	287.231	515.926	134.484	277.721	302.298	139.535	95.219	205.955	486.884	263.571	633.476	3.467.814
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	125.513	287.231	515.926	134.484	277.721	302.298	139.535	95.219	205.955	486.884	263.571	633.476	3.467.814
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.222.257	1.498.992	3.338.548	2.281.378	3.477.650	2.533.643	2.703.751	7.844.415	9.311.044	9.262.986	6.034.054	10.031.298	59.540.018
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.222.257	1.498.992	3.338.548	2.281.378	3.477.650	2.533.643	2.703.751	7.844.415	9.311.044	9.262.986	6.034.054	10.031.298	59.540.018
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.880.836	2.957.322	1.034.852	671.292	1.407.520	1.503.875	669.440	2.173.672	2.292.166	2.127.777	697.630	374.804	17.791.186

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.448302/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7062-7890-6993-3299

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (448302) INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		- PNB (425131)	140.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.408
		- PNB (425313)	0	0	1.467	338	0	2.295	901	941	3.730	0	0	0	9.672	
		- PNB (425411)	41.750	28.250	6.500	14.250	14.000	30.500	53.500	11.250	0	0	0	0	200.000	
		- PNB (425412)	1.640.178	2.885.572	1.004.135	635.954	1.351.270	1.385.330	596.693	2.161.481	1.508.436	1.791.777	697.630	374.804	16.033.260	
		- PNB (425413)	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000	336.000	0	0	1.116.000	
		- PNB (425419)	58.500	43.500	22.750	20.750	42.250	85.750	18.346	0	0	0	0	0	291.846	

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.448302/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7062-7890-6993-3299

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [448302] INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

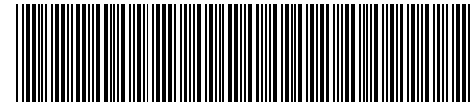
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Tomsu Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.1.448302/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:7062-7890-6993-3299

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [448302] INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

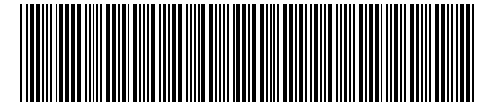
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Tomsy Tohir
69010187



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.01.2.683070/2025**



DS:7305-9367-6082-4100

Revisi ke 16

Tanggal : 12 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 3. Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
 4. Kode>Nama Satker : (683070) IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT
- Sebesar : Rp. 26.734.769.000 (DUA PULUH ENAM MILIAR TUJUH RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.03 PELAYANAN UMUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	26.734.769.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PONTIANAK (042) Rp. 26.734.769.000

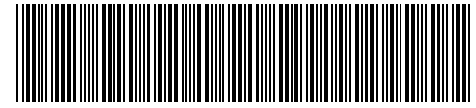
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683070/2025

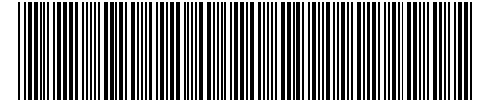


DS:7305-9367-6082-4100

Satker : (683070) IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	26.734.769.000
WA.6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	Rp.	26.065.635.000
WA.6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	Rp.	6.180.000
WA.6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	Rp.	40.280.000
WA.6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	Rp.	622.674.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683070/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



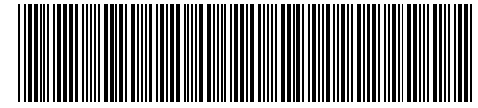
DS:7305-9367-6082-4100

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (683070) IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	010.01.WA	Program Dukungan Manajemen			26.734.769.000
Kegiatan	:	6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN			26.065.635.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran			
		2. 02	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan			
		3. 03	Hasil penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPDN			
		4. 04	Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu			
		5. 05	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan praja			
		6. 06	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu			
		7. 07	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan			
		8. 08	Persentase penyelesaian hasil-hasil pemeriksaan dan tindaklanjut LHP			
		9. 09	Persentase penyelesaian administrasi data pokok praja			
		10. 10	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Unit Kerja Esselon II Lingkup IPDN			
		11. 11	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada IPDN Kampus Daerah			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6089.AEA Koordinasi	4,00	kegiatan	50.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	4.00	kegiatan	50.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6089.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	24.341.738.000
Rincian Output	:	01	EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan	39.348.000
		02	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	24.302.390.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6089.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	804,00	Unit, m2, Paket	1.723.797.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	803.00	Unit	653.724.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683070/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7305-9367-6082-4100

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (683070) IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT

Halaman : I A. 2

			Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit, m2, Paket		
	02	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.00	Unit		1.070.073.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	6089.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		50.000
Rincian Output	:	01 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen		50.000
Kegiatan	:	6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN				6.180.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat lingkup IPDN yang ditindaklanjuti				
		2. 02	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup IPDN				
		3. 03	Persentase Aplikasi Yang Terintegrasi Pada Portal Utama IPDN Dalam Mendukung Penerapan Smart Campus				
Klasifikasi Rincian Output 5	:	6090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		6.180.000
Rincian Output	:	01 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan		6.180.000
Kegiatan	:	6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN				40.280.000
	:	1. 01	Jumlah kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditindaklanjuti				
	:	2. 02	Akreditasi Institusi Baik Sekali				
	:	3. 03	Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah Baik Sekali				
	:	4. 04	Jumlah tenaga Kependidikan yang telah tersertifikasi				
	:	5. 05	Persentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala				
	:	6. 06	Persentase Dosen Dengan Jabatan Guru Besar				
	:	7. 07	Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi				
	:	8. 08	Jumlah karya tulis yang diterbitkan				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683070/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7305-9367-6082-4100

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (683070) IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT

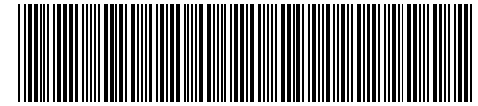
Halaman : I A. 3

Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN

9. 09 Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni

Klasifikasi Rincian Output	6	:	6091.AEC	Kerja sama	1,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	50.000	
Rincian Output	01	:	AEC.001	Kerjasama Dalam Negeri	1,00	Kesepakatan	50.000	
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6091.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	100.000	
Rincian Output	01	:	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	100.000	
Klasifikasi Rincian Output	8	:	6091.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	60,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	200.000	
Rincian Output	01	:	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	60,00	Orang	200.000	
Klasifikasi Rincian Output	9	:	6091.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	39.930.000	
Rincian Output	01	:	EBD.001	Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	1,00	Laporan	39.930.000	
Kegiatan	6092	:	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN					622.674.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	:	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi					
	2. 02	:	Persentase Lulusan D.IV dengan Predikat Cumlaude					
	3. 03	:	Persentase Lulusan Program S-2 Dengan Predikat Cumlaude					
	4. 04	:	Persentase Lulusan Program S-3 Dengan Predikat Cumlaude					
	5. 05	:	Jumlah Publikasi Hasil Penelitian IPDN Dalam Jurnal Nasional/Internasional Terakreditasi Dan Bereputasi					
	6. 06	:	Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang Diimplementasikan Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Daerah					
	7. 07	:	Jumlah Kader Pamong Praja Muda (PPM)					

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683070/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7305-9367-6082-4100

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (683070) IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT

Halaman : I A. 4

Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN

- 8. 08 Jumlah Prestasi Ekstrakurikuler Praja Pada Tingkat Nasional
- 9. 09 Persentase Lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan

Klasifikasi Rincian Output	10	:	6092.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	145,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	622.674.000
Rincian Output		:	01 EBC.968	Layanan Pendidikan Kedinasan	145,00	Orang	622.674.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683070/2025**



DS:7305-9367-6082-4100

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (683070) IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT

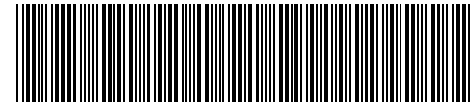
Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	26.734.769.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	26.734.769.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683070/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



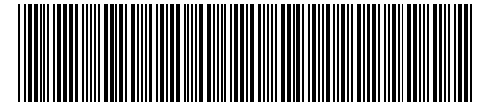
DS:7305-9367-6082-4100

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (683070) IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT	6.862.722	18.148.250	1.723.797	-	-	26.734.769		
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	6.862.722	18.148.250	1.723.797	-	-	26.734.769		
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	6.862.722	17.479.116	1.723.797	-	-	26.065.635		
6089.AEA	Koordinasi (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	-	50	-	-	-	50	13 . 04	
01	RM	-	50	-	-	-	50	042	
6089.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	6.862.722	17.479.016	-	-	-	24.341.738	13 . 04	
01	RM	6.862.722	17.479.016	-	-	-	24.341.738	042	
6089.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	-	-	1.723.797	-	-	1.723.797	13 . 04	
01	RM	-	-	1.723.797	-	-	1.723.797	042	
6089.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	-	50	-	-	-	50	13 . 04	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683070/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



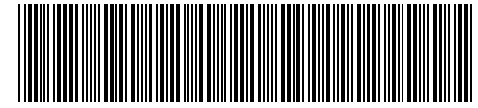
DS:7305-9367-6082-4100

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (683070) IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	50	-	-	-	50	042	
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	-	6.180	-	-	-	6.180		
6090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	-	6.180	-	-	-	6.180	13 . 04	
01 RM		-	6.180	-	-	-	6.180	042	
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	-	40.280	-	-	-	40.280		
6091.AEC	Kerja sama (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	-	50	-	-	-	50	13 . 04	
01 RM		-	50	-	-	-	50	042	
6091.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	-	100	-	-	-	100	13 . 04	
01 RM		-	100	-	-	-	100	042	
6091.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	-	200	-	-	-	200	13 . 04	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683070/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7305-9367-6082-4100

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (683070) IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT
Kewenangan : (KD)

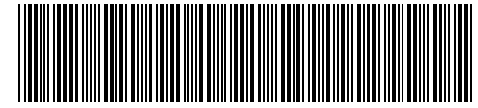
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	200	-	-	-	200	042	
6091.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	-	39.930	-	-	-	39.930	13 . 04	
01 RM		-	39.930	-	-	-	39.930	042	
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongpraajaan IPDN	-	622.674	-	-	-	622.674		
6092.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (13.04 KALIMANTAN BARAT / KAB. MEMPAWAH)	-	622.674	-	-	-	622.674	13 . 04	
01 RM		-	622.674	-	-	-	622.674	042	
JUMLAH		6.862.722	18.148.250	1.723.797	-	-	26.734.769		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Tomsu Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683070/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7305-9367-6082-4100

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (683070) IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT

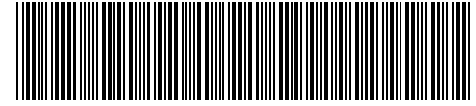
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	683070	IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	584.187	2.439.529	2.661.132	1.449.491	1.051.154	1.929.856	1.391.826	1.365.427	2.007.254	4.757.974	3.027.852	4.069.088	26.734.769
		BELANJA PEGAWAI	209.552	413.375	827.238	418.024	400.049	843.600	421.754	510.496	650.099	689.051	769.873	709.611	6.862.722
		BELANJA BARANG	374.636	2.026.154	1.833.894	741.557	651.105	1.086.256	970.071	854.930	1.357.155	3.723.224	1.776.636	2.752.631	18.148.250
		BELANJA MODAL	0	0	0	289.910	0	0	0	0	0	345.698	481.343	606.846	1.723.797
	010.01.WA.6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	584.187	2.421.124	2.576.992	1.434.508	1.015.217	1.852.830	1.310.718	1.336.047	1.952.784	4.671.956	2.949.103	3.960.169	26.065.635
		51 BELANJA PEGAWAI	209.552	413.375	827.238	418.024	400.049	843.600	421.754	510.496	650.099	689.051	769.873	709.611	6.862.722
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	374.636	2.007.749	1.749.754	726.574	615.168	1.009.231	888.964	825.550	1.302.685	3.637.207	1.697.888	2.643.711	17.479.116
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	289.910	0	0	0	0	0	345.698	481.343	606.846	1.723.797
	010.01.WA.6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	0	0	0	0	0	4.702	0	0	0	0	680	798	6.180
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	4.702	0	0	0	0	680	798	6.180
	010.01.WA.6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	0	0	0	0	43	100	30.286	9.500	0	0	200	151	40.280
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	43	100	30.286	9.500	0	0	200	151	40.280
	010.01.WA.6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	0	18.405	84.140	14.983	35.894	72.224	50.821	19.880	54.470	86.018	77.869	107.971	622.674
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	18.405	84.140	14.983	35.894	72.224	50.821	19.880	54.470	86.018	77.869	107.971	622.674

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683070/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7305-9367-6082-4100

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [683070] IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT

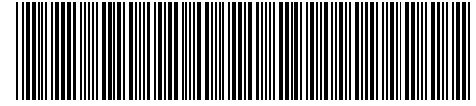
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Tomsu Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683070/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:7305-9367-6082-4100

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [683070] IPDN KAMPUS KALIMANTAN BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Tomsu Tohir
69010187



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.01.2.683084/2025**



DS:9402-7257-0554-4740

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 15

Tanggal : 12 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 3. Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
 4. Kode/Nama Satker : (683084) IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT
- Sebesar : Rp. 28.281.918.000 (DUA PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.03 PELAYANAN UMUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	28.281.918.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A T A R A M (038) Rp. 28.281.918.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683084/2025

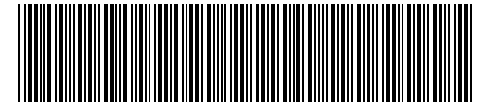


DS:9402-7257-0554-4740

Satker : (683084) IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	28.281.918.000
WA.6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	Rp.	27.560.848.000
WA.6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	Rp.	7.152.000
WA.6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	Rp.	154.679.000
WA.6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	Rp.	559.239.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683084/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



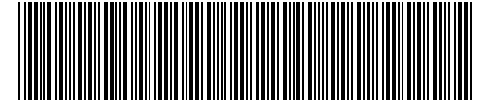
DS:9402-7257-0554-4740

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (683084) IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	010.01.WA	Program Dukungan Manajemen			28.281.918.000
Kegiatan	:	6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN			27.560.848.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran			
		2. 02	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan			
		3. 03	Hasil penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPDN			
		4. 04	Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu			
		5. 05	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan praja			
		6. 06	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu			
		7. 07	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan			
		8. 08	Persentase penyelesaian hasil-hasil pemeriksaan dan tindaklanjut LHP			
		9. 09	Persentase penyelesaian administrasi data pokok praja			
		10. 10	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Unit Kerja Esselon II Lingkup IPDN			
		11. 11	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada IPDN Kampus Daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6089.AEA	Koordinasi	4,00	kegiatan	295.974.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	4,00	kegiatan	295.974.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6089.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	26.691.573.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	378.483.000
		02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	26.313.090.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6089.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	281,00	Unit, m2, Paket	533.500.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	281,00	Unit	533.500.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683084/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9402-7257-0554-4740

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (683084) IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	4	:	6089.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	39.801.000
Rincian Output		:	01 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	39.801.000
Kegiatan		:	6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN			7.152.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat lingkup IPDN yang ditindaklanjuti			
			2. 02	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup IPDN			
			3. 03	Persentase Aplikasi Yang Terintegrasi Pada Portal Utama IPDN Dalam Mendukung Penerapan Smart Campus			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	7.152.000
Rincian Output		:	01 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	7.152.000
Kegiatan		:	6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN			154.679.000
		:	1. 01	Jumlah kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditindaklanjuti			
			2. 02	Akreditasi Institusi Baik Sekali			
			3. 03	Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah Baik Sekali			
			4. 04	Jumlah tenaga Kependidikan yang telah tersertifikasi			
			5. 05	Persentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala			
			6. 06	Persentase Dosen Dengan Jabatan Guru Besar			
			7. 07	Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi			
			8. 08	Jumlah karya tulis yang diterbitkan			
			9. 09	Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683084/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9402-7257-0554-4740

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (683084) IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	6	:	6091.AEC	Kerja sama	1,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	207.000
Rincian Output		:	01	AEC.001 Kerjasama Dalam Negeri	1,00	Kesepakatan	207.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6091.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	250.000
Rincian Output		:	01	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	250.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	6091.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	89,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	69.138.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	89,00	Orang	69.138.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	6091.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	85.084.000
Rincian Output		:	01	EBD.001 Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	1,00	Laporan	85.084.000
Kegiatan		:	6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN			559.239.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi			
		:	2. 02	Persentase Lulusan D.IV dengan Predikat Cumlaude			
		:	3. 03	Persentase Lulusan Program S-2 Dengan Predikat Cumlaude			
		:	4. 04	Persentase Lulusan Program S-3 Dengan Predikat Cumlaude			
		:	5. 05	Jumlah Publikasi Hasil Penelitian IPDN Dalam Jurnal Nasional/Internasional Terakreditasi Dan Bereputasi			
		:	6. 06	Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang Diimplementasikan Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Daerah			
		:	7. 07	Jumlah Kader Pamong Praja Muda (PPM)			
		:	8. 08	Jumlah Prestasi Ekstrakurikuler Praja Pada Tingkat Nasional			
		:	9. 09	Persentase Lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683084/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9402-7257-0554-4740

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (683084) IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	10	:	6092.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	145,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	559.239.000	
Rincian Output		:	01	EBC.968	Layanan Pendidikan Kedinasan	145,00	Orang	559.239.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.01.2.683084/2025

I B. SUMBER DANA



DS:9402-7257-0554-4740

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
 Kode>Nama Satker : (683084) IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT

Halaman : I B. 1

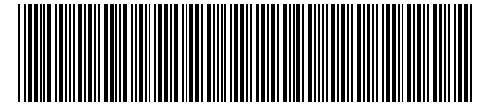
					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	28.281.918.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	28.281.918.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683084/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9402-7257-0554-4740

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (683084) IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT	13.247.377	14.501.041	533.500	-	-	28.281.918		
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	13.247.377	14.501.041	533.500	-	-	28.281.918		
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	13.247.377	13.779.971	533.500	-	-	27.560.848		
6089.AEA	Koordinasi (23.51 NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM)	-	295.974	-	-	-	295.974	23 . 51	
01	RM	-	295.974	-	-	-	295.974	038	
6089.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (23.51 NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM)	13.247.377	13.444.196	-	-	-	26.691.573	23 . 51	
01	RM	13.247.377	13.444.196	-	-	-	26.691.573	038	
6089.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (23.51 NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM)	-	-	533.500	-	-	533.500	23 . 51	
01	RM	-	-	533.500	-	-	533.500	038	
6089.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (23.51 NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM)	-	39.801	-	-	-	39.801	23 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683084/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9402-7257-0554-4740

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (683084) IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	39.801	-	-	-	39.801	038	
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	-	7.152	-	-	-	7.152		
6090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (23.51 NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM)	-	7.152	-	-	-	7.152	23 . 51	
01 RM		-	7.152	-	-	-	7.152	038	
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	-	154.679	-	-	-	154.679		
6091.AEC	Kerja sama (23.51 NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM)	-	207	-	-	-	207	23 . 51	
01 RM		-	207	-	-	-	207	038	
6091.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (23.51 NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM)	-	250	-	-	-	250	23 . 51	
01 RM		-	250	-	-	-	250	038	
6091.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (23.51 NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM)	-	69.138	-	-	-	69.138	23 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683084/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9402-7257-0554-4740

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (683084) IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT
Kewenangan : (KD)

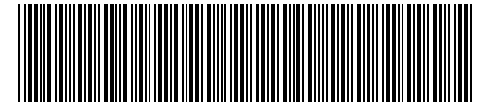
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	69.138	-	-	-	69.138	038	
6091.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (23.51 NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM)	-	85.084	-	-	-	85.084	23 . 51	
01 RM		-	85.084	-	-	-	85.084	038	
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	-	559.239	-	-	-	559.239		
6092.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (23.51 NUSA TENGGARA BARAT / KOTA MATARAM)	-	559.239	-	-	-	559.239	23 . 51	
01 RM		-	559.239	-	-	-	559.239	038	
JUMLAH		13.247.377	14.501.041	533.500	-	-	28.281.918		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683084/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9402-7257-0554-4740

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (23) NUSA TENGGARA BARAT
Kode>Nama Satker : (683084) IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	683084	IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	868.159	1.588.375	2.867.826	1.409.651	1.494.025	2.361.038	1.794.327	1.666.278	2.229.332	2.904.211	3.465.817	5.632.878	28.281.918
		BELANJA PEGAWAI	762.571	864.409	1.790.726	876.605	840.951	1.736.961	895.660	1.017.380	1.092.842	1.103.598	1.128.361	1.137.313	13.247.377
		BELANJA BARANG	105.588	723.966	1.077.100	533.046	653.074	624.078	763.671	648.898	1.136.491	1.767.987	2.009.197	4.457.946	14.501.041
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	134.996	0	0	32.625	328.260	37.619	533.500
	010.01.WA.6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	868.159	1.588.373	2.853.688	1.402.285	1.490.212	2.361.038	1.778.155	1.626.383	2.222.489	2.871.609	3.263.480	5.234.976	27.560.848
		51 BELANJA PEGAWAI	762.571	864.409	1.790.726	876.605	840.951	1.736.961	895.660	1.017.380	1.092.842	1.103.598	1.128.361	1.137.313	13.247.377
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	105.588	723.964	1.062.962	525.679	649.261	624.078	747.500	609.003	1.129.648	1.735.386	1.806.859	4.060.044	13.779.971
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	134.996	0	0	32.625	328.260	37.619	533.500
	010.01.WA.6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	0	2	0	0	0	0	0	3.958	0	630	0	2.562	7.152
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	2	0	0	0	0	0	3.958	0	630	0	2.562	7.152
	010.01.WA.6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.310	117.369	154.679
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.310	117.369	154.679
	010.01.WA.6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	0	0	14.138	7.367	3.813	0	16.172	35.937	6.843	31.971	165.027	277.971	559.239
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	14.138	7.367	3.813	0	16.172	35.937	6.843	31.971	165.027	277.971	559.239

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683084/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9402-7257-0554-4740

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Satker : [683084] IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Tomsu Tohir
69010187

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683084/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:9402-7257-0554-4740

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [23] NUSA TENGGARA BARAT
Kode dan Nama Satker : [683084] IPDN KAMPUS NUSA TENGGARA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

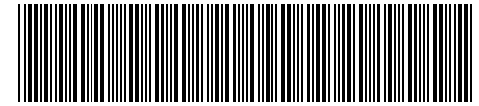
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Tomsu Tohir
69010187



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.01.2.683091/2025**



DS:8630-0616-2041-5900

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 09

Tanggal : 12 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
3. Provinsi : (25) PAPUA
4. Kode>Nama Satker : (683091) IPDN KAMPUS PAPUA
- Sebesar : Rp. 30.717.083.000 (TIGA PULUH MILIAR TUJUH RATUS TUJUH BELAS JUTA DELAPAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.03 PELAYANAN UMUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	30.717.083.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 30.717.083.000

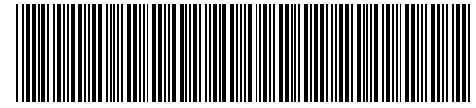
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683091/2025

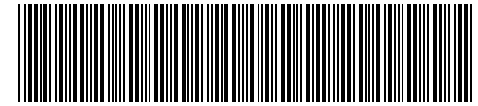


DS:8630-0616-2041-5900

Satker : (683091) IPDN KAMPUS PAPUA

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	30.717.083.000
WA.6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	Rp.	29.040.423.000
WA.6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	Rp.	250.000
WA.6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	Rp.	185.999.000
WA.6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	Rp.	1.490.411.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683091/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8630-0616-2041-5900

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (683091) IPDN KAMPUS PAPUA

Halaman : I A. 1

Program	:	010.01.WA	Program Dukungan Manajemen			30.717.083.000
Kegiatan	:	6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN			29.040.423.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran			
		2. 02	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan			
		3. 03	Hasil penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPDN			
		4. 04	Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu			
		5. 05	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan praja			
		6. 06	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu			
		7. 07	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan			
		8. 08	Persentase penyelesaian hasil-hasil pemeriksaan dan tindaklanjut LHP			
		9. 09	Persentase penyelesaian administrasi data pokok praja			
		10. 10	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Unit Kerja Esselon II Lingkup IPDN			
		11. 11	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada IPDN Kampus Daerah			
Klasifikasi Rincian Output	1 :	6089.AEA	Koordinasi	4,00	kegiatan	160.628.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	4.00	kegiatan	160.628.000
Klasifikasi Rincian Output	2 :	6089.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	28.846.174.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	83.835.000
		02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	28.762.339.000
Klasifikasi Rincian Output	3 :	6089.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	33.621.000
Rincian Output	:	01 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	33.621.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683091/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8630-0616-2041-5900

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (683091) IPDN KAMPUS PAPUA

Halaman : I A. 2

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

Kegiatan	:	6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN			250.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat lingkup IPDN yang ditindaklanjuti			
		2. 02	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup IPDN			
		3. 03	Persentase Aplikasi Yang Terintegrasi Pada Portal Utama IPDN Dalam Mendukung Penerapan Smart Campus			
Klasifikasi Rincian Output	4 :	6090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	250.000
Rincian Output	:	01 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	250.000
Kegiatan	:	6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN			185.999.000
	:	1. 01	Jumlah kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditindaklanjuti			
		2. 02	Akreditasi Institusi Baik Sekali			
		3. 03	Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah Baik Sekali			
		4. 04	Jumlah tenaga Kependidikan yang telah tersertifikasi			
		5. 05	Persentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala			
		6. 06	Persentase Dosen Dengan Jabatan Guru Besar			
		7. 07	Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi			
		8. 08	Jumlah karya tulis yang diterbitkan			
		9. 09	Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683091/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8630-0616-2041-5900

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (683091) IPDN KAMPUS PAPUA

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	5	:	6091.AEC	Kerja sama	1,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	250.000
Rincian Output		:	01	AEC.001 Kerjasama Dalam Negeri	1,00	Kesepakatan	250.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6091.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit Layanan	500.000
Rincian Output		:	01	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	500.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6091.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	43,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	145.460.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	43,00	Orang	145.460.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	6091.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	39.789.000
Rincian Output		:	01	EBD.001 Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	1,00	Laporan	39.789.000
Kegiatan		:	6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN			1.490.411.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi			
		:	2. 02	Persentase Lulusan D.IV dengan Predikat Cumlaude			
		:	3. 03	Persentase Lulusan Program S-2 Dengan Predikat Cumlaude			
		:	4. 04	Persentase Lulusan Program S-3 Dengan Predikat Cumlaude			
		:	5. 05	Jumlah Publikasi Hasil Penelitian IPDN Dalam Jurnal Nasional/Internasional Terakreditasi Dan Bereputasi			
		:	6. 06	Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang Diimplementasikan Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Daerah			
		:	7. 07	Jumlah Kader Pamong Praja Muda (PPM)			
		:	8. 08	Jumlah Prestasi Ekstrakurikuler Praja Pada Tingkat Nasional			
		:	9. 09	Persentase Lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683091/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8630-0616-2041-5900

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (683091) IPDN KAMPUS PAPUA

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	9	:	6092.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	72,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.490.411.000	
Rincian Output		:	01	EBC.968	Layanan Pendidikan Kedinasan	72.00	Orang	1.490.411.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

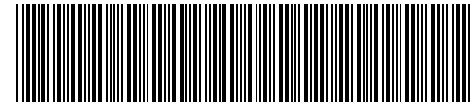
ttd.
Toms Tohir
69010187

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.01.2.683091/2025

I B. SUMBER DANA



DS:8630-0616-2041-5900

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 Provinsi : (25) PAPUA
 Kode>Nama Satker : (683091) IPDN KAMPUS PAPUA

			Pagu				Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	30.717.083.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	30.717.083.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683091/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



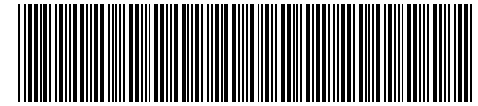
DS:8630-0616-2041-5900

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (683091) IPDN KAMPUS PAPUA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683091	IPDN KAMPUS PAPUA	9.057.064	21.660.019	-	-	-	30.717.083		
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	9.057.064	21.660.019	-	-	-	30.717.083		
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	9.057.064	19.983.359	-	-	-	29.040.423		
6089.AEA	Koordinasi (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	160.628	-	-	-	160.628	25 . 51	
01	RM	-	160.628	-	-	-	160.628	063	
6089.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	9.057.064	19.789.110	-	-	-	28.846.174	25 . 51	
01	RM	9.057.064	19.789.110	-	-	-	28.846.174	063	
6089.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	33.621	-	-	-	33.621	25 . 51	
01	RM	-	33.621	-	-	-	33.621	063	
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	-	250	-	-	-	250		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683091/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8630-0616-2041-5900

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (683091) IPDN KAMPUS PAPUA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	250	-	-	-	250	25 . 51	
01 RM		-	250	-	-	-	250	063	
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	-	185.999	-	-	-	185.999		
6091.AEC	Kerja sama (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	250	-	-	-	250	25 . 51	
01 RM		-	250	-	-	-	250	063	
6091.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	500	-	-	-	500	25 . 51	
01 RM		-	500	-	-	-	500	063	
6091.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	145.460	-	-	-	145.460	25 . 51	
01 RM		-	145.460	-	-	-	145.460	063	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683091/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8630-0616-2041-5900

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (683091) IPDN KAMPUS PAPUA
Kewenangan : (KD)

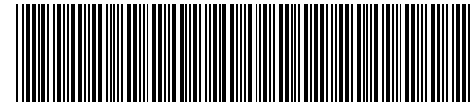
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6091.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	39.789	-	-	-	39.789	25 . 51	
01 RM		-	39.789	-	-	-	39.789	063	
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	-	1.490.411	-	-	-	1.490.411		
6092.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	1.490.411	-	-	-	1.490.411	25 . 51	
01 RM		-	1.490.411	-	-	-	1.490.411	063	
JUMLAH		9.057.064	21.660.019	-	-	-	30.717.083		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683091/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8630-0616-2041-5900

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (683091) IPDN KAMPUS PAPUA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	683091	IPDN KAMPUS PAPUA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	979.161	3.370.215	2.126.711	1.799.580	1.173.652	1.751.360	2.440.060	2.368.722	2.640.839	4.065.079	4.655.416	3.346.289	30.717.083
		BELANJA PEGAWAI	466.700	524.230	1.008.374	501.876	489.017	999.724	564.542	650.317	766.327	894.031	917.649	1.274.278	9.057.064
		BELANJA BARANG	512.461	2.845.986	1.118.337	1.297.704	684.635	751.635	1.875.518	1.718.405	1.874.512	3.171.048	3.737.767	2.072.011	21.660.019
010.01.WA.6089		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	979.161	3.330.987	2.116.771	1.688.150	1.160.552	1.751.360	2.390.210	2.365.752	2.631.221	2.963.365	4.567.389	3.095.506	29.040.423
		51 BELANJA PEGAWAI	466.700	524.230	1.008.374	501.876	489.017	999.724	564.542	650.317	766.327	894.031	917.649	1.274.278	9.057.064
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	512.461	2.806.757	1.108.397	1.186.274	671.535	751.635	1.825.668	1.715.435	1.864.893	2.069.334	3.649.741	1.821.229	19.983.359
010.01.WA.6090		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0	250
010.01.WA.6091		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.752	14.906	88.341	185.999
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.752	14.906	88.341	185.999
010.01.WA.6092		Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	0	39.229	9.940	111.430	13.100	0	49.850	2.970	9.618	1.018.712	73.120	162.442	1.490.411
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	39.229	9.940	111.430	13.100	0	49.850	2.970	9.618	1.018.712	73.120	162.442	1.490.411

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683091/2025
IV A. B L O K I R**



DS:8630-0616-2041-5900

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [683091] IPDN KAMPUS PAPUA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Tomsu Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.683091/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:8630-0616-2041-5900

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [683091] IPDN KAMPUS PAPUA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Tomsu Tohir
69010187



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.01.2.677024/2025**



DS:8006-2554-9555-1072

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 20

Tanggal : 18 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
 4. Kode/Nama Satker : (677024) IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN
- Sebesar : Rp. 28.685.936.000 (DUA PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.03 PELAYANAN UMUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	28.685.936.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAKASSAR I (054) Rp. 28.685.936.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677024/2025

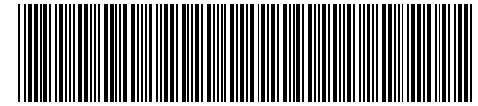


DS:8006-2554-9555-1072

Satker : (677024) IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	28.685.936.000
WA.6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	Rp.	28.170.241.000
WA.6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	Rp.	250.000
WA.6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	Rp.	25.472.000
WA.6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	Rp.	489.973.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677024/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



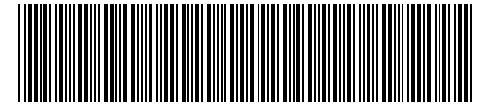
DS:8006-2554-9555-1072

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (677024) IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN

Halaman : I A. 1

Program	:	010.01.WA	Program Dukungan Manajemen			28.685.936.000
Kegiatan	:	6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN			28.170.241.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran			
		2. 02	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan			
		3. 03	Hasil penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPDN			
		4. 04	Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu			
		5. 05	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan praja			
		6. 06	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu			
		7. 07	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan			
		8. 08	Persentase penyelesaian hasil-hasil pemeriksaan dan tindaklanjut LHP			
		9. 09	Persentase penyelesaian administrasi data pokok praja			
		10. 10	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Unit Kerja Esselon II Lingkup IPDN			
		11. 11	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada IPDN Kampus Daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6089.AEA	Koordinasi	4,00	kegiatan	278.660.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	4,00	kegiatan	278.660.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6089.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	26.871.025.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	17.075.000
		02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	26.853.950.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6089.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	8,00	Unit, m2, Paket	1.015.306.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	7,00	Unit	615.948.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677024/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



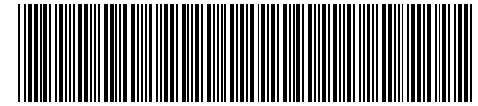
DS:8006-2554-9555-1072

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (677024) IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN

Halaman : I A. 2

Layanan Sarana dan Prasarana Internal			Unit, m2, Paket		
	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1.00	Unit	399.358.000
Klasifikasi Rincian Output	4	: 6089.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.250.000
Rincian Output	:	01 EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	5.250.000
Kegiatan	:	6090 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN			250.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01 Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat lingkup IPDN yang ditindaklanjuti			
		2. 02 Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup IPDN			
		3. 03 Persentase Aplikasi Yang Terintegrasi Pada Portal Utama IPDN Dalam Mendukung Penerapan Smart Campus			
Klasifikasi Rincian Output	5	: 6090.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	250.000
Rincian Output	:	01 EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	250.000
Kegiatan	:	6091 Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN			25.472.000
		1. 01 Jumlah kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditindaklanjuti			
		2. 02 Akreditasi Institusi Baik Sekali			
		3. 03 Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah Baik Sekali			
		4. 04 Jumlah tenaga Kependidikan yang telah tersertifikasi			
		5. 05 Persentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala			
		6. 06 Persentase Dosen Dengan Jabatan Guru Besar			
		7. 07 Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi			
		8. 08 Jumlah karya tulis yang diterbitkan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677024/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8006-2554-9555-1072

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (677024) IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN

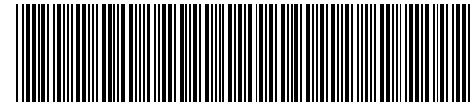
Halaman : I A. 3

Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN

9. 09 Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni

Klasifikasi Rincian Output	6	:	6091.AEC	Kerja sama	1,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	250.000
Rincian Output	:	01	AEC.001	Kerjasama Dalam Negeri	1,00	Kesepakatan	250.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6091.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	500.000
Rincian Output	:	01	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	500.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	6091.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	94,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	750.000
Rincian Output	:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	94,00	Orang	750.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	6091.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	23.972.000
Rincian Output	:	01	EBD.001	Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	1,00	Laporan	23.972.000
Kegiatan	:	6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN				489.973.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi				
		2. 02	Persentase Lulusan D.IV dengan Predikat Cumlaude				
		3. 03	Persentase Lulusan Program S-2 Dengan Predikat Cumlaude				
		4. 04	Persentase Lulusan Program S-3 Dengan Predikat Cumlaude				
		5. 05	Jumlah Publikasi Hasil Penelitian IPDN Dalam Jurnal Nasional/Internasional Terakreditasi Dan Bereputasi				
		6. 06	Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang Diimplementasikan Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Daerah				
		7. 07	Jumlah Kader Pamong Praja Muda (PPM)				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677024/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8006-2554-9555-1072

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (677024) IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN

Halaman : I A. 4

Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN

- 8. 08 Jumlah Prestasi Ekstrakurikuler Praja Pada Tingkat Nasional
- 9. 09 Persentase Lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan

Klasifikasi Rincian Output	10	:	6092.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	143,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	489.973.000
Rincian Output		:	01 EBC.968	Layanan Pendidikan Kedinasan	143,00	Orang	489.973.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

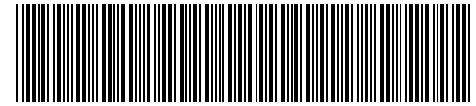
ttd.
Toms Tohir
69010187

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.01.2.677024/2025

I B. SUMBER DANA



DS:8006-2554-9555-1072

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (677024) IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN

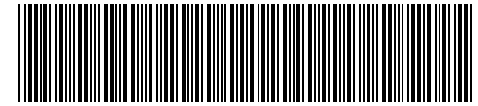
			Pagu				Ekuivalen Rupiah			
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	28.685.936.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0		
1. Rupiah Murni	Rp.	28.685.936.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0		
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0		
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0				
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0				
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0				
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0				

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677024/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



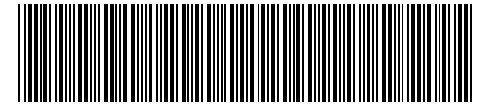
DS:8006-2554-9555-1072

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (677024) IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN	12.053.107	15.617.523	1.015.306	-	-	28.685.936		
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	12.053.107	15.617.523	1.015.306	-	-	28.685.936		
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	12.053.107	15.101.828	1.015.306	-	-	28.170.241		
6089.AEA	Koordinasi (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	278.660	-	-	-	278.660	19.51	
01	RM	-	278.660	-	-	-	278.660	054	
6089.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	12.053.107	14.817.918	-	-	-	26.871.025	19.51	
01	RM	12.053.107	14.817.918	-	-	-	26.871.025	054	
6089.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	-	1.015.306	-	-	1.015.306	19.51	
01	RM	-	-	1.015.306	-	-	1.015.306	054	
6089.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	5.250	-	-	-	5.250	19.51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677024/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



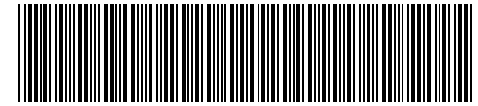
DS:8006-2554-9555-1072

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (677024) IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	5.250	-	-	-	5.250	054	
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	-	250	-	-	-	250		
6090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	250	-	-	-	250	19 . 51	
01 RM		-	250	-	-	-	250	054	
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	-	25.472	-	-	-	25.472		
6091.AEC	Kerja sama (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	250	-	-	-	250	19 . 51	
01 RM		-	250	-	-	-	250	054	
6091.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	500	-	-	-	500	19 . 51	
01 RM		-	500	-	-	-	500	054	
6091.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	750	-	-	-	750	19 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677024/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8006-2554-9555-1072

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (677024) IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN
Kewenangan : (KD)

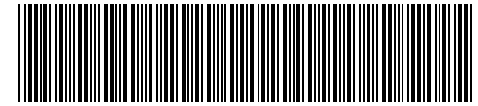
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	750	-	-	-	750	054	
6091.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	23.972	-	-	-	23.972	19 . 51	
01 RM		-	23.972	-	-	-	23.972	054	
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	-	489.973	-	-	-	489.973		
6092.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	489.973	-	-	-	489.973	19 . 51	
01 RM		-	489.973	-	-	-	489.973	054	
JUMLAH		12.053.107	15.617.523	1.015.306	-	-	28.685.936		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677024/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8006-2554-9555-1072

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (677024) IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	677024	IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	620.116	2.106.742	3.110.789	1.683.942	1.443.035	2.397.520	2.075.650	1.759.766	2.070.329	3.340.179	4.653.312	3.424.556	28.685.936
		BELANJA PEGAWAI	541.786	768.571	1.658.698	792.366	762.668	1.611.738	821.216	880.360	993.245	994.176	1.067.137	1.161.145	12.053.107
		BELANJA BARANG	78.330	1.108.417	1.452.090	891.576	680.367	785.782	1.254.434	879.406	1.077.084	2.346.003	2.801.563	2.262.471	15.617.523
		BELANJA MODAL	0	229.754	0	0	0	0	0	0	0	0	784.612	941	1.015.306
010.01.WA.6089		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	620.116	2.103.752	3.108.289	1.635.397	1.442.813	2.396.536	2.046.170	1.741.846	2.066.929	3.290.419	4.597.504	3.120.471	28.170.241
		51 BELANJA PEGAWAI	541.786	768.571	1.658.698	792.366	762.668	1.611.738	821.216	880.360	993.245	994.176	1.067.137	1.161.145	12.053.107
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	78.330	1.105.427	1.449.590	843.031	680.145	784.798	1.224.954	861.486	1.073.684	2.296.243	2.745.755	1.958.385	15.101.828
		53 BELANJA MODAL	0	229.754	0	0	0	0	0	0	0	0	784.612	941	1.015.306
010.01.WA.6090		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
010.01.WA.6091		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.472	25.472
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.472	25.472
010.01.WA.6092		Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	0	2.990	2.500	48.545	222	984	29.480	17.920	3.400	49.760	55.808	278.364	489.973
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	2.990	2.500	48.545	222	984	29.480	17.920	3.400	49.760	55.808	278.364	489.973

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677024/2025
IV A. B L O K I R**



DS:8006-2554-9555-1072

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [677024] IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Tomsu Tohir
69010187

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677024/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:8006-2554-9555-1072

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [677024] IPDN KAMPUS SULAWESI SELATAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

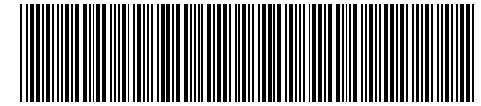
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.01.2.677010/2025**



DS:1638-7641-7976-2081

Revisi ke 12

Tanggal : 09 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
- Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
- Kode>Nama Satker : (677010) IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA
- Sebesar : Rp. 25.698.341.000 (DUA PULUH LIMA MILIAR ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.03 PELAYANAN UMUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	25.698.341.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN M A N A D O (049) Rp. 25.698.341.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677010/2025

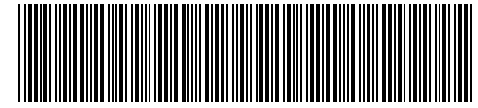


DS:1638-7641-7976-2081

Satker : (677010) IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	25.698.341.000
WA.6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	Rp.	24.639.907.000
WA.6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	Rp.	12.458.000
WA.6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	Rp.	197.688.000
WA.6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	Rp.	848.288.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677010/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



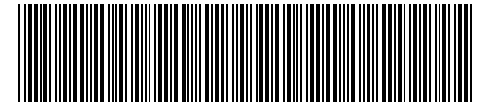
DS:1638-7641-7976-2081

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (677010) IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA

Halaman : I A. 1

Program	:	010.01.WA	Program Dukungan Manajemen			25.698.341.000
Kegiatan	:	6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN			24.639.907.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran			
		2. 02	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan			
		3. 03	Hasil penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPDN			
		4. 04	Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu			
		5. 05	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan praja			
		6. 06	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu			
		7. 07	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan			
		8. 08	Persentase penyelesaian hasil-hasil pemeriksaan dan tindaklanjut LHP			
		9. 09	Persentase penyelesaian administrasi data pokok praja			
		10. 10	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Unit Kerja Esselon II Lingkup IPDN			
		11. 11	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada IPDN Kampus Daerah			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6089.AEA Koordinasi	4,00	kegiatan	165.664.000
Rincian Output		:	01 AEA.001 Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	4,00	kegiatan	165.664.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6089.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	24.360.233.000
Rincian Output		:	01 EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	199.476.000
		:	02 EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	24.160.757.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6089.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	114.010.000
Rincian Output		:	01 EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	114.010.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677010/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1638-7641-7976-2081

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (677010) IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA

Halaman : I A. 2

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

Kegiatan	: 6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN			12.458.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat lingkup IPDN yang ditindaklanjuti			
	2. 02	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup IPDN			
	3. 03	Persentase Aplikasi Yang Terintegrasi Pada Portal Utama IPDN Dalam Mendukung Penerapan Smart Campus			
Klasifikasi Rincian Output	4 : 6090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	12.458.000
Rincian Output	: 01 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	12.458.000
Kegiatan	: 6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN			197.688.000
	: 1. 01	Jumlah kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditindaklanjuti			
	2. 02	Akreditasi Institusi Baik Sekali			
	3. 03	Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah Baik Sekali			
	4. 04	Jumlah tenaga Kependidikan yang telah tersertifikasi			
	5. 05	Persentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala			
	6. 06	Persentase Dosen Dengan Jabatan Guru Besar			
	7. 07	Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi			
	8. 08	Jumlah karya tulis yang diterbitkan			
	9. 09	Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677010/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



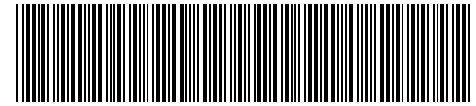
DS:1638-7641-7976-2081

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (677010) IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	5	:	6091.AEC	Kerja sama	1,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	19.361.000
Rincian Output		:	01	AEC.001 Kerjasama Dalam Negeri	1,00	Kesepakatan	19.361.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6091.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	17.829.000
Rincian Output		:	01	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	17.829.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6091.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	53,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	104.054.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	53,00	Orang	104.054.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	6091.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	56.444.000
Rincian Output		:	01	EBD.001 Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	1,00	Laporan	56.444.000
Kegiatan		:	6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN			848.288.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi			
		:	2. 02	Persentase Lulusan D.IV dengan Predikat Cumlaude			
		:	3. 03	Persentase Lulusan Program S-2 Dengan Predikat Cumlaude			
		:	4. 04	Persentase Lulusan Program S-3 Dengan Predikat Cumlaude			
		:	5. 05	Jumlah Publikasi Hasil Penelitian IPDN Dalam Jurnal Nasional/Internasional Terakreditasi Dan Bereputasi			
		:	6. 06	Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang Diimplementasikan Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Daerah			
		:	7. 07	Jumlah Kader Pamong Praja Muda (PPM)			
		:	8. 08	Jumlah Prestasi Ekstrakurikuler Praja Pada Tingkat Nasional			
		:	9. 09	Persentase Lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677010/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1638-7641-7976-2081

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (677010) IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	9	:	6092.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	73,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	848.288.000	
Rincian Output		:	01	EBC.968	Layanan Pendidikan Kedinasan	73,00	Orang	848.288.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

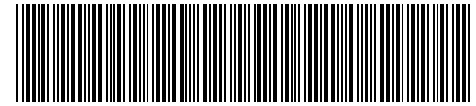
ttd.
Toms Tohir
69010187

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.01.2.677010/2025

I B. SUMBER DANA



DS:1638-7641-7976-2081

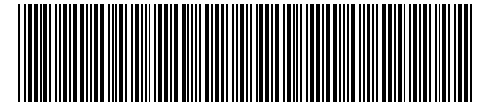
Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
 Kode>Nama Satker : (677010) IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA

				Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	25.698.341.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	25.698.341.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677010/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1638-7641-7976-2081

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (677010) IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA	9.740.704	15.957.637	-	-	-	25.698.341		
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	9.740.704	15.957.637	-	-	-	25.698.341		
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	9.740.704	14.899.203	-	-	-	24.639.907		
6089.AEA	Koordinasi (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	165.664	-	-	-	165.664	17.51	
01	RM	-	165.664	-	-	-	165.664	049	
6089.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	9.740.704	14.619.529	-	-	-	24.360.233	17.51	
01	RM	9.740.704	14.619.529	-	-	-	24.360.233	049	
6089.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	114.010	-	-	-	114.010	17.51	
01	RM	-	114.010	-	-	-	114.010	049	
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	-	12.458	-	-	-	12.458		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677010/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



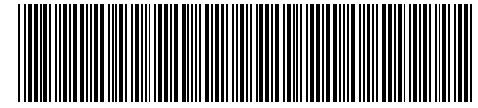
DS:1638-7641-7976-2081

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (677010) IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	12.458	-	-	-	12.458	17.51	
01	RM	-	12.458	-	-	-	12.458	049	
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	-	197.688	-	-	-	197.688		
6091.AEC	Kerja sama (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	19.361	-	-	-	19.361	17.51	
01	RM	-	19.361	-	-	-	19.361	049	
6091.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	17.829	-	-	-	17.829	17.51	
01	RM	-	17.829	-	-	-	17.829	049	
6091.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	104.054	-	-	-	104.054	17.51	
01	RM	-	104.054	-	-	-	104.054	049	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677010/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1638-7641-7976-2081

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (677010) IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA
Kewenangan : (KD)

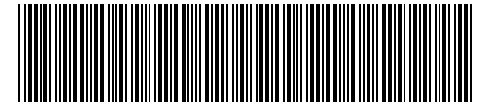
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6091.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	56.444	-	-	-	56.444	17 . 51	
01 RM		-	56.444	-	-	-	56.444	049	
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	-	848.288	-	-	-	848.288		
6092.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (17.51 SULAWESI UTARA / KOTA MANADO)	-	848.288	-	-	-	848.288	17 . 51	
01 RM		-	848.288	-	-	-	848.288	049	
JUMLAH		9.740.704	15.957.637	-	-	-	25.698.341		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677010/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1638-7641-7976-2081

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (17) SULAWESI UTARA
Kode>Nama Satker : (677010) IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA

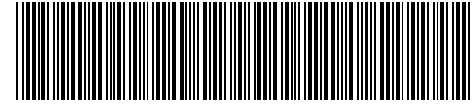
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	677010	IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	694.484	2.144.629	2.046.995	1.190.432	1.138.380	1.630.388	1.578.291	1.822.835	1.925.424	3.244.507	3.710.039	4.571.937	25.698.341
		BELANJA PEGAWAI	484.304	597.364	1.223.696	633.002	571.635	1.170.920	583.106	608.503	943.805	971.242	897.514	1.055.612	9.740.704
		BELANJA BARANG	210.180	1.547.264	823.299	557.430	566.744	459.468	995.185	1.214.332	981.619	2.273.266	2.812.525	3.516.325	15.957.637
	010.01.WA.6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	694.484	2.128.054	2.046.995	1.179.746	1.136.251	1.617.444	1.541.493	1.785.757	1.919.611	2.886.271	3.374.185	4.329.615	24.639.907
		51 BELANJA PEGAWAI	484.304	597.364	1.223.696	633.002	571.635	1.170.920	583.106	608.503	943.805	971.242	897.514	1.055.612	9.740.704
	010.01.WA.6090	52 BELANJA BARANG DAN JASA	210.180	1.530.689	823.299	546.743	564.616	446.524	958.387	1.177.254	975.806	1.915.029	2.476.671	3.274.003	14.899.203
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	12.229	0	12.458
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	12.229	0	12.458
	010.01.WA.6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	0	16.575	0	0	0	0	1.707	2.214	831	89.109	55.648	31.603	197.688
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	16.575	0	0	0	0	1.707	2.214	831	89.109	55.648	31.603	197.688
	010.01.WA.6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	0	0	0	10.686	2.128	12.715	35.091	34.864	4.982	269.128	267.976	210.718	848.288
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	10.686	2.128	12.715	35.091	34.864	4.982	269.128	267.976	210.718	848.288

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677010/2025
IV A. B L O K I R**



DS:1638-7641-7976-2081

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [677010] IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA

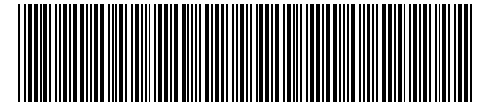
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Tomsu Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677010/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:1638-7641-7976-2081

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [17] SULAWESI UTARA
Kode dan Nama Satker : [677010] IPDN KAMPUS SULAWESI UTARA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

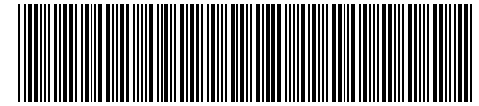
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Tomsu Tohir
69010187



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.01.2.677045/2025**



DS:4863-2484-4390-9000

Revisi ke 15

Tanggal : 08 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 2. Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
 3. Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
 4. Kode>Nama Satker : (677045) IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT
- Sebesar : Rp. 24.124.588.000 (DUA PULUH EMPAT MILIAR SERATUS DUA PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.03 PELAYANAN UMUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	24.124.588.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BUKITTINGGI (011) Rp. 24.124.588.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677045/2025



DS:4863-2484-4390-9000

Satker : (677045) IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	24.124.588.000
WA.6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	Rp.	23.267.012.000
WA.6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	Rp.	3.575.000
WA.6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	Rp.	198.599.000
WA.6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	Rp.	655.402.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677045/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4863-2484-4390-9000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (677045) IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	010.01.WA	Program Dukungan Manajemen			24.124.588.000
Kegiatan	:	6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN			23.267.012.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran			
		2. 02	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan			
		3. 03	Hasil penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPDN			
		4. 04	Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu			
		5. 05	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan praja			
		6. 06	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu			
		7. 07	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan			
		8. 08	Persentase penyelesaian hasil-hasil pemeriksaan dan tindaklanjut LHP			
		9. 09	Persentase penyelesaian administrasi data pokok praja			
		10. 10	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Unit Kerja Esselon II Lingkup IPDN			
		11. 11	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada IPDN Kampus Daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6089.AEA	Koordinasi	4,00	kegiatan	140.861.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup IPDN	4,00	kegiatan	140.861.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6089.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	22.359.885.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	145.284.000
		02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	22.214.601.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6089.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6,00	Unit, m2, Paket	681.660.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	5,00	Unit	421.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677045/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4863-2484-4390-9000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (677045) IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT

Halaman : I A. 2

		Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit, m2, Paket	
	02	EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.00	Unit
					260.660.000
Klasifikasi Rincian Output	4	6089.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1.00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi
					84.606.000
Rincian Output	:	01	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00
					Dokumen
					84.606.000
Kegiatan	:	6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN		3.575.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat lingkup IPDN yang ditindaklanjuti		
		2. 02	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup IPDN		
		3. 03	Persentase Aplikasi Yang Terintegrasi Pada Portal Utama IPDN Dalam Mendukung Penerapan Smart Campus		
Klasifikasi Rincian Output	5	6090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
					3.575.000
Rincian Output	:	01	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.00
					Layanan
					3.575.000
Kegiatan	:	6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN		198.599.000
	:	1. 01	Jumlah kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ditindaklanjuti		
		2. 02	Akreditasi Institusi Baik Sekali		
		3. 03	Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah Baik Sekali		
		4. 04	Jumlah tenaga Kependidikan yang telah tersertifikasi		
		5. 05	Persentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala		
		6. 06	Persentase Dosen Dengan Jabatan Guru Besar		
		7. 07	Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi		
		8. 08	Jumlah karya tulis yang diterbitkan		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677045/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4863-2484-4390-9000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (677045) IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT

Halaman : I A. 3

Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN

9. 09 Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni

Klasifikasi Rincian Output	6	:	6091.AEC	Kerja sama	1,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	200.000	
Rincian Output	: 01	:	AEC.001	Kerjasama Dalam Negeri	1,00	Kesepakatan	200.000	
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6091.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.087.000	
Rincian Output	: 01	:	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	2.087.000	
Klasifikasi Rincian Output	8	:	6091.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	73,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	170.373.000	
Rincian Output	: 01	:	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	73,00	Orang	170.373.000	
Klasifikasi Rincian Output	9	:	6091.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	25.939.000	
Rincian Output	: 01	:	EBD.001	Layanan Monitoring Program Kegiatan dan Anggaran Pendidikan IPDN	1,00	Laporan	25.939.000	
Kegiatan	: 6092	:	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN					655.402.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	:	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi					
	2. 02	:	Persentase Lulusan D.IV dengan Predikat Cumlaude					
	3. 03	:	Persentase Lulusan Program S-2 Dengan Predikat Cumlaude					
	4. 04	:	Persentase Lulusan Program S-3 Dengan Predikat Cumlaude					
	5. 05	:	Jumlah Publikasi Hasil Penelitian IPDN Dalam Jurnal Nasional/Internasional Terakreditasi Dan Bereputasi					
	6. 06	:	Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang Diimplementasikan Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Daerah					
	7. 07	:	Jumlah Kader Pamong Praja Muda (PPM)					

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677045/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4863-2484-4390-9000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (677045) IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT

Halaman : I A. 4

Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN

- 8. 08 Jumlah Prestasi Ekstrakurikuler Praja Pada Tingkat Nasional
- 9. 09 Persentase Lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan

Klasifikasi Rincian Output	10	:	6092.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	142,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	655.402.000
Rincian Output		:	01 EBC.968	Layanan Pendidikan Kedinasan	142,00	Orang	655.402.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677045/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4863-2484-4390-9000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (677045) IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT	9.807.811	13.635.117	681.660	-	-	24.124.588		
010.01.WA	Program Dukungan Manajemen	9.807.811	13.635.117	681.660	-	-	24.124.588		
6089	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	9.807.811	12.777.541	681.660	-	-	23.267.012		
6089.AEA	Koordinasi (08.51 SUMATERA BARAT / KOTA BUKITTINGGI)	-	140.861	-	-	-	140.861	08.51	
01	RM	-	140.861	-	-	-	140.861	011	
6089.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (08.51 SUMATERA BARAT / KOTA BUKITTINGGI)	9.807.811	12.552.074	-	-	-	22.359.885	08.51	
01	RM	9.807.811	12.552.074	-	-	-	22.359.885	011	
6089.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (08.51 SUMATERA BARAT / KOTA BUKITTINGGI)	-	-	681.660	-	-	681.660	08.51	
01	RM	-	-	681.660	-	-	681.660	011	
6089.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (08.51 SUMATERA BARAT / KOTA BUKITTINGGI)	-	84.606	-	-	-	84.606	08.51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677045/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4863-2484-4390-9000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (677045) IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	84.606	-	-	-	84.606	011	
6090	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	-	3.575	-	-	-	3.575		
6090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (08.51 SUMATERA BARAT / KOTA BUKITTINGGI)	-	3.575	-	-	-	3.575	08 . 51	
01 RM		-	3.575	-	-	-	3.575	011	
6091	Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	-	198.599	-	-	-	198.599		
6091.AEC	Kerja sama (08.51 SUMATERA BARAT / KOTA BUKITTINGGI)	-	200	-	-	-	200	08 . 51	
01 RM		-	200	-	-	-	200	011	
6091.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (08.51 SUMATERA BARAT / KOTA BUKITTINGGI)	-	2.087	-	-	-	2.087	08 . 51	
01 RM		-	2.087	-	-	-	2.087	011	
6091.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (08.51 SUMATERA BARAT / KOTA BUKITTINGGI)	-	170.373	-	-	-	170.373	08 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677045/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4863-2484-4390-9000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (677045) IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	170.373	-	-	-	170.373	011	
6091.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (08.51 SUMATERA BARAT / KOTA BUKITTINGGI)	-	25.939	-	-	-	25.939	08 . 51	
01 RM		-	25.939	-	-	-	25.939	011	
6092	Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	-	655.402	-	-	-	655.402		
6092.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (08.51 SUMATERA BARAT / KOTA BUKITTINGGI)	-	655.402	-	-	-	655.402	08 . 51	
01 RM		-	655.402	-	-	-	655.402	011	
JUMLAH		9.807.811	13.635.117	681.660	-	-	24.124.588		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677045/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4863-2484-4390-9000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (01) Sekretariat Jenderal
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (677045) IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	677045	IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	326.877	1.763.949	2.201.448	1.496.563	1.180.131	1.921.227	1.280.178	1.485.890	2.407.083	2.912.180	3.550.223	3.598.840	24.124.588
		BELANJA PEGAWAI	326.877	634.918	1.391.212	640.324	631.675	1.301.470	632.868	707.598	773.527	887.537	944.974	934.830	9.807.811
		BELANJA BARANG	0	1.090.125	810.236	856.239	548.456	619.757	647.310	778.293	1.633.555	1.744.884	2.482.668	2.423.595	13.635.117
		BELANJA MODAL	0	38.906	0	0	0	0	0	0	0	279.758	122.581	240.415	681.660
010.01.WA.6089		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum IPDN	326.877	1.751.228	2.186.548	1.471.703	1.168.531	1.921.227	1.255.498	1.476.750	2.397.517	2.580.020	3.305.632	3.425.481	23.267.012
		51 BELANJA PEGAWAI	326.877	634.918	1.391.212	640.324	631.675	1.301.470	632.868	707.598	773.527	887.537	944.974	934.830	9.807.811
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	1.077.404	795.336	831.379	536.856	619.757	622.630	769.153	1.623.989	1.412.724	2.238.077	2.250.236	12.777.541
		53 BELANJA MODAL	0	38.906	0	0	0	0	0	0	0	279.758	122.581	240.415	681.660
010.01.WA.6090		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik IPDN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.575	0	3.575
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.575	0	3.575
010.01.WA.6091		Pengelolaan Organisasi dan SDM IPDN	0	1.550	0	0	0	0	0	0	0	164.621	10.429	21.999	198.599
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	1.550	0	0	0	0	0	0	0	164.621	10.429	21.999	198.599
010.01.WA.6092		Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan IPDN	0	11.171	14.900	24.860	11.600	0	24.680	9.140	9.566	167.539	230.587	151.359	655.402
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	11.171	14.900	24.860	11.600	0	24.680	9.140	9.566	167.539	230.587	151.359	655.402

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677045/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4863-2484-4390-9000

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [677045] IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Tomsu Tohir
69010187

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.01.2.677045/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:4863-2484-4390-9000

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [01] Sekretariat Jenderal
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [677045] IPDN KAMPUS SUMATERA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

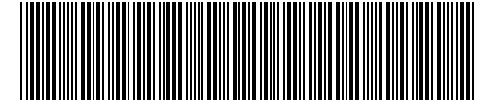
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal

ttd.
Toms Tohir
69010187



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.02.1.027203/2025**



DS:3018-1304-9746-3615

Revisi ke 45

Tanggal : 23 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Unit Organisasi : (02) Inspektorat Jenderal
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (027203) INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT
- Sebesar : Rp. 74.902.301.000 (TUJUH PULUH EMPAT MILIAR SEMBILAN RATUS DUA JUTA TIGA RATUS SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.03 PELAYANAN UMUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	74.902.301.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 74.902.301.000

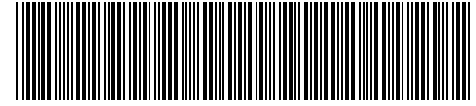
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.02.1.027203/2025

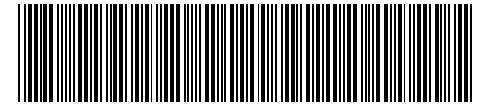


DS:3018-1304-9746-3615

Satker : (027203) INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT

WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	74.902.301.000
WA.6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	Rp.	122.697.000
WA.6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	Rp.	61.321.688.000
WA.6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	Rp.	267.573.000
WA.6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	Rp.	1.001.677.000
WA.6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	Rp.	826.296.000
WA.6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	Rp.	11.362.370.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.02.1.027203/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3018-1304-9746-3615

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (02) Inspektorat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027203) INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT

Halaman : I A. 1

Program	:	010.02.WA	Program Dukungan Manajemen			74.902.301.000
Kegiatan	:	6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah			122.697.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang Disusun			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6093.AAG	Peraturan Menteri	1,00	PerMen, Perka, RPermen	122.697.000
Rincian Output	:	01 AAG.001	Peraturan Menteri terkait Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1,00	PerMen	122.697.000
Kegiatan	:	6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah			61.321.688.000
	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Layanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langganan Daya dan Jasa) Tepat Waktu			
	:	2. 02	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran			
	:	3. 03	Persentase Penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan, akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang Tepat Waktu			
	:	4. 04	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Jenderal			
	:	5. 05	Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Itjen			
	:	6. 06	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6094.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	60.416.283.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	327.101.000
	:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	2,00	Layanan	60.089.182.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6094.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket	253.968.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	1,00	Paket	253.968.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.02.1.027203/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3018-1304-9746-3615

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (02) Inspektorat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027203) INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	4	:	6094.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	651.437.000
Rincian Output		:	01	EBD.001 Layanan Penyusunan Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal (SBKU)	1,00	Dokumen	3.941.000
		:	02	EBD.002 Layanan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satker Eselon I tanpa satker vertikal (SBKU)	1,00	Dokumen	20.421.000
		:	03	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	27.216.000
		:	04	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	147.479.000
		:	05	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	452.380.000
Kegiatan		:	6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah			267.573.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi publik pada Inspektorat Jenderal			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6095.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	267.573.000
Rincian Output		:	01	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,00	Layanan	229.612.000
		:	02	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	37.961.000
Kegiatan		:	6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah			1.001.677.000
		:	1. 01	Persentase Penyelesaian Kerja Sama pada Inspektorat daerah			
		:	2. 01	Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri			
		:	3. 02	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Inspektorat Jenderal			
		:	4. 03	Nilai Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Jenderal			
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6096.AEC	Kerja sama	3,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	240.898.000
Rincian Output		:	01	AEC.001 LAYANAN FASILITASI KOORDINASI DAN KERJASAMA PENGAWASAN	3,00	Dokumen	240.898.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.02.1.027203/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3018-1304-9746-3615

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (02) Inspektorat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027203) INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	7	:	6096.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit Layanan	240.788.000
Rincian Output		:	01 EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00		240.788.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	6096.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	317,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	519.991.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	317.00	Orang	519.991.000
Kegiatan		:	6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD			826.296.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional			
Klasifikasi Rincian Output	9	:	6097.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	350,00	Orang	505.641.000
Rincian Output		:	01 ADG.001	STANDARISASI HASIL KERJA PPUPD INSPEKTORAT	350.00	Orang	505.641.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	6097.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	35,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	320.655.000
Rincian Output		:	01 FAC.001	Penguatan Kapasitas PPUPD	35.00	Orang	320.655.000
Kegiatan		:	6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus			11.362.370.000
		:	1. 01	Indeks Pengawasan Umum			
		:	2. 01	Opini Laporan Keuangan			
		:	3. 02	Indeks Pengawasan Teknis			
		:	4. 02	Nilai Reviu PIPK			
		:	5. 03	Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah			
		:	6. 03	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			
		:	7. 04	Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan Teknis Inspektorat Jenderal			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.02.1.027203/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3018-1304-9746-3615

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (02) Inspektorat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027203) INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT

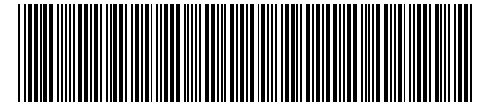
Halaman : I A. 4

Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus

8. 04	Nilai Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri
9. 05	Jumlah Daerah yang telah terbangun Konektivitas Sistem Informasi Pengawasan dengan Pemerintah Daerah
10. 05	Persentase Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
11. 06	Nilai Pelaksanaan MCP pada Pemerintah Daerah
12. 06	Persentase Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan BMN
13. 07	Nilai Maturitas SPIP
14. 08	Nilai Kapabilitas APIP
15. 09	Nilai Reformasi Birokrasi Kemendagri
16. 10	Persentase tingkat Penyelesaian TLHP
17. 11	Persentase Permintaan Pengawasan yang direspon minimal 7 hari kerja
18. 12	Persentase Efektifitas Pendampingan dan Konsultasi
19. 13	Indeks Pembangunan Integritas
20. 14	Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus
21. 15	Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP

Klasifikasi Rincian Output	11	:	6098.BIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah	84,00	Pemerintah Daerah	7.119.578.000
Rincian Output		:	01	BIE.001	38,00	Pemerintah Daerah	5.589.608.000
			02	BIE.005	8,00	Pemerintah Daerah	1.285.650.000
			03	BIE.009	38,00	Pemerintah Daerah	244.320.000
Klasifikasi Rincian Output	12	:	6098.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	17,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.980.973.000
Rincian Output		:	01	EBD.005	1,00	Dokumen	1.374.834.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.02.1.027203/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3018-1304-9746-3615

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (02) Inspektorat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027203) INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT

Halaman : I A. 5

Layanan Manajemen Kinerja Internal

					Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi Dokumen	
02	EBD.009	PENANGANAN PEMERIKSAAN KHUSUS KEMENDAGRI DAN BNPP		2.00		245.397.000
03	EBD.011	Audit Kinerja Inspektorat Jenderal		1.00	Laporan	678.000
04	EBD.012	Audit Kinerja Sekretariat Jenderal		1.00	Laporan	22.680.000
05	EBD.013	Audit Kinerja DKPP		1.00	Laporan	21.384.000
06	EBD.014	Audit Kinerja IPDN		1.00	Laporan	86.370.000
07	EBD.015	Audit Kinerja Audit Kinerja BPSDM		1.00	Laporan	22.680.000
08	EBD.016	Audit Kinerja Ditjen OTDA		1.00	Laporan	23.300.000
09	EBD.017	Audit Kinerja BSKDN		1.00	Laporan	22.680.000
10	EBD.018	Audit Kinerja BNPP		1.00	Laporan	23.800.000
11	EBD.019	Audit Kinerja Ditjen Bina PEMDES		1.00	Laporan	24.360.000
12	EBD.020	Audit Kinerja Ditjen Bina KEUDA		1.00	Laporan	22.800.000
13	EBD.021	Audit Kinerja Ditjen Bina BANGDA		1.00	Laporan	23.160.000
14	EBD.022	Audit Kinerja Ditjen DUKCAPIL		1.00	Laporan	24.360.000
15	EBD.023	Audit Kinerja Ditjen Bina ADWIL		1.00	Laporan	24.360.000
16	EBD.024	Audit Kinerja Ditjen Bina POLPUM		1.00	Laporan	18.130.000

Klasifikasi Rincian Output 13 : 6098.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan 1,00 Laporan, Rekomendasi 60.525.000

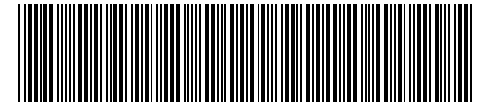
Rincian Output : 01 FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan 1,00 Laporan 60.525.000

Klasifikasi Rincian Output 14 : 6098.FAI Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan 39,00 Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja 233.417.000

Rincian Output : 01 FAI.001 PENINGKATAN KAPASITAS INSPEKTORAT DAERAH 38,00 Pemda 2.460.000

02 FAI.005 Pembangunan Integritas Lingkup Kemendagri dan Pemda 1,00 Lembaga 230.957.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.02.1.027203/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3018-1304-9746-3615

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (02) Inspektorat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027203) INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT

Halaman : I A. 6

Klasifikasi Rincian Output	15	:	6098.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	76,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	1.967.877.000	
Rincian Output		:	01	FBA.001	COORDINASI PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	537.306.000
		:	02	FBA.002	Pengawasan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Daerah	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.430.571.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Inspektur Jenderal

ttd.
SANG MADE MAHENDRA JAYA
NIP. 196607032025221001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.02.1.027203/2025

I B. SUMBER DANA



DS:3018-1304-9746-3615

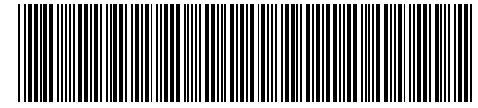
Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (02) Inspektorat Jenderal
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (027203) INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	74.902.301.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	74.902.301.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.02.1.027203/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



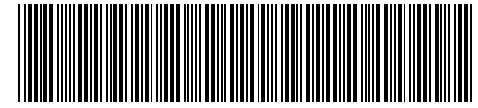
DS:3018-1304-9746-3615

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (02) Inspektorat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027203) INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT	47.723.663	26.924.670	253.968	-	-	74.902.301		
010.02.WA	Program Dukungan Manajemen	47.723.663	26.924.670	253.968	-	-	74.902.301		
6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	-	122.697	-	-	-	122.697		
6093.AAG	Peraturan Menteri (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	122.697	-	-	-	122.697	01 . 51	
01	RM	-	122.697	-	-	-	122.697	133	
6094	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	47.723.663	13.344.057	253.968	-	-	61.321.688		
6094.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	47.723.663	12.692.620	-	-	-	60.416.283	01 . 51	
01	RM	47.723.663	12.692.620	-	-	-	60.416.283	133	
6094.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	253.968	-	-	253.968	01 . 51	
01	RM	-	-	253.968	-	-	253.968	133	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.02.1.027203/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3018-1304-9746-3615

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (02) Inspektorat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027203) INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6094.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	651.437	-	-	-	651.437	01 . 51	
01 RM		-	651.437	-	-	-	651.437	133	
6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	-	267.573	-	-	-	267.573		
6095.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	267.573	-	-	-	267.573	01 . 51	
01 RM		-	267.573	-	-	-	267.573	133	
6096	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	-	1.001.677	-	-	-	1.001.677		
6096.AEC	Kerja sama (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	240.898	-	-	-	240.898	01 . 51	
01 RM		-	240.898	-	-	-	240.898	133	
6096.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	240.788	-	-	-	240.788	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.02.1.027203/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3018-1304-9746-3615

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (02) Inspektorat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027203) INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	240.788	-	-	-	240.788	133	
6096.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	519.991	-	-	-	519.991	01 . 51	
01 RM		-	519.991	-	-	-	519.991	133	
6097	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional P2UPD	-	826.296	-	-	-	826.296		
6097.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	505.641	-	-	-	505.641	01 . 51	
01 RM		-	505.641	-	-	-	505.641	133	
6097.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	320.655	-	-	-	320.655	01 . 51	
01 RM		-	320.655	-	-	-	320.655	133	
6098	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	-	11.362.370	-	-	-	11.362.370		
6098.BIE	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	7.119.578	-	-	-	7.119.578	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.02.1.027203/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3018-1304-9746-3615

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (02) Inspektorat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027203) INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT
Kewenangan : (KP)

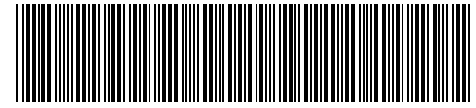
Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	7.119.578	-	-	-	7.119.578	133	
6098.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.980.973	-	-	-	1.980.973	01 . 51	
01 RM		-	1.980.973	-	-	-	1.980.973	133	
6098.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	60.525	-	-	-	60.525	01 . 51	
01 RM		-	60.525	-	-	-	60.525	133	
6098.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	233.417	-	-	-	233.417	01 . 51	
01 RM		-	233.417	-	-	-	233.417	133	
6098.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.967.877	-	-	-	1.967.877	01 . 51	
01 RM		-	1.967.877	-	-	-	1.967.877	133	
JUMLAH		47.723.663	26.924.670	253.968	-	-	74.902.301		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Inspektur Jenderal

ttd.
SANG MADE MAHENDRA JAYA
NIP. 196607032025221001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.02.1.027203/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3018-1304-9746-3615

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Unit Organisasi : (02) Inspektorat Jenderal

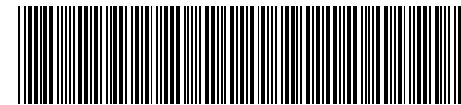
Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode>Nama Satker : (027203) INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	027203	INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	7.344.791	5.040.437	4.832.838	4.912.885	6.753.780	8.854.335	5.257.143	5.494.104	5.092.974	6.949.809	7.018.241	7.350.965	74.902.301
		BELANJA PEGAWAI	3.427.500	3.470.087	3.487.458	3.420.506	4.983.416	7.466.666	3.366.232	3.362.462	3.169.914	3.657.017	3.740.626	4.171.778	47.723.663
		BELANJA BARANG	3.872.180	1.520.988	1.296.018	1.449.395	1.751.071	1.368.377	1.886.362	2.121.297	1.913.641	3.288.541	3.277.614	3.179.187	26.924.670
		BELANJA MODAL	45.111	49.362	49.362	42.984	19.292	19.292	4.548	10.345	9.419	4.251	0	0	253.968
	010.02.WA.6093	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	0	0	2.538	13.838	13.841	14.389	14.389	12.829	11.466	11.544	8.764	19.097	122.697
	010.02.WA.6094	52 BELANJA BARANG DAN JASA Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	0	0	2.538	13.838	13.841	14.389	14.389	12.829	11.466	11.544	8.764	19.097	122.697
		51 BELANJA PEGAWAI	3.427.500	3.470.087	3.487.458	3.420.506	4.983.416	7.466.666	3.366.232	3.362.462	3.169.914	3.657.017	3.740.626	4.171.778	47.723.663
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.459.586	751.170	787.563	852.649	883.767	175.555	862.898	931.288	822.096	1.584.283	2.055.997	2.177.203	13.344.057
		53 BELANJA MODAL	45.111	49.362	49.362	42.984	19.292	19.292	4.548	10.345	9.419	4.251	0	0	253.968
	010.02.WA.6095	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	193.337	5.537	5.974	6.128	6.374	6.444	6.774	6.774	5.774	5.774	6.294	12.388	267.573
	010.02.WA.6096	52 BELANJA BARANG DAN JASA Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengawasan Internal dan Daerah	193.337	5.537	5.974	6.128	6.374	6.444	6.774	6.774	5.774	5.774	6.294	12.388	267.573
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	436.677	49.016	52.768	52.276	52.118	52.601	48.269	48.460	45.825	45.270	43.003	75.394	1.001.677
	010.02.WA.6097	52 BELANJA BARANG DAN JASA Pembinaan dan Pengembangan	436.677	49.016	52.768	52.276	52.118	52.601	48.269	48.460	45.825	45.270	43.003	75.394	1.001.677
		Pembinaan dan Pengembangan	238.181	69.248	55.881	45.385	44.112	46.476	45.140	44.110	40.824	56.046	42.903	97.991	826.296

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.02.1.027203/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3018-1304-9746-3615

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (02) Inspektorat Jenderal
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027203) INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT

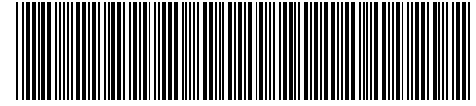
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Jabatan Fungsional P2UPD													
	010.02.WA.6098	52 BELANJA BARANG DAN JASA	238.181	69.248	55.881	45.385	44.112	46.476	45.140	44.110	40.824	56.046	42.903	97.991	826.296
		Pengelolaan Risiko, Pengendalian, Pengawasan Internal, Daerah, dan Khusus	1.544.399	646.016	391.293	479.118	750.859	1.072.911	908.892	1.077.836	987.656	1.585.624	1.120.654	797.113	11.362.370
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.544.399	646.016	391.293	479.118	750.859	1.072.911	908.892	1.077.836	987.656	1.585.624	1.120.654	797.113	11.362.370

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Inspektur Jenderal

ttd.
SANG MADE MAHENDRA JAYA
NIP. 196607032025221001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.02.1.027203/2025
IV A. B L O K I R**



DS:3018-1304-9746-3615

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [02] Inspektorat Jenderal
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027203] INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT

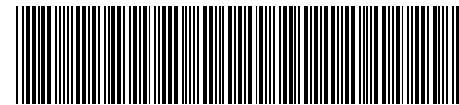
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Inspektur Jenderal

ttd.
SANG MADE MAHENDRA JAYA
NIP. 196607032025221001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.02.1.027203/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:3018-1304-9746-3615

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [02] Inspektorat Jenderal
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027203] INSPEKTORAT JENDERAL KANTOR PUSAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

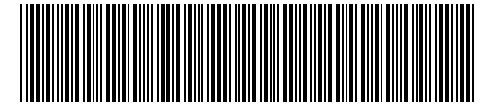
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Inspektur Jenderal

ttd.
SANG MADE MAHENDRA JAYA
NIP. 196607032025221001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.03.1.027210/2025**



DS:1905-7971-9026-5527

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 20

Tanggal : 12 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
- Sebesar : Rp. 228.816.877.000 (DUA RATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR DELAPAN RATUS ENAM BELAS JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	228.816.877.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 228.816.877.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025



DS:1905-7971-9026-5527

Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	228.816.877.000
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	Rp.	163.965.753.000
01.03	PELAYANAN UMUM	Rp.	64.851.124.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025

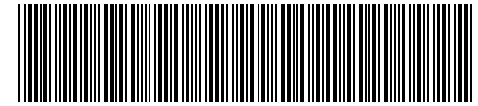


DS:1905-7971-9026-5527

Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	Rp.	163.965.753.000
CR.1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp.	11.476.628.000
CR.1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Rp.	6.000.000.000
CR.6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	146.489.125.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	64.851.124.000
WA.6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	Rp.	813.529.000
WA.6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	Rp.	61.875.171.000
WA.6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	Rp.	1.197.313.000
WA.6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	Rp.	965.111.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : I A. 1

Program	:	010.03.CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum			163.965.753.000
Kegiatan	:	1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya			11.476.628.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Kebijakan Bidang Politik			
		2. 02	Jumlah Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
		3. 03	Jumlah Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah (PN)			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1233.ABC	Kebijakan Bidang Politik	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	400.000.000
Rincian Output	:	01 ABC.001	Indeks Harmoni Indonesia	1.00	Kajian	400.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1233.FBA	Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	382,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, KabKota	7.308.164.000
Rincian Output	:	01 FBA.001	Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan pembahasan isu strategis Bidang Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Dalam Menjaga Keutuhan NKRI	20,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	496.662.000
		02 FBA.002	Komunikasi Sosial dan Pembahasan isu-isu strategis bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	613.887.000
		03 FBA.003	Fasilitas penanganan ketahanan ekonomi dan Kesenjangan Ekonomi	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	333.035.000
		04 FBA.004	Fasilitas Penguatan Seni dan Budaya Indonesia dalam rangka Ketahanan Identitas Bangsa	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	164.824.000
		05 FBA.005	Fasilitas Penguatan Nilai-Nilai Sejarah Dalam Menumbuhkan semangat Nasionalisme Dalam Rangka Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa	20,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	300.000.000
		06 FBA.006	Fasilitas Peningkatan Kesadaran Akan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Menjaga Keutuhan NKRI	20,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	276.860.000
		07 FBA.007	Pembinaan Kesadaran Bela Negara di Daerah dalam Menjaga Persatuan dan Keutuhan Bangsa.	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	466.751.000
		08 FBA.008	Penguatan Kinerja PPWK di daerah	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	200.000.000
		09 FBA.009	Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	12,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	300.000.000
		10 FBA.010	Kampanye Gerakan Menghalau Isu Hoax dan Isu SARA dalam rangka menjaga stabilitas politik dalam negeri, Trantibunlinmas	5,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	162.733.000
		11 FBA.011	Peningkatan Kesadaran Bela Negara melalui Kreatifitas Pemuda	15,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	297.499.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : I A. 2

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota

dalam menjaga Persatuan dan Keutuhan NKRI

12	FBA.012	Fasilitasi Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika dan Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	15.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	
13	FBA.013	Fasilitasi Penguatan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	20.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	288.750.000
14	FBA.014	Tim terpadu PKS daerah yang efektif	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	200.000.000
15	FBA.015	Workshop dan seminar wawasan kebangsaan di daerah otonomi baru	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.200.000.000
			4.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.007.163.000

Klasifikasi Rincian Output 3 : 1233.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat 500,00 Orang 500.000.000

Rincian Output : 01 QDC.001 Fasilitasi penguatan Nasionalisme Bagi Generasi Muda Dalam (PN) Menggelorakan Nilai Pancasila Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa 500,00 Orang 500.000.000

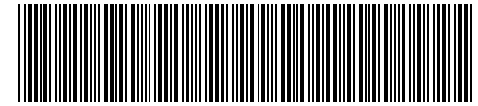
Klasifikasi Rincian Output 4 : 1233.UAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 180,00 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja 841.911.000

Rincian Output : 01 UAC.001 Fasilitasi Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam (PN) Menjaga Persatuan dan Kesatuan NKRI Bagi Aparatur 180,00 Orang 841.911.000

Klasifikasi Rincian Output 5 : 1233.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 81,00 Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota 2.426.553.000

Rincian Output : 01 UBA.001 Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan (PN) Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika. 38,00 Daerah (Prov/Kab/Kota) 1.000.000.000
02 UBA.002 Fasilitasi Pembinaan Kerukunan Antar dan Intra Suku , Umat (PN) Beragama, Penghayat Kepercayaan, Ras dan Golongan 5,00 Daerah (Prov/Kab/Kota) 1.000.000.000
03 UBA.003 Fasilitasi Penguatan Karakter dan Wawasan Kebangsaan dalam (PN) Membangun Harmoni Kebangsaan untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa 38,00 Daerah (Prov/Kab/Kota) 426.553.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



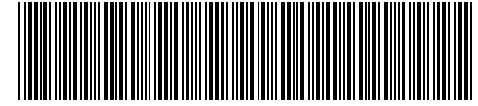
DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : I A. 3

Kegiatan	:	1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional						6.000.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Kebijakan Bidang Politik						
		2. 02	Jumlah layanan Perizinan Masyarakat						
		3. 03	Jumlah layanan perizinan lembaga						
		4. 04	Jumlah forum						
		5. 05	Jumlah laporan Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat						
		6. 06	Jumlah daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pemerintah						
		7. 07	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara						
		8. 08	Jumlah daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pemerintah (PN)						
Klasifikasi Rincian Output	6	:	1234.ABC	Kebijakan Bidang Politik		1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian		100.000.000
Rincian Output		:	01 ABC.001	Kebijakan / Regulasi Bidang Kewaspadaan Nasional		1,00	Rekomendasi Kebijakan		100.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	1234.ACB	Perizinan Masyarakat		300,00	Orang, Ketetapan		100.000.000
Rincian Output		:	01 ACB.001	Terlaksananya fasilitasi pelayanan dan perizinan penelitian orang asing dan lokal		300,00	Orang		100.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	1234.AEB	Forum		12,00	forum		1.870.822.000
Rincian Output		:	01 AEB.001	Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia		2,00	forum		36.421.000
		:	02 AEB.002	Komunikasi Sosial Bidang Kewaspadaan Nasional		10,00	forum		1.834.401.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	1234.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat		417,00	laporan		100.000.000
Rincian Output		:	01 BKA.001	Deteksi Dini		417,00	laporan		100.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	10	:	1234.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	1.829.178.000
Rincian Output		:	01 FBA.001	Fasilitasi kewaspadaan nasional	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.829.178.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	1234.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	200,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	2.000.000.000
Rincian Output		:	01 UAC.001	Kapasitas aparatur pusat dan daerah di bidang kewaspadaan dini dan deteksi dini	200.00	Orang	2.000.000.000
Kegiatan		:	6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan			146.489.125.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah Kebijakan Bidang Politik			
			2. 02	Jumlah Forum			
			3. 03	Sosialisasi dan Diseminasi			
			4. 04	Jumlah fasilitasi pembinaan kelompok masyarakat			
			5. 05	Jumlah Data dan Informasi Publik			
			6. 06	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi			
			7. 07	Jumlah daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pemerintah			
			8. 08	Jumlah Kebijakan Bidang Politik (PN)			
			9. 09	Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat dan aparatur			
			10. 10	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat PN			
			11. 11	Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan			
			12. 12	Jumlah daerah yang terfasilitasi Pembinaan Pemerintah Program PN Penguatan Demokrasi di daerah			
			13. 13	Jumlah asilitasi dan Pembinaan Lembaga			
			14. 14	Jumlah Bimbingan Teknis Tata Kelola Manajemen Pengurus Organisasi Kemasyarakatan			
			15. 15	Jumlah Fasilitasi Pendidikan Politik bagi kaum rentan, difabel dan kelompok marjinal			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



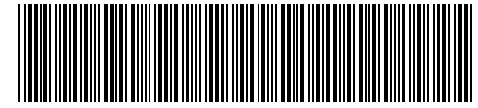
DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	12	:	6145.AEB	Forum	6,00	forum	2.432.718.000	
Rincian Output		:	01	AEB.001	Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah bidang organisasi kemasyarakatan	5,00	forum	1.950.000.000
		:	02	AEB.002	Forum Koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Bidang Politik Dalam Negeri	1,00	forum	482.718.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	6145.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	220,00	Kelompok Masyarakat	700.000.000	
Rincian Output		:	01	BDD.001	Pembinaan Kelompok Masyarakat	220,00	Kelompok Masyarakat	700.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	6145.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	11,00	Laporan, Rekomendasi	332.387.000	
Rincian Output		:	01	FAE.001	Fasilitasi dan Evaluasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	8,00	Laporan	92.387.000
		:	02	FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah Pasca Pilkada Serentak	3,00	Laporan	240.000.000
Klasifikasi Rincian Output	15	:	6145.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	116,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, KabKota	2.126.882.000	
Rincian Output		:	01	FBA.001	Kinerja daerah dalam pelayanan dan pengawasan ormas	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.150.000.000
		:	02	FBA.002	Indeks Kinerja Ormas	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	200.000.000
		:	03	FBA.003	Penguatan Demokrasi Bagi Masyarakat	2,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	297.549.000
		:	04	FBA.004	Peningkatan Kapasitas Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	479.333.000
Klasifikasi Rincian Output	16	:	6145.PBC	Kebijakan Bidang Politik	2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.707.550.000	
Rincian Output		:	01	PBC.001	Kebijakan Bidang Politik Dalam Negeri	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.707.550.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



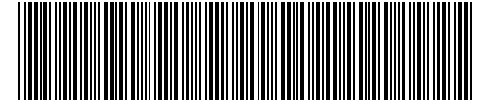
DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : I A. 6

Klasifikasi Rincian Output	17	:	6145.PEB	Forum		6,00	forum, DesaKelurahan, KabKota, TitikLokasi, Milyar, Dokumen, Kilo Liter	813.435.000
Rincian Output		:	01	PEB.001	Pengembangan Literasi Politik Masyarakat (PN)	6.00	forum	813.435.000
Klasifikasi Rincian Output	18	:	6145.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		8,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	261.352.000
Rincian Output		:	01	QDB.001	Fasilitasi Penguatan Tata Kelola Partai Politik	8.00	Lembaga	261.352.000
Klasifikasi Rincian Output	19	:	6145.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		2.400,00	Orang	2.600.000.000
Rincian Output		:	01	QDC.001	Pendidikan politik dan penguatan ideologi Pancasila bagi pengurus parpol (PN)	400.00	Orang	600.000.000
Rincian Output		:	02	QDC.002	Bimbingan Teknis Tata Kelola Manajemen Pengurus Organisasi Kemasyarakatan (PN)	2000.00	Orang	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	20	:	6145.QEI	Bantuan Lembaga		8,00	Lembaga	134.489.125.000
Rincian Output		:	01	QEI.001	Bantuan Keuangan ke Partai Politik	8.00	Lembaga	134.489.125.000
Klasifikasi Rincian Output	21	:	6145.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		38,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	1.025.676.000
Rincian Output		:	01	UBA.001	Fasilitasi penguatan demokrasi di daerah (PN)	19.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000.000
Rincian Output		:	02	UBA.002	Fasilitasi Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia Tingkat Provinsi (PN)	19.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	525.676.000
Program		:	010.03.WA	Program Dukungan Manajemen				64.851.124.000
Kegiatan		:	6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum				813.529.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Layanan Hukum dan Kepatuhan Internal				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



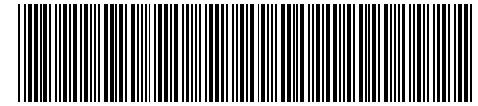
DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : I A. 7

Klasifikasi Rincian Output	1	:	6099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	813.529.000
Rincian Output		:	01 EBA.957	Layanan Hukum	1.00	Layanan	813.529.000
Kegiatan		:	6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum			61.875.171.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
			2. 02	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
			3. 03	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
			4. 04	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6100.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	55.565.773.000
Rincian Output		:	01 EBA.962	Layanan Umum	3.00	Layanan	2.489.084.000
			02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	53.076.689.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6100.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	178,00	Unit, m2, Paket	1.500.000.000
Rincian Output		:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	178.00	Unit	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6100.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.418.565.000
Rincian Output		:	01 EBD.001	Dokumen RKA Satker Eselon I tanpa satker vertikal (SBKU)	1.00	Dokumen	35.682.000
			02 EBD.002	Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	1.00	Dokumen	5.305.000
			03 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	1.398.250.000
			04 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	127.470.000
			05 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Layanan	851.858.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : I A. 8

Klasifikasi Rincian Output	5	:	6100.FBA	Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	2.390.833.000
Rincian Output		:	01 FBA.001	Pembinaan Teknis Politik dan Pemerintahan Umum	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.390.833.000
Kegiatan		:	6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum			1.197.313.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Layanan Data dan Informasi			
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6101.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.197.313.000
Rincian Output		:	01 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	1.197.313.000
Kegiatan		:	6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum			965.111.000
		:	1. 01	Layanan SDM			
		:	2. 02	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6102.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	610.711.000
Rincian Output		:	01 EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	610.711.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	6102.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	287,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	354.400.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	287.00	Orang	354.400.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum

ttd.
Dr. Drs. BAHTIAR, M.S.i
NIP 197301161993021002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025

I B. SUMBER DANA



DS:1905-7971-9026-5527

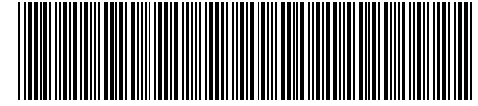
Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

						Pagu			Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	228.816.877.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	228.816.877.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



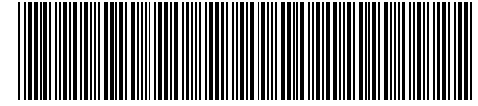
DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	41.208.168	186.108.709	1.500.000	-	-	228.816.877		
010.03.CR	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	-	163.965.753	-	-	-	163.965.753		
1233	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	-	11.476.628	-	-	-	11.476.628		
1233.ABC	Kebijakan Bidang Politik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	400.000	-	-	-	400.000	01 . 51	
01	RM	-	400.000	-	-	-	400.000	133@	
1233.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	7.308.164	-	-	-	7.308.164	01 . 51	
01	RM	-	7.308.164	-	-	-	7.308.164	133@	
1233.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 51	
01	RM	-	500.000	-	-	-	500.000	133@	
1233.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	841.911	-	-	-	841.911	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



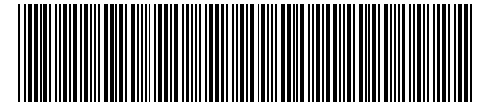
DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	841.911	-	-	-	841.911	133@	
1233.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.426.553	-	-	-	2.426.553	01 . 51	
01 RM		-	2.426.553	-	-	-	2.426.553	133@	
1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000		
1234.ABC	Kebijakan Bidang Politik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	100.000	-	-	-	100.000	01 . 51	
01 RM		-	100.000	-	-	-	100.000	133@	
1234.ACB	Perizinan Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	100.000	-	-	-	100.000	01 . 51	
01 RM		-	100.000	-	-	-	100.000	133@	
1234.AEB	Forum (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.870.822	-	-	-	1.870.822	01 . 51	
01 RM		-	1.870.822	-	-	-	1.870.822	133@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1234.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	100.000	-	-	-	100.000	01 . 51	
01	RM	-	100.000	-	-	-	100.000	133@	
1234.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.829.178	-	-	-	1.829.178	01 . 51	
01	RM	-	1.829.178	-	-	-	1.829.178	133@	
1234.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	01 . 51	
01	RM	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000	133@	
6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	-	146.489.125	-	-	-	146.489.125		
6145.AEB	Forum (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.432.718	-	-	-	2.432.718	01 . 51	
01	RM	-	2.432.718	-	-	-	2.432.718	133@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



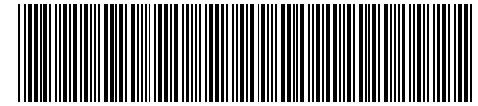
DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6145.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	700.000	-	-	-	700.000	01 . 51	
01	RM	-	700.000	-	-	-	700.000	133@	
6145.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	332.387	-	-	-	332.387	01 . 51	
01	RM	-	332.387	-	-	-	332.387	133@	
6145.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.126.882	-	-	-	2.126.882	01 . 51	
01	RM	-	2.126.882	-	-	-	2.126.882	133@	
6145.PBC	Kebijakan Bidang Politik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.707.550	-	-	-	1.707.550	01 . 51	
01	RM	-	1.707.550	-	-	-	1.707.550	133	
6145.PEB	Forum (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	813.435	-	-	-	813.435	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



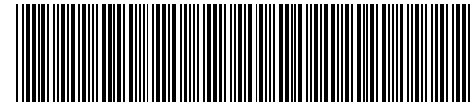
DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	813.435	-	-	-	813.435	133@	
6145.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	261.352	-	-	-	261.352	01 . 51	
01 RM		-	261.352	-	-	-	261.352	133@	
6145.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.600.000	-	-	-	2.600.000	01 . 51	
01 RM		-	2.600.000	-	-	-	2.600.000	133@	
6145.QEI	Bantuan Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	134.489.125	-	-	-	134.489.125	01 . 51	
01 RM		-	134.489.125	-	-	-	134.489.125	133	
6145.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.025.676	-	-	-	1.025.676	01 . 51	
01 RM		-	1.025.676	-	-	-	1.025.676	133@	
010.03.WA	Program Dukungan Manajemen	41.208.168	22.142.956	1.500.000	-	-	64.851.124		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



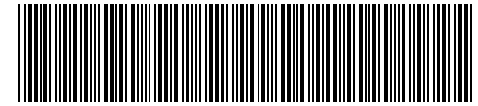
DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6099	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	-	813.529	-	-	-	813.529		
6099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	813.529	-	-	-	813.529	01 . 51	
01	RM	-	813.529	-	-	-	813.529	133	
6100	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	41.208.168	19.167.003	1.500.000	-	-	61.875.171		
6100.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	41.208.168	14.357.605	-	-	-	55.565.773	01 . 51	
01	RM	41.208.168	14.357.605	-	-	-	55.565.773	133	
6100.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	1.500.000	-	-	1.500.000	01 . 51	
01	RM	-	-	1.500.000	-	-	1.500.000	133	
6100.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.418.565	-	-	-	2.418.565	01 . 51	
01	RM	-	2.418.565	-	-	-	2.418.565	133	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



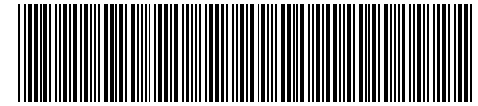
DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6100.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.390.833	-	-	-	2.390.833	01 . 51	
01 RM		-	2.390.833	-	-	-	2.390.833	133	
6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	-	1.197.313	-	-	-	1.197.313		
6101.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.197.313	-	-	-	1.197.313	01 . 51	
01 RM		-	1.197.313	-	-	-	1.197.313	133	
6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	-	965.111	-	-	-	965.111		
6102.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	610.711	-	-	-	610.711	01 . 51	
01 RM		-	610.711	-	-	-	610.711	133	
6102.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	354.400	-	-	-	354.400	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
Kewenangan : (KP)

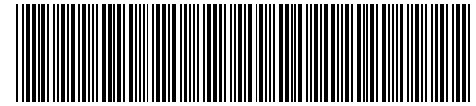
Halaman : II. 8
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	354.400	-	-	-	354.400	133	
JUMLAH		41.208.168	186.108.709	1.500.000	-	-	228.816.877		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum

ttd.
Dr. Drs. BAHTIAR, M.S.i
NIP 197301161993021002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



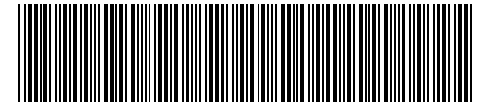
DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM													
		RENCANA PENARIKAN DANA	6.218.909	7.062.678	144.450.609	4.480.711	6.575.060	7.846.933	5.795.234	4.830.203	6.316.476	7.643.216	9.633.384	17.963.464	228.816.877
		BELANJA PEGAWAI	2.510.469	2.730.543	5.596.291	2.755.759	2.752.411	5.664.057	2.850.068	2.811.496	3.177.042	3.110.157	3.610.622	3.639.251	41.208.168
		BELANJA BARANG	3.708.440	4.311.495	138.552.029	1.686.894	3.156.452	2.120.892	2.738.186	1.968.707	3.089.434	4.429.206	6.022.762	14.324.213	186.108.709
		BELANJA MODAL	0	20.641	302.289	38.058	666.197	61.984	206.980	50.000	50.000	103.853	0	0	1.500.000
010.03.CR.1233		Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya	457.587	715.619	935.893	649.870	751.763	472.810	804.359	677.587	1.176.364	761.092	2.390.826	1.682.857	11.476.628
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	457.587	715.619	935.893	649.870	751.763	472.810	804.359	677.587	1.176.364	761.092	2.390.826	1.682.857	11.476.628
010.03.CR.1234		Peningkatan Kewaspadaan Nasional	306.092	306.092	203.048	238.729	281.955	600.000	540.723	282.333	606.606	350.045	457.238	1.827.140	6.000.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	306.092	306.092	203.048	238.729	281.955	600.000	540.723	282.333	606.606	350.045	457.238	1.827.140	6.000.000
010.03.CR.6145		Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Masyarakat	327.381	233.338	135.751.277	526.755	641.341	944.339	1.033.749	697.587	1.041.749	2.214.022	1.444.350	1.633.238	146.489.125
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	327.381	233.338	135.751.277	526.755	641.341	944.339	1.033.749	697.587	1.041.749	2.214.022	1.444.350	1.633.238	146.489.125
010.03.WA.6099		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	20.769	56.538	125.399	57.692	57.692	0	0	0	0	130.073	209.087	156.278	813.529
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	20.769	56.538	125.399	57.692	57.692	0	0	0	0	130.073	209.087	156.278	813.529
010.03.WA.6100		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	5.025.832	5.553.387	7.266.777	2.953.908	4.794.303	5.827.668	3.329.101	3.056.560	3.412.414	4.117.444	4.677.373	11.860.403	61.875.171
		51 BELANJA PEGAWAI	2.510.469	2.730.543	5.596.291	2.755.759	2.752.411	5.664.057	2.850.068	2.811.496	3.177.042	3.110.157	3.610.622	3.639.251	41.208.168
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	2.515.363	2.802.203	1.368.197	160.091	1.375.696	101.627	272.053	195.063	185.373	903.434	1.066.751	8.221.152	19.167.003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027210) DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		53 BELANJA MODAL	0	20.641	302.289	38.058	666.197	61.984	206.980	50.000	50.000	103.853	0	0	1.500.000
	010.03.WA.6101	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	47.893	131.044	122.528	0	0	0	0	40.674	0	0	378.173	477.001	1.197.313
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	47.893	131.044	122.528	0	0	0	0	40.674	0	0	378.173	477.001	1.197.313
	010.03.WA.6102	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Politik dan Pemerintahan Umum	33.356	66.660	45.687	53.757	48.006	2.118	87.301	75.463	79.341	70.541	76.336	326.545	965.111
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	33.356	66.660	45.687	53.757	48.006	2.118	87.301	75.463	79.341	70.541	76.336	326.545	965.111

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum

ttd.
Dr. Drs. BAHTIAR, M.S.i
NIP 197301161993021002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
IV A. B L O K I R**



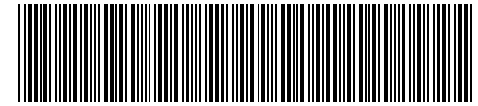
DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027210] DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
027210	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 11.692.212		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
010.03.CR 1233	52 Belanja Barang Rp. 11.692.212	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)	
1233.ABC	Penguatan Ketahanan Ideologi, Ekonomi, Sosial, dan Budaya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.900
	Kebijakan Bidang Politik	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	521211 Belanja Bahan(RM)	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 85.900
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)	
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.800	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 662.823
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.400	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.750
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 132.970		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 469.625
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
1233.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 477.869		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
IV A. B L O K I R**



DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027210] DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
1233.QDC	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 890.972 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	1233.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 173.396 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.675 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.190 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.850 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 86.400 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
1233.UAC	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 128.804 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 244.848 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.400 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.400 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41.549 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 944.392 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 364.306 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
IV A. B L O K I R**



DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027210] DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
1234	Peningkatan Kewaspadaan Nasional		
1234.ABC	Kebijakan Bidang Politik		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.100 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.000 A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.050 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.300 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
1234.ACB	Perizinan Masyarakat	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.395 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 142.600 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.881 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 694.955 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
1234.AEB	Forum	1234.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 62.641 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.056 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
IV A. B L O K I R**



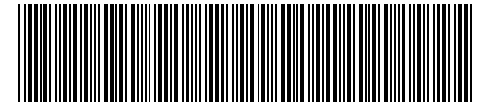
DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027210] DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
1234.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1234.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.215 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 256.930 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.000 A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6145	Pembinaan Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.800 A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6145.AEB	Forum
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 70.000 A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 79.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 117.671 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.850 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 479.991 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 453.719 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.900

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
IV A. B L O K I R**



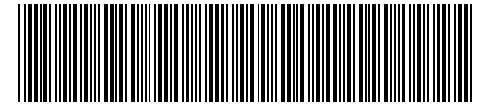
DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027210] DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6145.BDD	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6145.FAE	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 683.698		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.250
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 70.759		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.303
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.750
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.700	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 98.982		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	6145.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 132.235	521211 Belanja Bahan(RM)		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.590		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.225	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.800		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 209.901	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
IV A. B L O K I R**



DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027210] DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6145.PEB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.610 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6145.QDB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 226.395 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 68.227 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		6145.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 142.320 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 321.208 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Forum		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.750 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.400 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.400 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.627 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 185.968 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 66.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
IV A. B L O K I R**



DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027210] DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

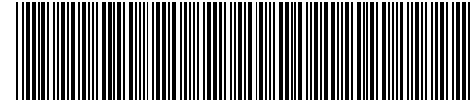
Halaman : IV.A. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6145.UBA	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.525 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 863.926 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.167 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.050 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 523.403 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum

ttd.
Dr. Drs. BAHTIAR, M.S.i
NIP 197301161993021002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.03.1.027210/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:1905-7971-9026-5527

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Politik Dan Pemerintahan Umum
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027210] DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

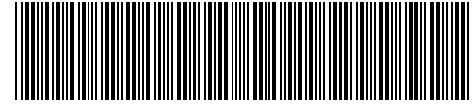
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Politik Dan Pemerintahan Umum

ttd.
Dr. Drs. BAHTIAR, M.S.i
NIP 197301161993021002



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.04.1.027486/2025**



DS:9970-9083-0297-8070

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 15

Tanggal : 18 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
- Sebesar : Rp. 215.385.561.000 (DUA RATUS LIMA BELAS MILIAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	215.385.561.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 215.385.561.000

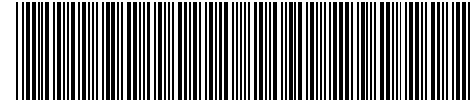
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025

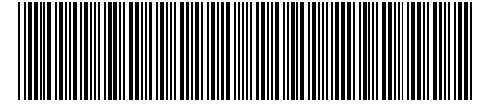


DS:9970-9083-0297-8070

Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	215.385.561.000
01.03	PELAYANAN UMUM	Rp.	64.432.937.000
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	118.646.337.000
01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA	Rp.	32.306.287.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025



DS:9970-9083-0297-8070

Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	150.952.624.000
CM.1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	Rp.	81.738.599.000
CM.1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	Rp.	32.306.287.000
CM.6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp.	36.907.738.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	64.432.937.000
WA.6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	Rp.	617.427.000
WA.6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	Rp.	62.282.696.000
WA.6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	Rp.	479.767.000
WA.6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	Rp.	1.053.047.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : I A. 1

Program	:	010.04.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	150.952.624.000
Kegiatan	:	1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	81.738.599.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Bencana berdasarkan Tipologi Daerah	
		2. 01	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan Model Ideal Kewenangan dan Kelembagaan GWPP	
		3. 02	Jumlah Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	
		4. 02	Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Kebakaran berdasarkan Tipologi Daerah	
		5. 03	Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Trantibum berdasarkan Tipologi Daerah	
		6. 03	Jumlah Penguatan Kerja Sama Pembangunan antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, antar budaya	
		7. 04	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sub Urusan Bencana di Daerah	
		8. 04	Jumlah Penyelesaian Perjanjian terkait segmen batas darat antar negara	
		9. 05	Jumlah Daerah yang menerapkan PTSP berbasis OSS	
		10. 05	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sub Urusan Kebakaran di Daerah	
		11. 06	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sub Urusan Trantibum di Daerah	
		12. 06	Jumlah daerah dengan kecamatan yang telah menyelenggarakan Penguatan Kelembagaan dan peran kecamatan dalam koordinasi vertikal dan horizontal di Daerah	
		13. 07	Jumlah Daerah yang Terfasilitasi Satpol PP Dalam mendukung Pemerintah Daerah Bidang Trantibumlinmas	
		14. 07	Jumlah daerah yang menyelenggarakan kerja sama daerah dalam penyediaan pelayanan publik	
		15. 08	Jumlah daerah Pilot Kerja Sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan	
		16. 09	Jumlah daerah yang dikuatkan SDM dan Kelembagaan DTMPSTSP nya untuk mendukung iklim investasi yang kondusif	
		17. 10	Jumlah Peraturan Menteri dalam Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1237.AAG	Peraturan Menteri	2,00 PerMen, Perka, RPermen 400.000.000
Rincian Output	:	01 AAG.001	Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat dan Evaluasi Kinerja Kecamatan	1.00 PerMen 200.000.000
		02 AAG.002	Peraturan Menteri tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	1.00 PerMen 200.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

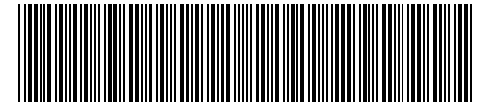
Halaman : I A. 2

Peraturan Menteri

PerMen, Perka, RPermen

Klasifikasi Rincian Output	2	:	1237.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	9.079.721.000
Rincian Output		:	01 FBA.002	Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	9.079.721.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1237.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.000.000.000
Rincian Output		:	01 PBL.001	Rekomendasi Pelaksanaan Model Ideal Kewenangan dan Kelembagaan GWPP	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1237.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	310,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, KabKota	71.258.878.000
Rincian Output		:	01 UBA.001	Daerah yang memiliki angka indeks GWPP berkategori sangat baik	17,00	Provinsi	63.958.878.000
		:	02 UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam penguatan peran kecamatan dalam koordinasi vertikal dan horizontal	80,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000.000
		:	03 UBA.003	Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam penyediaan pelayanan publik	10,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000
		:	04 UBA.004	Daerah yang diterapkan sebagai pilot kerja sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan	1,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.200.000.000
		:	05 UBA.005	Daerah yang menerapkan PTSP berbasis OSS	76,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.600.000.000
		:	06 UBA.006	Daerah yang dikuatkan SDM dan Kelembagaan DTMPPTSP nya untuk mendukung iklim investasi yang kondusif	50,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000
		:	07 UBA.007	Daerah yang ditingkatkan pelimpahan kewenangan perizinan kepada DPMPPTSP	76,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000
Kegiatan		:	1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi			32.306.287.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah Daerah yang Menerapkan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah			
		:	2. 01	Jumlah daerah yang menyelenggarakan kawasan khusus			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



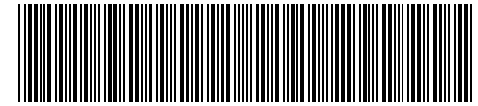
DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : I A. 3

	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi
3. 02	Jumlah daerah melakukan penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu di Wilayah Metropolitan
4. 02	Jumlah daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pasca bencana
5. 03	Jumlah daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan (pencegahan kebakaran, penanganan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, dan pemberdayaan masyarakat) se
6. 03	Jumlah kesepakatan Strategis di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan perundingan batas antar negara
7. 04	Jumlah daerah Daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
8. 04	Jumlah daerah yang dialokasikan bantuan sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan negara dan PPKT
9. 05	Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam penanganan masalah dan konflik pertanahan di daerah
10. 05	Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpras trantibumlinmas
11. 06	Jumlah daerah yang menyelenggarakan kerja sama daerah dalam penyediaan pelayanan publik
12. 07	Jumlah daerah yang dikuatkan tata kelola Smart City-nya di Wilayah Metropolitan
13. 08	Jumlah daerah dengan kecamatan yang telah menyelenggarakan Penguatan Kelembagaan dan peran kecamatan dalam koordinasi vertikal dan horizontal di Daerah
14. 09	Jumlah daerah Pilot Kerja Sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan
15. 10	Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Permendagri
16. 11	Jumlah K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi pemerintahan
17. 12	NSPK di Bidang Kawasan, Perkotaan, Batas Negara, Batas Wilayah, dan Toponimi
18. 13	Jumlah daerah yang dikuatkan SDM dan Kelembagaan DTMPSTSP nya untuk mendukung iklim investasi yang kondusif
19. 14	Jumlah Peraturan Pemerintah dalam Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Bidang Kawasan Khusus
20. 15	Jumlah Peraturan Menteri dalam Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
21. 16	Jumlah Kelembagaan Forum Pelaksana Kerjasama/Perundingan Bilateral Wilayah Perbatasan Negara yang dikelola dengan Optimal dan Efektif di bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Batas-Batas Negara
22. 17	Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam mendukung daerah mitra IKN
23. 18	Jumlah sistem informasi Bidang Administrasi Kewilayahan

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



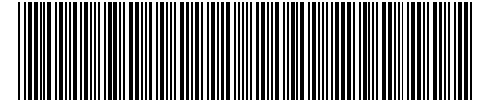
DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	5	:	1241.AAC	Peraturan Pemerintah	1,00	PP, RPP	260.000.000
Rincian Output		:	01 AAC.001	Peraturan Pemerintah Bidang Kawasan Khusus	1.00	PP	260.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	1241.AAG	Peraturan Menteri	2,00	PerMen, Perka, RPermen	400.000.000
Rincian Output		:	01 AAG.003	Peraturan Menteri Bidang Perkotaan	1.00	PerMen	200.000.000
		:	02 AAG.005	Peraturan Menteri Bidang Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas	1.00	PerMen	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	1241.AEC	Kerja sama	12,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	2.400.000.000
Rincian Output		:	01 AEC.001	K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi pemerintahan	12.00	Kesepakatan	2.400.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	1241.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	400.000.000
Rincian Output		:	01 AFA.001	NSPK di Bidang Kawasan, Perkotaan, Batas Negara, Batas Wilayah, dan Toponimi	2.00	NSPK	400.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	1241.BGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	5,00	Lembaga	500.000.000
Rincian Output		:	01 BGE.001	Kelembagaan Sekeriat Pengelolaan Forum Pelaksana Kerjasama/ Perundingan Bilateral Wilayah Perbatasan Negara	5.00	Lembaga	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	1241.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,00	Unit	15.800.000.000
Rincian Output		:	01 CAN.001	Optimalisasi Infrastruktur Dukungan Dashboard Spasial Ditjen Bina Adwil Sebagai Pendukung Layanan Kedaruratan	1.00	Unit	15.800.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	11	:	1241.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2,00	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	328.260.000
Rincian Output		:	01	FAB.001 Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Administrasi Kewilayahan Dalam Mendukung Satu Data Indonesia	2,00	Sistem Informasi	328.260.000
Klasifikasi Rincian Output	12	:	1241.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	37,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	3.336.287.000
Rincian Output		:	01	FBA.004 Penanganan Konflik Pertanahan	25,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000.000
		:	02	FBA.005 Fasilitasi Daerah Mitra Dengan Otorita IKN	4,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	700.000.000
		:	03	FBA.006 Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan kawasan khusus di daerah	8,00	Provinsi	1.136.287.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	1241.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	10,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.881.740.000
Rincian Output		:	01	PBL.001 Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian batas daerah	10,00	Rekomendasi Kebijakan	1.881.740.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	1241.PEC	Kerja sama	5,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	3.500.000.000
Rincian Output		:	01	PEC.001 Penguatan Kerja Sama Pembangunan antar negara di bidang politik, ekonomi, sosial, antar budaya (PN)	3,00	Kesepakatan	2.000.000.000
		:	02	PEC.002 Penyelesaian Perjanjian terkait segmen batas darat antar negara	2,00	Kesepakatan	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	15	:	1241.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	30,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	3.500.000.000
Rincian Output		:	01	UBA.001 Daerah yang melakukan penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu di Wilayah Metropolitan	10,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000
		:	02	UBA.002 Daerah yang dikuatkan tata kelola Smart City-nya di Wilayah Metropolitan	10,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000.000
		:	03	UBA.003 Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan	10,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



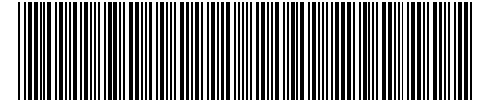
DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : I A. 6

Kegiatan	:	6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			36.907.738.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub Urusan Bencana			
		2. 02	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub urusan Kebakaran			
		3. 03	Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub urusan Trantibum			
Klasifikasi Rincian Output	16	:	6136.AAG Peraturan Menteri	3,00	PerMen, Perka, RPermen	500.000.000
Rincian Output	:	01	AAG.003 Peraturan Menteri tentang Pedoman Nomenklatur Satpol PP di Daerah	1,00	PerMen	150.000.000
		02	AAG.004 Peraturan Menteri tentang Sistem Informasi Pelaporan Satpol PP	1,00	PerMen	150.000.000
		03	AAG.005 Permendagri mengenai pakaian dinas lapangan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana	1,00	PerMen	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output	17	:	6136.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	600.000.000
Rincian Output	:	01	AFA.001 NSPK Urusan Trantibumlinmas	2,00	NSPK	600.000.000
Klasifikasi Rincian Output	18	:	6136.BEG Bantuan Peralatan / Sarana	30,00	Unit, Titik, Paket, SR	1.596.776.000
Rincian Output	:	01	BEG.001 Bantuan sarpras Tibumtranmas	30,00	Unit	1.596.776.000
Klasifikasi Rincian Output	19	:	6136.FAB Sistem Informasi Pemerintahan	1,00	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	100.000.000
Rincian Output	:	01	FAB.001 Sistem Informasi Pemerintahan Bidang Administrasi Kewilayahan Dalam Mendukung Satu Data Indonesia	1,00	Sistem Informasi	100.000.000
Klasifikasi Rincian Output	20	:	6136.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	190,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, KabKota	20.258.496.000
Rincian Output	:	01	FBA.001 Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB)	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.559.000.000
		02	FBA.002 Pembentukan Layanan Kedaruratan	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	13.949.496.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



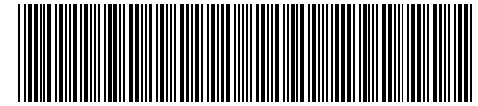
DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : I A. 7

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, KabKota		
	03	FBA.004	Fasilitasi Satpol PP Dalam mendukung Pemerintah Daerah Bidang Trantibumlinmas	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.600.000.000
	04	FBA.006	Daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	850.000.000
	05	FBA.007	Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	38.00	Provinsi	300.000.000
Klasifikasi Rincian Output	21	6136.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.714,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, KabKota	13.852.466.000
Rincian Output	01	UBA.001	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Bencana berdasarkan Tipologi Daerah (PN)	546.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.852.466.000
	02	UBA.002	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Kebakaran berdasarkan Tipologi Daerah (PN)	546.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.000.000.000
	03	UBA.003	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan Trantibumlinmas berdasarkan Tipologi Daerah	546.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.000.000.000
	04	UBA.004	Daerah yang menerapkan pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana (PN)	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000
	05	UBA.005	Daerah yang menerapkan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pasca bencana (PN)	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000
Program		010.04.WA	Program Dukungan Manajemen			64.432.937.000
Kegiatan		6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah			617.427.000
Indikator Kinerja Kegiatan		1. 01	Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun			
Klasifikasi Rincian Output	1	6103.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	617.427.000
Rincian Output	01	EBA.957	Layanan Hukum	1.00	Layanan	617.427.000
Kegiatan		6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah			62.282.696.000
		1. 01	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : I A. 8

Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah

- 2. 02 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Tindak Lanjut LHP
- 3. 03 Persentase Penyelesaian verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- 4. 04 Hasil Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
- 5. 05 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan
- 6. 06 Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- 7. 07 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat Waktu
- 8. 08 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan

Klasifikasi Rincian Output	2	:	6104.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	59.282.063.000
Rincian Output		:	01	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	4.478.651.000
			02	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	54.803.412.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6104.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	72,00	Unit, m2, Paket	914.931.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	72,00	Unit	914.931.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6104.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	2.085.702.000
Rincian Output		:	01	EBD.001 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	1,00	Dokumen	51.700.000
			02	EBD.002 Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa Satker Vertikal	1,00	Dokumen	17.300.000
			03	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	366.330.000
			04	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	458.345.000
			05	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	1.192.027.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

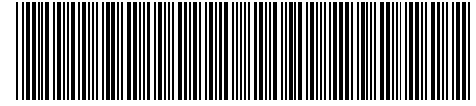
Halaman : I A. 9

Kegiatan	:	6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah		479.767.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi publik pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan		
		2. 02	Jumlah Data/Informasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang terstruktur menuju e-Database Kementerian Dalam Negeri		
		3. 03	Rating Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan		
		4. 04	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan		
Klasifikasi Rincian Output 5	:	6105.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit 479.767.000
Rincian Output	:	01 EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan 24.268.000
		02 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan 455.499.000
Kegiatan	:	6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah		1.053.047.000
	:	1. 01	Capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan		
	:	2. 02	Nilai capaian kinerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan		
Klasifikasi Rincian Output 6	:	6106.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit 543.984.000
Rincian Output	:	01 EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan 543.984.000
Klasifikasi Rincian Output 7	:	6106.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	275,00	Orang, Layanan, Rekomendasi 509.063.000
Rincian Output	:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	275.00	Orang 509.063.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

ttd.
Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
NIP 197004211990091003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	43.551.638	155.052.731	16.781.192	-	-	215.385.561		
010.04.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	-	135.152.624	15.800.000	-	-	150.952.624		
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama	-	81.738.599	-	-	-	81.738.599		
1237.AAG	Peraturan Menteri (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	400.000	-	-	-	400.000	01 . 51	
01	RM	-	400.000	-	-	-	400.000	133@	
1237.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	9.079.721	-	-	-	9.079.721	01 . 51	
01	RM	-	9.079.721	-	-	-	9.079.721	133	
1237.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 51	
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	133@	
1237.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	71.258.878	-	-	-	71.258.878	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



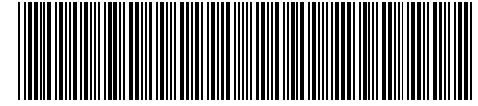
DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	71.258.878	-	-	-	71.258.878	133@	
1241	Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	-	16.506.287	15.800.000	-	-	32.306.287		
1241.AAC	Peraturan Pemerintah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	260.000	-	-	-	260.000	01 . 51	
01 RM		-	260.000	-	-	-	260.000	133@	
1241.AAG	Peraturan Menteri (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	400.000	-	-	-	400.000	01 . 51	
01 RM		-	400.000	-	-	-	400.000	133@	
1241.AEC	Kerja sama (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	01 . 51	
01 RM		-	2.400.000	-	-	-	2.400.000	133@	
1241.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	400.000	-	-	-	400.000	01 . 51	
01 RM		-	400.000	-	-	-	400.000	133@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1241.BGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 51	
01	RM	-	500.000	-	-	-	500.000	133@	
1241.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	15.800.000	-	-	15.800.000	01 . 51	
01	RM	-	-	15.800.000	-	-	15.800.000	133@	
1241.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	328.260	-	-	-	328.260	01 . 51	
01	RM	-	328.260	-	-	-	328.260	133@	
1241.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.336.287	-	-	-	3.336.287	01 . 51	
01	RM	-	3.336.287	-	-	-	3.336.287	133@	
1241.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.881.740	-	-	-	1.881.740	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



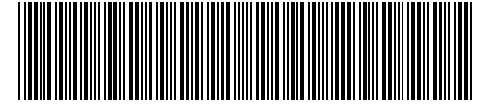
DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	1.881.740	-	-	-	1.881.740	133@	
1241.PEC	Kerja sama (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	01 . 51	
01 RM		-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	133@	
1241.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	01 . 51	
01 RM		-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	133@	
6136	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	36.907.738	-	-	-	36.907.738		
6136.AAG	Peraturan Menteri (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	500.000	-	-	-	500.000	01 . 51	
01 RM		-	500.000	-	-	-	500.000	133@	
6136.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	600.000	-	-	-	600.000	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



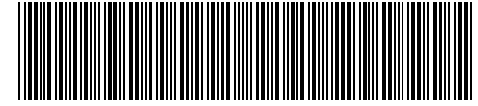
DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	600.000	-	-	-	600.000	133@	
6136.BEG	Bantuan Peralatan / Sarana (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.596.776	-	-	-	1.596.776	01 . 51	
01 RM		-	1.596.776	-	-	-	1.596.776	133@	
6136.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	100.000	-	-	-	100.000	01 . 51	
01 RM		-	100.000	-	-	-	100.000	133@	
6136.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	20.258.496	-	-	-	20.258.496	01 . 51	
01 RM		-	20.258.496	-	-	-	20.258.496	133@	
6136.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	13.852.466	-	-	-	13.852.466	01 . 51	
01 RM		-	13.852.466	-	-	-	13.852.466	133@	
010.04.WA	Program Dukungan Manajemen	43.551.638	19.900.107	981.192	-	-	64.432.937		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6103	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	-	617.427	-	-	-	617.427		
6103.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	617.427	-	-	-	617.427	01 . 51	
01	RM	-	617.427	-	-	-	617.427	133	
6104	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	43.551.638	17.749.866	981.192	-	-	62.282.696		
6104.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	43.551.638	15.664.164	66.261	-	-	59.282.063	01 . 51	
01	RM	43.551.638	15.664.164	66.261	-	-	59.282.063	133@	
6104.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	914.931	-	-	914.931	01 . 51	
01	RM	-	-	914.931	-	-	914.931	133	
6104.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.085.702	-	-	-	2.085.702	01 . 51	
01	RM	-	2.085.702	-	-	-	2.085.702	133	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	-	479.767	-	-	-	479.767		
6105.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	479.767	-	-	-	479.767	01 . 51	
01	RM	-	479.767	-	-	-	479.767	133	
6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	-	1.053.047	-	-	-	1.053.047		
6106.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	543.984	-	-	-	543.984	01 . 51	
01	RM	-	543.984	-	-	-	543.984	133	
6106.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	509.063	-	-	-	509.063	01 . 51	
01	RM	-	509.063	-	-	-	509.063	133	
JUMLAH		43.551.638	155.052.731	16.781.192	-	-	215.385.561		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

ttd.
Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
NIP 197004211990091003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.769.620	8.828.001	8.914.623	5.334.309	3.956.958	8.003.283	5.800.361	5.691.851	6.631.336	10.587.394	10.270.918	138.596.906	215.385.561
		BELANJA PEGAWAI	1.388.111	2.843.531	5.864.224	2.876.257	2.852.773	5.950.620	3.045.941	3.031.691	3.842.436	3.951.815	3.951.815	3.952.423	43.551.638
		BELANJA BARANG	1.381.509	5.912.431	2.991.729	2.458.051	1.104.185	2.052.663	2.754.419	2.660.160	2.788.901	6.482.586	6.094.743	118.371.352	155.052.731
		BELANJA MODAL	0	72.039	58.670	0	0	0	0	0	0	152.993	224.359	16.273.131	16.781.192
010.04.CM.1237		Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah	132.042	2.432.826	144.707	759.296	143.433	323.804	234.206	265.938	204.905	330.390	1.292.443	75.474.609	81.738.599
010.04.CM.1241		52 BELANJA BARANG DAN JASA	132.042	2.432.826	144.707	759.296	143.433	323.804	234.206	265.938	204.905	330.390	1.292.443	75.474.609	81.738.599
		Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi	175.296	1.179.384	1.151.465	353.924	381.485	354.886	508.998	807.927	419.209	595.889	1.084.756	25.293.069	32.306.287
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	175.296	1.179.384	1.151.465	353.924	381.485	354.886	508.998	807.927	419.209	595.889	1.084.756	9.493.069	16.506.287
010.04.CM.6136		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.800.000	15.800.000
		Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	63.132	728.743	559.296	193.848	316.239	221.927	1.990.984	1.568.649	1.959.071	3.639.585	2.538.250	23.128.015	36.907.738
010.04.WA.6103		52 BELANJA BARANG DAN JASA	63.132	728.743	559.296	193.848	316.239	221.927	1.990.984	1.568.649	1.959.071	3.639.585	2.538.250	23.128.015	36.907.738
		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Administrasi Wilayah	0	88.825	0	0	0	0	0	0	0	29.068	211.898	287.636	617.427
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	88.825	0	0	0	0	0	0	0	29.068	211.898	287.636	617.427
010.04.WA.6104		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah	2.368.745	4.295.791	7.023.096	3.996.835	3.085.397	7.000.286	3.066.173	3.049.337	4.048.150	5.756.740	4.971.470	13.620.675	62.282.696
		51 BELANJA PEGAWAI	1.388.111	2.843.531	5.864.224	2.876.257	2.852.773	5.950.620	3.045.941	3.031.691	3.842.436	3.951.815	3.951.815	3.952.423	43.551.638

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027486) DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	980.634	1.380.221	1.100.202	1.120.578	232.624	1.049.667	20.231	17.645	205.715	1.651.932	795.296	9.195.121	17.749.866
		53 BELANJA MODAL	0	72.039	58.670	0	0	0	0	0	0	152.993	224.359	473.131	981.192
	010.04.WA.6105	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Administrasi Wilayah	30.406	30.406	36.060	30.406	30.406	102.379	0	0	0	31.820	28.503	159.382	479.767
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	30.406	30.406	36.060	30.406	30.406	102.379	0	0	0	31.820	28.503	159.382	479.767
	010.04.WA.6106	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Administrasi Wilayah	0	72.027	0	0	0	0	0	0	0	203.902	143.597	633.521	1.053.047
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	72.027	0	0	0	0	0	0	0	203.902	143.597	633.521	1.053.047

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

ttd.
Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
NIP 197004211990091003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
IV A. B L O K I R**



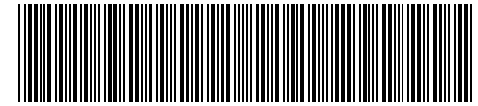
DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [04] Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027486] DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
027486	DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 87.260.845		
	52 Belanja Barang Rp. 87.003.263		
	53 Belanja Modal Rp. 257.582		
010.04.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		
1237	Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah		
1237.AAG	Peraturan Menteri		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.500		
	Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.000		
	Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 261.500		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
1237.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 128.623		
	Kebijakan Pemerintah		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.150		
	Kebijakan Pemerintah		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
		1237.UBA	
			522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51.000
			Kebijakan Pemerintah
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.300
			Kebijakan Pemerintah
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 107.489
			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 308.682
			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah
			521211 Belanja Bahan(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 174.158
			Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.200
			Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 155.091
			Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
IV A. B L O K I R**



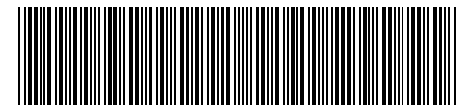
DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [04] Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027486] DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
1241	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 162.500 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	1241.AAC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.108.898 Kebijakan Pemerintah Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 101.765 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 58.824.904 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.200.705 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.200.705 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 66.800 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 828.598 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.450 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	1241.AAC Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan toponimi		1241.AAG Peraturan Menteri
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.072 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.618 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.900 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 66.800 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 125.652 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			1241.AEC Kerja sama
			522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 541.165

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [04] Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027486] DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
1241.AFA	KEBIJAKAN PEMARINTAH	1241.BGE	Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 584.751		521211 Belanja Bahan(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.086
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 348.926		522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 112.550
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Pemerintah
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.337	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.800		
Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD	Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.000	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 59.778		
Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD	Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 160.300	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 107.630		
Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD	Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.520	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.727		
Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD	Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	1241.CAN		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 107.450	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [04] Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027486] DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
1241.FAB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 257.582 Perlu Clerence Internal Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.650 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.300 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 268.800 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 154.950 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 39.700 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.500 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 357.534 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.538 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 648.768 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 44.250 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 693.022 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	1241.FBA		Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 76.418 Kebijakan Pemerintah Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.876 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
IV A. B L O K I R**



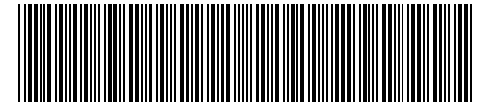
DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [04] Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027486] DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
1241.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 193.961 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		526223 Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.000.000 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.396 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	1241.UBA	Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.520 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.600 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.900 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
1241.PEC	Kerja sama	522191	Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 644.346 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD	
522131	Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 165.880 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 126.643 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 454.673 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 322.498 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 166.900 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 322.498 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 199.746 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 166.900 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [04] Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027486] DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6136 6136.AAG	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 449.035 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6136.BEG	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.500 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 151.018 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Peraturan Menteri		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 129.230 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.725 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Bantuan Peralatan / Sarana
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 79.200 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.424 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 119.275 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.600 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 135.850 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31.216 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 175.686 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.990 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
IV A. B L O K I R**



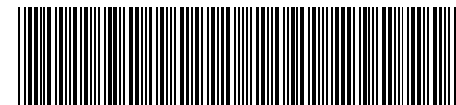
DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [04] Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027486] DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : IV.A. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6136.FAB	526311 Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 801.904 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6136.FBA	Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 78.650 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6136.FBA	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 84.095 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6136.UBA	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 585.343 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 220.000 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 375.336 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6136.FBA	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.890 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6136.UBA	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 473.332 Kebijakan Pemerrintah Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.100 Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.000 Kebijakan Pemerintah Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6136.FBA	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 194.151	6136.UBA	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 288.600 Kebijakan Pemerintah Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 184.500

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [04] Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027486] DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

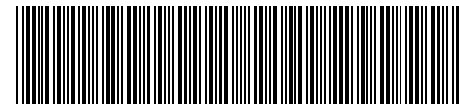
Halaman : IV.A. 8
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
010.04.WA 6104 6104.EBA	Kebijakan Pemerintah		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 603.283		
	Kebijakan INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.836.486		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.379.749			
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 435.284			
Kebijakan Pemerintah			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
Program Dukungan Manajemen			
Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Administrasi Wilayah			
Layanan Dukungan Manajemen Internal			
522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.000.000			
kebijakan			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

ttd.
Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
NIP 197004211990091003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.04.1.027486/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:9970-9083-0297-8070

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [04] Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027486] DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

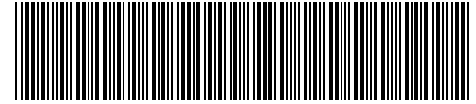
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

ttd.
Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
NIP 197004211990091003



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.05.2.028830/2025**



DS:1068-4798-7540-0649

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 14

Tanggal : 08 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
3. Provinsi : (05) JAWA TIMUR
4. Kode>Nama Satker : (028830) BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG
- Sebesar : Rp. 15.386.593.000 (LIMA BELAS MILIAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	15.247.708.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	138.885.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN M A L A N G (032) Rp. 15.386.593.000

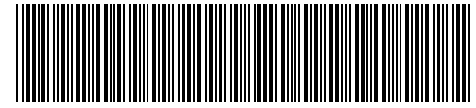
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028830/2025

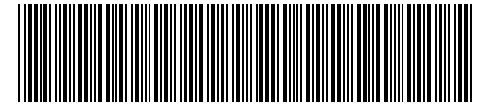


DS:1068-4798-7540-0649

Satker : (028830) BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	15.386.593.000
01.03	PELAYANAN UMUM	Rp.	11.644.714.000
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	3.741.879.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028830/2025

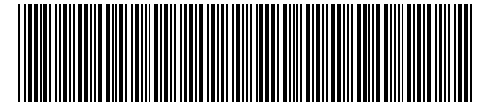


DS:1068-4798-7540-0649

Satker : (028830) BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG

CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	3.741.879.000
CM.1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	Rp.	3.741.879.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	11.644.714.000
WA.6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	Rp.	11.644.629.000
WA.6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	Rp.	85.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028830/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1068-4798-7540-0649

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (028830) BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG

Halaman : I A. 1

Program	:	010.05.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa			3.741.879.000
Kegiatan	:	1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa			3.741.879.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten Dalam Manajemen Pemdes			
		2. 01	Jumlah Kebijakan/Pedoman/Modul Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa			
		3. 02	Jumlah aparatur Kecamatan yang mengikuti pelatihan PTPD			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1248.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	60,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	124.281.000
Rincian Output	:	01 FAC.002	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Lingkup Regional	60.00	Orang	124.281.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1248.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	720,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	3.617.598.000
Rincian Output	:	01 UAC.004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Lingkup Regional	720.00	Orang	3.617.598.000
Program	:	010.05.WA	Program Dukungan Manajemen			11.644.714.000
Kegiatan	:	6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa			11.644.629.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			
		2. 02	Layanan Protokoler			
		3. 03	Layanan Umum			
		4. 04	Layanan Perkantoran			
		5. 05	Layanan Sarana Internal			
		6. 06	Layanan Prasarana Internal			
		7. 07	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon 1 dengan Unit Vertikal 1 S.D. 6 Satker			
		8. 08	Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan Unit Vertikal 1 s.d. 6 Satker			
		9. 09	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028830/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1068-4798-7540-0649

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (028830) BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG

Halaman : I A. 2

Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa

10. 10 Layanan Manajemen Keuangan

Klasifikasi Rincian Output	1	:	6108.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	11.644.360.000
Rincian Output		:	01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	14.604.000
		:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	11.629.756.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6108.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	269.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	269.000
Kegiatan		:	6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa			85.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Pengelolaan Kepegawaian			
		:	2. 02	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi			
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6110.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	85.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	1,00	Orang	85.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.05.2.028830/2025

I B. SUMBER DANA



DS:1068-4798-7540-0649

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
 Provinsi : (05) JAWA TIMUR
 Kode>Nama Satker : (028830) BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	15.386.593.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	15.247.708.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028830/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



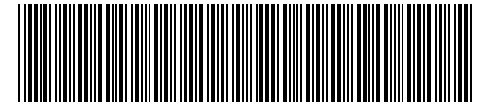
DS:1068-4798-7540-0649

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (028830) BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG	7.070.867	8.315.726	-	-	-	15.386.593		
010.05.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	-	3.741.879	-	-	-	3.741.879		
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	-	3.741.879	-	-	-	3.741.879		
1248.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (05.53 JAWA TIMUR / KOTA MALANG)	-	124.281	-	-	-	124.281	05 . 53	
04	PNBP	-	124.281	-	-	-	124.281	032	
1248.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (05.53 JAWA TIMUR / KOTA MALANG)	-	3.617.598	-	-	-	3.617.598	05 . 53	
01	RM	-	3.617.598	-	-	-	3.617.598	032@	
010.05.WA	Program Dukungan Manajemen	7.070.867	4.573.847	-	-	-	11.644.714		
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	7.070.867	4.573.762	-	-	-	11.644.629		
6108.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (05.53 JAWA TIMUR / KOTA MALANG)	7.070.867	4.573.493	-	-	-	11.644.360	05 . 53	
01	RM	7.070.867	4.558.889	-	-	-	11.629.756	032	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028830/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1068-4798-7540-0649

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (028830) BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG
Kewenangan : (KD)

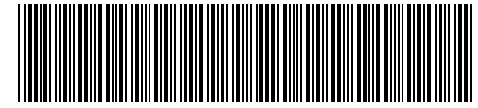
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNBP		-	14.604	-	-	-	14.604	032	
6108.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (05.53 JAWA TIMUR / KOTA MALANG)	-	269	-	-	-	269	05 . 53	
01 RM		-	269	-	-	-	269	032	
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	-	85	-	-	-	85		
6110.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (05.53 JAWA TIMUR / KOTA MALANG)	-	85	-	-	-	85	05 . 53	
01 RM		-	85	-	-	-	85	032	
JUMLAH		7.070.867	8.315.726	-	-	-	15.386.593		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028830/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1068-4798-7540-0649

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (05) JAWA TIMUR
Kode>Nama Satker : (028830) BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG

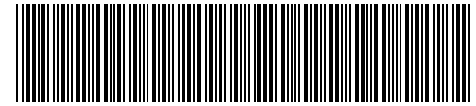
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	605.914	731.703	1.180.150	589.185	592.948	1.101.793	708.639	734.545	887.637	2.042.636	3.185.691	3.025.752	15.386.593
		BELANJA PEGAWAI	444.754	451.980	924.204	451.332	444.191	942.509	475.308	481.375	534.916	590.340	566.717	763.240	7.070.867
		BELANJA BARANG	161.160	279.723	255.946	137.853	148.757	159.284	233.331	253.170	352.721	1.452.296	2.618.974	2.262.512	8.315.726
	010.05.CM.1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	0	6.097	0	0	0	0	0	0	0	719.635	1.262.879	1.753.267	3.741.879
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	6.097	0	0	0	0	0	0	0	719.635	1.262.879	1.753.267	3.741.879
	010.05.WA.6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	605.914	725.520	1.180.150	589.185	592.948	1.101.793	708.639	734.545	887.637	1.323.001	1.922.811	1.272.485	11.644.629
		51 BELANJA PEGAWAI	444.754	451.980	924.204	451.332	444.191	942.509	475.308	481.375	534.916	590.340	566.717	763.240	7.070.867
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	161.160	273.541	255.946	137.853	148.757	159.284	233.331	253.170	352.721	732.661	1.356.094	509.245	4.573.762
	010.05.WA.6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85
		PERKIRAAN PENERIMAAN	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	2.916	158.268	2.924	190.352
		- PNBP (425131)	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.337	16.000
		- PNBP (425151)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.072	0	3.072
		- PNBP (425313)	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.583	1.587	19.000
		- PNBP (425421)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.280	0	152.280

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028830/2025
IV A. B L O K I R**



DS:1068-4798-7540-0649

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [028830] BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
028830	BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 665.795		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 665.795	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
010.05.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 377.580
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
1248.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 82.830		
	efisiensi anggaran tahap 2 sesuai inpres RI nomor 1 tahun 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.350		
	efisiensi anggaran tahap 2 sesuai inpres RI nomor 1 tahun 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 57.735		
	efisiensi anggaran tahap 2 sesuai inpres RI nomor 1 tahun 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 112.400		
	efisiensi anggaran tahap 2 sesuai inpres RI nomor 1 tahun 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.600		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028830/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:1068-4798-7540-0649

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : [05] JAWA TIMUR
Kode dan Nama Satker : [028830] BALAI BESAR PEMERINTAHAN DESA MALANG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.05.2.613629/2025**



DS:5553-6209-1313-0725

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 16

Tanggal : 11 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
- Provinsi : (12) LAMPUNG
- Kode>Nama Satker : (613629) BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG
- Sebesar : Rp. 15.249.975.000 (LIMA BELAS MILIAR DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	15.119.331.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	130.644.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN BANDAR LAMPUNG (017) Rp. 15.249.975.000

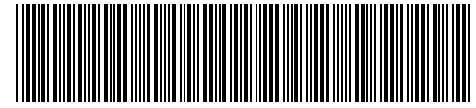
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.613629/2025



DS:5553-6209-1313-0725

Satker : (613629) BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	15.249.975.000
01.03	PELAYANAN UMUM	Rp.	11.566.426.000
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	3.683.549.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.613629/2025



DS:5553-6209-1313-0725

Satker : (613629) BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG

CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	3.683.549.000
CM.1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	Rp.	3.683.549.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	11.566.426.000
WA.6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	Rp.	11.537.014.000
WA.6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	Rp.	29.412.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.613629/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5553-6209-1313-0725

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (613629) BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG

Halaman : I A. 1

Program	:	010.05.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa			3.683.549.000
Kegiatan	:	1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa			3.683.549.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten Dalam Manajemen Pemdes			
		2. 01	Jumlah Kebijakan/Pedoman/Modul Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa			
		3. 02	Jumlah aparatur Kecamatan yang mengikuti pelatihan PTPD			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1248.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	60,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	130.644.000
Rincian Output	:	01 FAC.002	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Lingkup Regional	60.00	Orang	130.644.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1248.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	900,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	3.552.905.000
Rincian Output	:	01 UAC.004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Lingkup Regional	900.00	Orang	3.552.905.000
Program	:	010.05.WA	Program Dukungan Manajemen			11.566.426.000
Kegiatan	:	6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa			11.537.014.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			
		2. 02	Layanan Protokoler			
		3. 03	Layanan Umum			
		4. 04	Layanan Perkantoran			
		5. 05	Layanan Sarana Internal			
		6. 06	Layanan Prasarana Internal			
		7. 07	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon 1 dengan Unit Vertikal 1 S.D. 6 Satker			
		8. 08	Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan Unit Vertikal 1 s.d. 6 Satker			
		9. 09	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.613629/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5553-6209-1313-0725

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (613629) BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG

Halaman : I A. 2

Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa

10. 10 Layanan Manajemen Keuangan

Klasifikasi Rincian Output	1	:	6108.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	11.428.292.000
Rincian Output		:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	11.428.292.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6108.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	15,00	Unit, m2, Paket	44.951.000
Rincian Output		:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	15,00	Unit	44.951.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6108.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	63.771.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	18.904.000
		:	02 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	44.867.000
Kegiatan		:	6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa			29.412.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Pengelolaan Kepegawaian			
		:	2. 02	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi			
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6110.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	10.950.000
Rincian Output		:	01 EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	10.950.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6110.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	8,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	18.462.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	8,00	Orang	18.462.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.05.2.613629/2025

I B. SUMBER DANA



DS:5553-6209-1313-0725

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
 Provinsi : (12) LAMPUNG
 Kode>Nama Satker : (613629) BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	15.249.975.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	15.119.331.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.613629/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5553-6209-1313-0725

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (613629) BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG	7.604.000	7.601.024	44.951	-	-	15.249.975		
010.05.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	-	3.683.549	-	-	-	3.683.549		
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	-	3.683.549	-	-	-	3.683.549		
1248.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	130.644	-	-	-	130.644	12.51	
04	PNBP	-	130.644	-	-	-	130.644	017	
1248.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	3.552.905	-	-	-	3.552.905	12.51	
01	RM	-	3.552.905	-	-	-	3.552.905	017	
010.05.WA	Program Dukungan Manajemen	7.604.000	3.917.475	44.951	-	-	11.566.426		
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	7.604.000	3.888.063	44.951	-	-	11.537.014		
6108.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	7.604.000	3.824.292	-	-	-	11.428.292	12.51	
01	RM	7.604.000	3.824.292	-	-	-	11.428.292	017	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.613629/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5553-6209-1313-0725

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode>Nama Satker : (613629) BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG
Kewenangan : (KD)

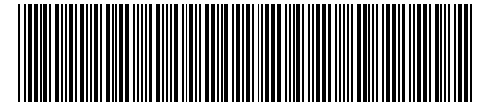
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6108.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	-	44.951	-	-	44.951	12 . 51	
01	RM	-	-	44.951	-	-	44.951	017	
6108.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	63.771	-	-	-	63.771	12 . 51	
01	RM	-	63.771	-	-	-	63.771	017	
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	-	29.412	-	-	-	29.412		
6110.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	10.950	-	-	-	10.950	12 . 51	
01	RM	-	10.950	-	-	-	10.950	017	
6110.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	18.462	-	-	-	18.462	12 . 51	
01	RM	-	18.462	-	-	-	18.462	017	
JUMLAH		7.604.000	7.601.024	44.951	-	-	15.249.975		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.613629/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5553-6209-1313-0725

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (12) LAMPUNG
Kode/Nama Satker : (613629) BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	613629	BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	471.306	1.656.138	1.388.929	599.770	635.318	1.161.831	755.544	723.670	854.772	2.194.126	1.925.839	2.882.732	15.249.975
		BELANJA PEGAWAI	450.283	485.259	1.010.334	479.747	476.248	978.721	517.789	516.814	659.668	676.378	676.378	676.381	7.604.000
		BELANJA BARANG	21.023	1.170.879	378.595	117.823	156.406	183.110	237.755	184.434	178.010	1.517.748	1.249.461	2.205.780	7.601.024
		BELANJA MODAL	0	0	0	2.200	2.664	0	0	22.422	17.094	0	0	571	44.951
	010.05.CM.1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.282.764	1.001.141	1.399.644	3.683.549
	010.05.WA.6108	52 BELANJA BARANG DAN JASA Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.282.764	1.001.141	1.399.644	3.683.549
		51 BELANJA PEGAWAI	450.283	485.259	1.010.334	479.747	476.248	978.721	517.789	516.814	659.668	676.378	676.378	676.381	7.604.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	21.023	1.159.984	375.518	114.746	153.329	180.033	234.678	181.357	178.010	234.984	248.320	806.081	3.888.063
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	2.200	2.664	0	0	22.422	17.094	0	0	571	44.951
	010.05.WA.6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	0	10.895	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	0	0	55	29.412
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	10.895	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	3.077	0	0	55	29.412
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	175.305
		- PNBP (425131)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
		- PNBP (425151)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.025	0	0	11.025
		- PNBP (425421)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.280	0	0	152.280

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.613629/2025
IV A. B L O K I R**



DS:5553-6209-1313-0725

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [613629] BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.613629/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:5553-6209-1313-0725

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : [12] LAMPUNG
Kode dan Nama Satker : [613629] BALAI PEMERINTAHAN DESA LAMPUNG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.05.2.028449/2025**



DS:0400-6915-1678-5035

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 13

Tanggal : 29 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (028449) BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 18.154.587.000 (DELAPAN BELAS MILIAR SERATUS LIMA PULUH EMPAT JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	18.028.275.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	126.312.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 18.154.587.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028449/2025



DS:0400-6915-1678-5035

Satker : (028449) BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	18.154.587.000
01.03	PELAYANAN UMUM	Rp.	12.858.156.000
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	5.296.431.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028449/2025



DS:0400-6915-1678-5035

Satker : (028449) BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA

CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	5.296.431.000
CM.1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	Rp.	5.296.431.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	12.858.156.000
WA.6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	Rp.	12.858.156.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028449/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0400-6915-1678-5035

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (028449) BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	010.05.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa				5.296.431.000
Kegiatan	:	1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa				5.296.431.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten Dalam Manajemen Pemdes				
		2. 01	Jumlah Kebijakan/Pedoman/Modul Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa				
		3. 02	Jumlah aparatur Kecamatan yang mengikuti pelatihan PTPD				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1248.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	60,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja		90.620.000
Rincian Output	:	01 FAC.002	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Lingkup Regional	60.00	Orang		90.620.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1248.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.440,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja		5.205.811.000
Rincian Output	:	01 UAC.004	Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Masyarakat Desa Lingkup Regional	1440.00	Orang		5.205.811.000
Program	:	010.05.WA	Program Dukungan Manajemen				12.858.156.000
Kegiatan	:	6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa				12.858.156.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi				
		2. 02	Layanan Protokoler				
		3. 03	Layanan Umum				
		4. 04	Layanan Perkantoran				
		5. 05	Layanan Sarana Internal				
		6. 06	Layanan Prasarana Internal				
		7. 07	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon 1 dengan Unit Vertikal 1 S.D. 6 Satker				
		8. 08	Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan Unit Vertikal 1 s.d. 6 Satker				
		9. 09	Layanan Perencanaan dan Penganggaran				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028449/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0400-6915-1678-5035

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (028449) BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA

Halaman : I A. 2

Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa

10. 10 Layanan Manajemen Keuangan

Klasifikasi Rincian Output 1	:	6108.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	12.623.464.000
Rincian Output	:	01	EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	12.623.464.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6108.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	27,00	Unit, m2, Paket	234.692.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	39.00	Unit	234.692.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.05.2.028449/2025

I B. SUMBER DANA



DS:0400-6915-1678-5035

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (028449) BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	18.154.587.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	18.028.275.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028449/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0400-6915-1678-5035

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (028449) BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA	8.158.396	9.761.499	234.692	-	-	18.154.587		
010.05.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	-	5.296.431	-	-	-	5.296.431		
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	-	5.296.431	-	-	-	5.296.431		
1248.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (04.02 DI YOGYAKARTA / KAB. SLEMAN)	-	90.620	-	-	-	90.620	04 . 02	
04	PNBP	-	90.620	-	-	-	90.620	030	
1248.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (04.02 DI YOGYAKARTA / KAB. SLEMAN)	-	5.205.811	-	-	-	5.205.811	04 . 02	
01	RM	-	5.205.811	-	-	-	5.205.811	030	
010.05.WA	Program Dukungan Manajemen	8.158.396	4.465.068	234.692	-	-	12.858.156		
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	8.158.396	4.465.068	234.692	-	-	12.858.156		
6108.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (04.02 DI YOGYAKARTA / KAB. SLEMAN)	8.158.396	4.465.068	-	-	-	12.623.464	04 . 02	
01	RM	8.158.396	4.465.068	-	-	-	12.623.464	030	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028449/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0400-6915-1678-5035

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (028449) BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6108.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (04.02 DI YOGYAKARTA / KAB. SLEMAN)	-	-	234.692	-	-	234.692	04 . 02	
01	RM	-	-	199.000	-	-	199.000	030	
04	PNBP	-	-	35.692	-	-	35.692	030	
JUMLAH		8.158.396	9.761.499	234.692	-	-	18.154.587		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028449/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0400-6915-1678-5035

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa

Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA

Kode>Nama Satker : (028449) BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	028449	BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	567.535	769.413	1.433.208	698.514	720.424	1.249.372	736.223	909.252	1.013.798	1.748.503	5.269.753	3.038.592	18.154.587
		BELANJA PEGAWAI	526.710	525.520	1.089.879	532.116	526.543	1.099.497	548.390	547.339	633.128	629.691	635.000	864.582	8.158.396
		BELANJA BARANG	40.825	224.547	325.600	166.398	146.015	149.875	187.833	361.913	380.670	1.118.812	4.520.694	2.138.317	9.761.499
		BELANJA MODAL	0	19.346	17.729	0	47.866	0	0	0	0	0	114.059	35.692	234.692
	010.05.CM.1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668.812	3.720.694	906.925	5.296.431
	010.05.WA.6108	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668.812	3.720.694	906.925	5.296.431
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	567.535	769.413	1.433.208	698.514	720.424	1.249.372	736.223	909.252	1.013.798	1.079.691	1.549.059	2.131.666	12.858.156
		51 BELANJA PEGAWAI	526.710	525.520	1.089.879	532.116	526.543	1.099.497	548.390	547.339	633.128	629.691	635.000	864.582	8.158.396
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	40.825	224.547	325.600	166.398	146.015	149.875	187.833	361.913	380.670	450.000	800.000	1.231.392	4.465.068
		53 BELANJA MODAL	0	19.346	17.729	0	47.866	0	0	0	0	0	114.059	35.692	234.692
		PERKIRAAN PENERIMAAN	0	13.000	0	0	0	0	83.490	76.140	0	0	0	0	172.630
		- PNBP (425131)	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
		- PNBP (425151)	0	0	0	0	0	0	7.350	0	0	0	0	0	7.350
		- PNBP (425421)	0	0	0	0	0	0	76.140	76.140	0	0	0	0	152.280

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028449/2025
IV A. B L O K I R**



DS:0400-6915-1678-5035

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [028449] BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.2.028449/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:0400-6915-1678-5035

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [028449] BALAI PEMERINTAHAN DESA YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

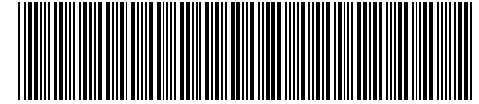
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.05.1.027753/2025**



DS:0765-6040-2329-0333

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 17

Tanggal : 18 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
- Sebesar : Rp. 116.979.669.000 (SERATUS ENAM BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	103.974.275.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBPNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
	Rp.		- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	13.005.394.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	11.043.879.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	1.961.515.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 116.979.669.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025



DS:0765-6040-2329-0333

Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	116.979.669.000
01.03	PELAYANAN UMUM	Rp.	85.701.263.000
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	31.278.406.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025



DS:0765-6040-2329-0333

Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	31.278.406.000
CM.1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	Rp.	14.927.005.000
CM.1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	Rp.	544.025.000
CM.6138	Penataan kelembagaan Desa	Rp.	8.357.795.000
CM.6484	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	Rp.	7.449.581.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	85.701.263.000
WA.6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	Rp.	1.082.440.000
WA.6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	Rp.	82.968.759.000
WA.6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	Rp.	659.128.000
WA.6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	Rp.	990.936.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Halaman : I A. 1

Program	:	010.05.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa			31.278.406.000	
Kegiatan	:	1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa			14.927.005.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah desa yang di validasi dan diklarifikasi kodefikasi dan Penamaan Desa				
		2. 02	Jumlah Sistem Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Standar Pelayanan Minimal Desa				
		3. 03	Jumlah desa yang tertib administrasi penataan desa				
		4. 04	jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penataan Kewenangan Desa dan Penyusunan Produk Hukum Desa				
		5. 05	Jumlah Desa yang Telah Menerapkan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Mengintegrasikan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional				
		6. 06	Jumlah desa dengan kategori "Berkembang" dan "Cepat Berkembang"				
		7. 07	Jumlah desa yang memperbaharui data Prodeskel dan terpublikasi secara online				
		8. 08	Jumlah Desa yang telah diberikan penguatan teknis pemerintahan desa				
		9. 09	Jumlah Desa yang telah memiliki Batas Wilayah Administrasi Desa sesuai Ketentuan Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota				
		10. 10	Jumlah Desa yang tertib administrasi pengelolaan aset desa				
		11. 11	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Inisiasi Kerja Sama Desa				
		12. 12	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penerapan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital				
		13. 13	Jumlah Desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital				
		14. 14	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital				
		15. 15	Jumlah Sistem Informasi Desa Berbasis Prodeskel/Epdeskel yang Terintegrasi dengan SIPD				
		16. 16	Dukungan Delegasi RI pada Sidang Internasional				
		17. 17	Jumlah Daerah yang Melaporkan Kerja Sama Desa				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	1244.AEG	Konferensi dan Event	1,00	Kegiatan, Paket Kegiatan	573.052.000
Rincian Output	:	01	AEG.001	Dukungan Delegasi RI pada Sidang Internasional	1,00	Kegiatan	573.052.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	2	:	1244.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	15,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	150.000.000
Rincian Output		:	01 FBA.001	Daerah yang Melaporkan Kerja Sama Desa	15,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	150.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1244.FBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	20.215,00	Desa, DesaKelurahan	3.398.140.000
Rincian Output		:	01 FBB.001	Desa yang telah divalidasi dan diklarifikasi nama dan kode desanya	15,00	Desa	51.032.000
		:	02 FBB.002	Desa yang menerapkan pelayanan administrasi pemerintahan desa dan Standar pelayanan Minimal Desa	40,00	Desa	416.818.000
		:	03 FBB.003	Desa yang telah diasistensi usulan penataan desanya	45,00	Desa	121.564.000
		:	04 FBB.004	Desa yang Telah Difasilitasi dalam Penataan Kewenangan Desa dan Penyusunan Produk Hukum Desa	35,00	Desa	256.468.000
		:	05 FBB.005	Desa yang menerapkan Model Perencanaan Pembangunan yang diintegrasikan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Nasional	40,00	Desa	455.896.000
		:	06 FBB.006	Desa dengan status kategori "Berkembang" dan "Cepat Berkembang"	10000,00	Desa	1.268.947.000
		:	07 FBB.007	Desa dan Kelurahan yang melakukan pemutakhiran data Prodeskel	10000,00	Desa/Kelurahan	400.352.000
		:	08 FBB.008	Penguatan Teknis Pemerintahan Desa	10,00	Desa	134.112.000
		:	09 FBB.009	Desa yang telah memiliki batas wilayah sesuai ketentuan	30,00	Desa	292.951.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1244.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1,00	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	700.000.000
Rincian Output		:	01 UAB.001	Sistem Informasi Desa Berbasis Prodeskel/Epdeskel yang Terintegrasikan dengan SIPD	1,00	Sistem Informasi	700.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	1244.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	2.002,00	Desa, DesaKelurahan	10.105.813.000
Rincian Output		:	01 UBB.001	Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa	125,00	Desa	1.000.000.000
		:	02 UBB.002	Desa yang difasilitasi dalam Inisiasi Kerja Sama Desa	90,00	Desa	850.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Halaman : I A. 3

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa

Desa, DesaKelurahan

No	Kode	Uraian	Volume	Unit	Estimasi Biaya
03	UBB.003	Desa yang difasilitasi dalam Penerapan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	50.00	Desa	850.000.000
04	UBB.004	Desa yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital (PN)	100.00	Desa	1.000.000.000
05	UBB.005	Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	100.00	Desa	850.000.000
06	UBB.006	Fasilitasi Pembinaan Kinerja Kelembagaan Posyandu di Desa (PN)	1500.00	Desa	1.961.515.000
07	UBB.007	Desa yang telah memiliki peta batas Desa dan tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang peta batas desa (PN)	37.00	Desa	3.594.298.000

Kegiatan	: 1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa			544.025.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Kompeten Dalam Manajemen Pemdes			
	: 2. 01	Jumlah Kebijakan/Pedoman/Modul Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa			
	: 3. 02	Jumlah aparatur Kecamatan yang mengikuti pelatihan PTPD			

Klasifikasi Rincian Output 6	: 1248.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	88.292.000
Rincian Output	: 01 AFA.001	Kebijakan/Pedoman/Modul Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa	1,00	NSPK	88.292.000

Klasifikasi Rincian Output 7	: 1248.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	100,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	455.733.000
Rincian Output	: 01 FAC.001	Jumlah Aparatur Kecamatan yang mengikuti pelatihan PTPD melalui online dan tatap muka	100,00	Orang	455.733.000

Kegiatan	: 6138	Penataan kelembagaan Desa			8.357.795.000
	: 1. 01	Jumlah lembaga trantib dan linmas desa yang tertata			
	: 2. 02	Jumlah Lembaga PKK yang tertata			
	: 3. 03	Fasilitasi dan Pembinaan LKAD Sebagai Mitra Pemerintah yang Baik			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Halaman : I A. 4

Penataan kelembagaan Desa

- 4. 04 Lembaga Posyandu yang Ditingkatkan Kapasitas Kader Posyandu dalam Implementasi 6 SPM
- 5. 05 Jumlah BPD yang mengimplementasikan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif
- 6. 06 Jumlah Kantor Desa yang terstandarisasi penguatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa

Klasifikasi Rincian Output	8	:	6138.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	139.297.000
Rincian Output		:	01 AFA.001	Fasilitasi pembentukan dan penataan Lembaga Linmas	1.00	NSPK	139.297.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	6138.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4.550,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	5.050.941.000
Rincian Output		:	01 BDB.001	Lembaga PKK yang tertata	4500.00	Lembaga	4.911.792.000
		:	02 BDB.002	LKAD dan MHA yang tertata dan berdaya	50.00	Lembaga	139.149.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	6138.BEI	Bantuan Lembaga	10,00	Lembaga	517.557.000
Rincian Output		:	01 BEI.002	Fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan desa	10.00	Lembaga	517.557.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	6138.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	15,00	Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	150.000.000
Rincian Output		:	01 FAI.001	BPD yang mengimplementasikan musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif	15.00	Lembaga	150.000.000
Klasifikasi Rincian Output	12	:	6138.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1.500,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	2.500.000.000
Rincian Output		:	01 QDB.001	Lembaga Posyandu yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Implementasi 6 SPM	1500.00	Lembaga	2.500.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Halaman : I A. 5

Kegiatan	:	6484	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa			7.449.581.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	13	:	6484.BAH Pelayanan Publik Lainnya	11,00	layanan	7.449.581.000
Rincian Output	:	01	BAH.001 Dukungan Manajemen P3PD	11,00	layanan	7.449.581.000
Program	:	010.05.WA	Program Dukungan Manajemen			85.701.263.000
Kegiatan	:	6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa			1.082.440.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Layanan Hukum			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6107.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.082.440.000
Rincian Output	:	01	EBA.957 Layanan Hukum	1,00	Layanan	1.082.440.000
Kegiatan	:	6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa			82.968.759.000
	:	1. 01	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			
	:	2. 02	Layanan Protokoler			
	:	3. 03	Layanan Umum			
	:	4. 04	Layanan Perkantoran			
	:	5. 05	Layanan Sarana Internal			
	:	6. 06	Layanan Prasarana Internal			
	:	7. 07	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon 1 dengan Unit Vertikal 1 S.D. 6 Satker			
	:	8. 08	Dokumen LAKIN Satker Eselon I dengan Unit Vertikal 1 s.d. 6 Satker			
	:	9. 09	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			
	:	10. 10	Layanan Manajemen Keuangan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



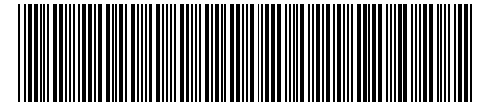
DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Halaman : I A. 6

Klasifikasi Rincian Output	2	:	6108.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	75.737.708.000
Rincian Output		:	01	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	274.006.000
		:	02	EBA.959 Layanan Protokoler	1.00	Layanan	1.141.822.000
		:	03	EBA.962 Layanan Umum	2.00	Layanan	853.872.000
		:	04	EBA.994 Layanan Perkantoran	2.00	Layanan	73.468.008.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6108.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50,00	Unit, m2, Paket	2.077.109.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	45,00	Unit	1.072.789.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	5,00	Unit	1.004.320.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6108.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	5.153.942.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2,00	Dokumen	3.635.506.000
		:	02	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	2,00	Dokumen	1.518.436.000
Kegiatan		:	6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa			659.128.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Layanan Data dan Informasi			
		:	2. 02	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6109.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	649.111.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	649.111.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6109.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	10.017.000
Rincian Output		:	01	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	10.017.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Halaman : I A. 7

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

Kegiatan	: 6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa			990.936.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Pengelolaan Kepegawaian			
	2. 02	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi			
Klasifikasi Rincian Output	7 : 6110.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	603.981.000
Rincian Output	: 01 EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2.00	Layanan	603.981.000
Klasifikasi Rincian Output	8 : 6110.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	60,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	386.955.000
Rincian Output	: 01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	60.00	Orang	386.955.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

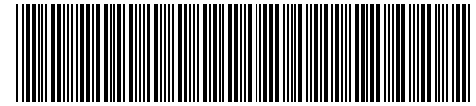
ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025

I B. SUMBER DANA



DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	116.979.669.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	103.974.275.000		(2) RPLN	US\$	756.431	Rp.	11.043.879.000
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	13.005.394.000		(2) RHLN	US\$	134.351	Rp.	1.961.515.000
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	INTERNATIONALBANK 9732-ID	JPY USD						
		13868THA	IDR	224,64 3.594.298,00					
2	1	INTERNATIONALBANK 8941-ID	USD USD		3	3.594.298			
		1CZ6CF2A	IDR	465,60 7.449.581,00					
3	2	INTERNATIONALBANK TF0C1687-TF0C3	USD USD		3	7.449.581			
		2HUXN2PA	IDR	122,60 1.961.515,00		1.961.515			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



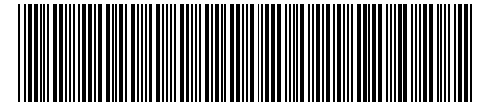
DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA	48.829.547	66.073.013	2.077.109	-	-	116.979.669		
010.05.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	-	31.278.406	-	-	-	31.278.406		
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa	-	14.927.005	-	-	-	14.927.005		
1244.AEG	Konferensi dan Event (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	573.052	-	-	-	573.052	01 . 54	
01	RM	-	573.052	-	-	-	573.052	133@	
1244.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	150.000	-	-	-	150.000	01 . 54	
01	RM	-	150.000	-	-	-	150.000	133@	
1244.FBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.398.140	-	-	-	3.398.140	01 . 54	
01	RM	-	3.398.140	-	-	-	3.398.140	133@	
1244.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	700.000	-	-	-	700.000	01 . 54	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



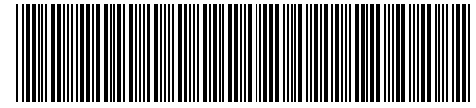
DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	700.000	-	-	-	700.000	133@	
1244.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	10.105.813	-	-	-	10.105.813	01 . 54	
01 RM		-	4.550.000	-	-	-	4.550.000	133@	
02 PLN		-	3.594.298	-	-	-	3.594.298	133	RK 13868THA
09 HLN		-	1.961.515	-	-	-	1.961.515	133	RK 2HUXN2PA
1248	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	-	544.025	-	-	-	544.025		
1248.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	88.292	-	-	-	88.292	01 . 54	
01 RM		-	88.292	-	-	-	88.292	133@	
1248.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	455.733	-	-	-	455.733	01 . 54	
01 RM		-	455.733	-	-	-	455.733	133@	
6138	Penataan kelembagaan Desa	-	8.357.795	-	-	-	8.357.795		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



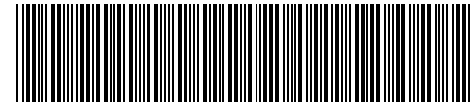
DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6138.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	139.297	-	-	-	139.297	01 . 54	
01	RM	-	139.297	-	-	-	139.297	133@	
6138.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.050.941	-	-	-	5.050.941	01 . 54	
01	RM	-	5.050.941	-	-	-	5.050.941	133@	
6138.BEI	Bantuan Lembaga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	517.557	-	-	-	517.557	01 . 54	
01	RM	-	517.557	-	-	-	517.557	133@	
6138.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	150.000	-	-	-	150.000	01 . 54	
01	RM	-	150.000	-	-	-	150.000	133@	
6138.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	01 . 54	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	133@	
6484	Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	-	7.449.581	-	-	-	7.449.581		
6484.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.449.581	-	-	-	7.449.581	01 . 54	
02 PLN		-	7.449.581	-	-	-	7.449.581	133	RK 1CZ6CF2A
010.05.WA	Program Dukungan Manajemen	48.829.547	34.794.607	2.077.109	-	-	85.701.263		
6107	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	-	1.082.440	-	-	-	1.082.440		
6107.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.082.440	-	-	-	1.082.440	01 . 54	
01 RM		-	1.082.440	-	-	-	1.082.440	133	
6108	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	48.829.547	32.062.103	2.077.109	-	-	82.968.759		
6108.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	48.829.547	26.908.161	-	-	-	75.737.708	01 . 54	
01 RM		48.829.547	26.908.161	-	-	-	75.737.708	133@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6108.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	-	2.077.109	-	-	2.077.109	01 . 54	
01	RM	-	-	2.077.109	-	-	2.077.109	133	
6108.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.153.942	-	-	-	5.153.942	01 . 54	
01	RM	-	5.153.942	-	-	-	5.153.942	133	
6109	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	-	659.128	-	-	-	659.128		
6109.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	649.111	-	-	-	649.111	01 . 54	
01	RM	-	649.111	-	-	-	649.111	133	
6109.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	10.017	-	-	-	10.017	01 . 54	
01	RM	-	10.017	-	-	-	10.017	133	
6110	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	-	990.936	-	-	-	990.936		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Kewenangan : (KP)

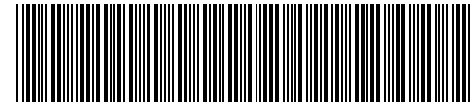
Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
6110.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	603.981	-	-	-	603.981	01 . 54	
01 RM		-	603.981	-	-	-	603.981	133	
6110.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	386.955	-	-	-	386.955	01 . 54	
01 RM		-	386.955	-	-	-	386.955	133	
JUMLAH		48.829.547	66.073.013	2.077.109	-	-	116.979.669		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa

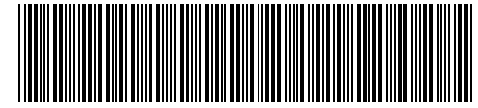
Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	8.888.864	11.221.567	14.910.262	8.146.570	2.725.728	3.571.363	11.949.276	5.443.129	7.030.711	8.457.756	12.560.688	22.073.755	116.979.669
		BELANJA PEGAWAI	8.138.664	8.130.961	8.020.848	5.676.736	0	0	0	618.858	4.161.272	4.186.124	4.186.124	5.709.960	48.829.547
		BELANJA BARANG	750.200	3.090.606	6.794.424	2.469.834	2.499.414	3.381.935	11.754.891	4.788.557	2.869.439	4.161.742	8.154.565	15.357.407	66.073.013
		BELANJA MODAL	0	0	94.990	0	226.314	189.428	194.384	35.714	0	109.890	220.000	1.006.388	2.077.109
010.05.CM.1244		Penataan sistem pelayanan administrasi desa	0	17.922	1.312.835	352.828	734.505	586.442	458.429	1.666.562	663.981	644.262	2.630.689	5.858.549	14.927.005
010.05.CM.1248		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	17.922	1.312.835	352.828	734.505	586.442	458.429	1.666.562	663.981	644.262	2.630.689	5.858.549	14.927.005
010.05.CM.1248		Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur/pengurus Kelembagaan Desa	0	0	44	55	0	0	321.856	0	0	0	0	222.070	544.025
010.05.CM.6138		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	44	55	0	0	321.856	0	0	0	0	222.070	544.025
010.05.CM.6138		Penataan kelembagaan Desa	0	13.681	200.015	290.076	147.920	167.381	910.180	469.993	366.154	518.198	628.993	4.645.201	8.357.795
010.05.CM.6484		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	13.681	200.015	290.076	147.920	167.381	910.180	469.993	366.154	518.198	628.993	4.645.201	8.357.795
010.05.CM.6484		Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0	0	7.449.581	0	0	0	0	0	7.449.581
010.05.WA.6107		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	7.449.581	0	0	0	0	0	7.449.581
010.05.WA.6107		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pemerintahan Desa	0	8.147	14.617	10.027	8.391	8.391	42.169	194.074	96.448	322.483	377.692	0	1.082.440
010.05.WA.6108		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	8.147	14.617	10.027	8.391	8.391	42.169	194.074	96.448	322.483	377.692	0	1.082.440
010.05.WA.6108		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa	8.849.037	10.971.491	13.266.435	7.452.659	1.789.008	2.768.224	2.597.922	2.973.615	5.861.408	6.689.090	8.597.801	11.152.070	82.968.759
		51 BELANJA PEGAWAI	8.138.664	8.130.961	8.020.848	5.676.736	0	0	0	618.858	4.161.272	4.186.124	4.186.124	5.709.960	48.829.547

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (027753) DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010.05.WA.6109		52 BELANJA BARANG DAN JASA	710.373	2.840.529	5.150.597	1.775.923	1.562.694	2.578.795	2.403.538	2.319.043	1.700.136	2.393.076	4.191.677	4.435.722	32.062.103
		53 BELANJA MODAL	0	0	94.990	0	226.314	189.428	194.384	35.714	0	109.890	220.000	1.006.388	2.077.109
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pemerintahan Desa	0	140.652	56.923	18.632	23.610	18.632	82.199	54.775	5.486	73.210	111.128	73.882	659.128
010.05.WA.6110		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	140.652	56.923	18.632	23.610	18.632	82.199	54.775	5.486	73.210	111.128	73.882	659.128
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pemerintahan Desa	39.827	69.673	59.393	22.293	22.293	22.293	86.939	84.110	37.234	210.513	214.386	121.982	990.936
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	39.827	69.673	59.393	22.293	22.293	22.293	86.939	84.110	37.234	210.513	214.386	121.982	990.936
		PERKIRAAN PENERIMAAN	198.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.786
		- PNBP (425122)	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000
		- PNBP (425131)	133.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.786

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
IV A. B L O K I R**



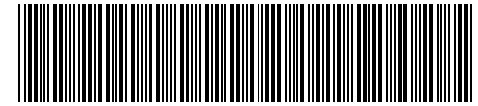
DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027753] DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
027753	DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.250
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 9.317.697		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 9.317.697	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
010.05.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
1244	Penataan sistem pelayanan administrasi desa		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.200
1244.AEG	Konferensi dan Event		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.000	1244.FBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211	Belanja Bahan(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 85.124
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.700	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.200
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.264		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.042
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 392.052
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 350.036	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.224
1244.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.363		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
IV A. B L O K I R**



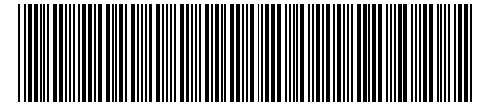
DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027753] DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
1244.UAB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 450.213 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	1248	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 547.131 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 184.268 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 694.888 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Sistem Informasi Pemerintahan 522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 700.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 529.291 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
1244.UBB	Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Desa 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 153.534 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	1248.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.249 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 85.600 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.335 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.150 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 61.708 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
IV A. B L O K I R**



DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027753] DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
1248.FAC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 763.500
	521211 Belanja Bahan(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 49.385		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 461.661
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.307		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.700	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 124.945		
6138 Penataan kelembagaan Desa	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6138.BEI	Bantuan Lembaga
6138.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.707		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.557
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.707	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6138.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	521211 Belanja Bahan(RM)		526123 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang(RM)
521211 Belanja Bahan(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 330.170		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 500.000
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 330.170	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 70.700		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 70.700	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
IV A. B L O K I R**



DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027753] DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6138.FAI	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 59.263 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.244.820 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.925 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6138.QDB	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	010.05.WA 6108 6108.EBA	Program Dukungan Manajemen Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pemerintahan Desa
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 113.353 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.900 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 185.000 kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 154.162 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.750 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 224.514		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.05.1.027753/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:0765-6040-2329-0333

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027753] DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa

ttd.
Drs. La Ode Ahmad PB
NIP. 197402241993111004



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.06.1.039729/2025**



DS:0421-2851-4921-2366

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 13

Tanggal : 02 Januari 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
- Sebesar : Rp. 416.948.656.000 (EMPAT RATUS ENAM BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	165.869.448.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	196.016.810.000	5. Hibah Langsung	Rp.	55.062.398.000
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	181.778.250.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	55.062.398.000
- Hibah Luar Negeri	Rp.	14.238.560.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA IV	(133) Rp.	351.225.891.000	2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	(140) Rp.	65.722.765.000
--------------------	-----------	-----------------	-----------------------------------	-----------	----------------

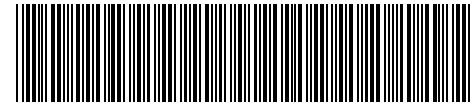
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025



DS:0421-2851-4921-2366

Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	416.948.656.000
01.03	PELAYANAN UMUM	Rp.	133.321.668.000
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	283.626.988.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025



DS:0421-2851-4921-2366

Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	283.626.988.000
CM.1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	Rp.	23.546.083.000
CM.6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	260.080.905.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	133.321.668.000
WA.6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	Rp.	1.586.079.000
WA.6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	Rp.	614.624.000
WA.6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	Rp.	128.890.716.000
WA.6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	Rp.	1.789.111.000
WA.6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	Rp.	441.138.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : I A. 1

Program	:	010.06.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa			283.626.988.000
Kegiatan	:	1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah			23.546.083.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan Pembangunan Daerah			
		2. 02	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1254.AAG	Peraturan Menteri	2,00	PerMen, Perka, RPermen	322.149.000
Rincian Output	:	01 AAG.001	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	1,00	PerMen	122.149.000
		02 AAG.002	Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Manajemen Resiko Pembangunan Nasional di Daerah	1,00	PerMen	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1254.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, KabKota	136.602.000
Rincian Output	:	01 FBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam Penyelarasan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	136.602.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1254.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1,00	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	23.087.332.000
Rincian Output	:	01 UAB.001	Optimalisasi Penerapan SIPD sebagai platform tunggal pemerintahan di daerah	1,00	Sistem Informasi	23.087.332.000
Kegiatan	:	6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah			260.080.905.000
	:	1. 01	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan dan Penataan Ruang			
	:	2. 02	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral			
	:	3. 03	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pertanian dan Pangan			
	:	4. 04	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Kehutanan			
	:	5. 05	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup			
	:	6. 06	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

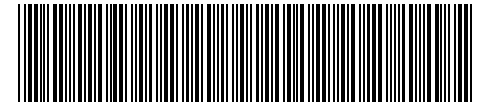
Halaman : I A. 2

Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah

- 7. 07 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Permukiman
- 8. 08 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan
- 9. 09 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Perhubungan
- 10. 10 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
- 11. 11 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Kesehatan
- 12. 12 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Sosial dan Budaya
- 13. 13 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal
- 14. 14 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Perindustrian dan Perdagangan
- 15. 15 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri
- 16. 16 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pendidikan
- 17. 17 Persentase Pelaksanaan Pembinaan di Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
- 18. 18 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 19. 19 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 20. 20 Persentase Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan
- 21. 21 Jumlah Daerah yang melaksanakan Peningkatan mutu dan layanan SPM
- 22. 22 Jumlah Daerah yang menerapkan manajemen sistem pengaduan pelayanan SPM

Klasifikasi Rincian Output	4	:	6139.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	171.850.000
Rincian Output		:	01 ABL.001	Rekomendasi untuk penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	171.850.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6139.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	919,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	209.899.818.000
Rincian Output		:	01 FBA.100	Daerah yang Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	513.621.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : I A. 3

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, KabKota		
		Energi Baru Terbarukan (EBT)	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	
02	FBA.101	Daerah yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Reforma Agraria dan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	397.444.000
03	FBA.102	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Ketahanan Pangan Daerah	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	460.357.000
04	FBA.103	Daerah yang melaksanakan program kelapa sawit berkelanjutan	26.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	477.870.000
05	FBA.104	Daerah yang difasilitasi dalam Pelaksanaan Perhutanan Sosial	24.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	190.990.000
06	FBA.105	Daerah yang difasilitasi dalam Penyusunan dan Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis-KLHS ke dalam RPJMD	15.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	182.211.000
07	FBA.200	Daerah yang difasilitasi dalam Pengembangan Potensi dan Kerjasama di Bidang Kelautan dan Perikanan	2.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	155.199.000
08	FBA.300	Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Kinerja Kabupaten/Kota dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	514.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	633.009.000
09	FBA.301	Daerah yang melaksanakan pengembangan UMKM, Seni dan Kerajinan Nasional (DEKRANAS)	15.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.500.000.000
10	FBA.302	Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Daerah	15.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	191.340.000
11	FBA.400	Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Ketenagakerjaan	20.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.846.629.000
12	FBA.401	Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Kebijakan Penyelenggaraan Transmigrasi	4.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	189.309.000
13	FBA.402	Daerah yang difasilitasi dalam rangka Penurunan AKI di Daerah	10.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.145.029.000
14	FBA.800	Fasilitasi Pengelolaan Sampah Terpadu di Kawasan Sungai Citarum (ISWMP)	15.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	30.473.276.000
15	FBA.801	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Daerah dalam Program Ketangguhan Banjir Perkotaan (NUFReP)	6.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	7.615.305.000
16	FBA.802	Fasilitasi Perencanaan dan Pengendalian serta Perlindungan Risiko Bencana di Kawasan Pertanian	16.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	13.555.466.000
17	FBA.803	Fasilitasi Perencanaan Terpadu dalam Pembangunan Daerah di Perkotaan (NUDP)	23.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	130.134.203.000
18	FBA.900	Fasilitasi peningkatan kinerja Kabupaten/Kota dalam implementasi aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan Stunting di Daerah melalui program Investing in	100.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	14.238.560.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : I A. 4

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota

Nutrition and Early Years (INEY) Phase II

100.00 Daerah (Prov/Kab/Kota)

Klasifikasi Rincian Output	6	:	6139.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	22.00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	16.930.976.000
Rincian Output		:	01	PBL.001 Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib Pelayanan Dasar	6.00	Rekomendasi Kebijakan	5.772.795.000
		:	02	PBL.002 Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar	8.00	Rekomendasi Kebijakan	6.075.527.000
		:	03	PBL.003 Rekomendasi Ketepatan Pembagian Urusan Pilihan	8.00	Rekomendasi Kebijakan	5.082.654.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6139.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	3.605,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	33.078.261.000
Rincian Output		:	01	UBA.001 Daerah yang melaksanakan Peningkatan mutu dan layanan SPM	10.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.815.684.000
		:	02	UBA.002 Daerah yang menerapkan manajemen sistem pengaduan pelayanan SPM	10.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	978.153.000
		:	03	UBA.003 Daerah yang menerapkan tata kelola persampahan	10.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	890.454.000
		:	04	UBA.004 Daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian pelaksanaan PBG berketahanan bencana (PN)	10.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	951.506.000
		:	05	UBA.100 Daerah yang dievaluasi rancangan Perda Tata Ruangnya	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	846.583.000
		:	06	UBA.200 Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pekerjaan Umum berdasarkan Tipologi Daerah	546.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.451.506.000
		:	07	UBA.201 Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat berdasarkan Tipologi Daerah	546.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.393.051.000
		:	08	UBA.202 Daerah yang menyusun rencana Aksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PN)	6.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	910.022.000
		:	09	UBA.203 Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Jalan	18.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.435.685.000
		:	10	UBA.204 Daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman	14.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	971.459.000
		:	11	UBA.300 Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Kesehatan berdasarkan Tipologi Daerah (PN)	546.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.429.367.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : I A. 5

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, KabKota		
12	UBA.301	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Sosial berdasarkan Tipologi Daerah	546.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.381.506.000
13	UBA.302	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Trantibumlinmas berdasarkan Tipologi Daerah (PN)	546.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.396.971.000
14	UBA.303	Provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata	2.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	562.026.000
15	UBA.304	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.357.916.000
16	UBA.305	Daerah yang menerapkan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting di daerah (PN)	54.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.418.335.000
17	UBA.400	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan SPM urusan Pendidikan berdasarkan Tipologi Daerah (PN)	546.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.382.351.000
18	UBA.401	Daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (PN)	11.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	929.581.000
19	UBA.403	Daerah yang dievaluasi dalam penerapan Prov/Kabupaten/Kota Layak Anak (PN)	10.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	999.514.000
20	UBA.404	Daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG)	10.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	948.888.000
21	UBA.405	Daerah yang menerapkan layanan perlindungan Perempuan dan Anak serta perlindungan dari kekerasan dan TPPO	10.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	929.741.000
22	UBA.406	Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Rencana Induk Urusan Pemuda dan Olahraga (PN)	10.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	976.096.000
23	UBA.407	Daerah yang menetapkan Upah Minimum Provinsi (PN)	34.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	940.519.000
24	UBA.408	Daerah yang difasilitasi dalam Peningkatan Budaya Gemar Membaca (PN)	34.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	781.347.000

Program	:	010.06.WA	Program Dukungan Manajemen	133.321.668.000
Kegiatan	:	6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	1.586.079.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah daerah yang melaksanakan dan melaporkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
		2. 02	Jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : I A. 6

Klasifikasi Rincian Output	1	:	6111.FBA	Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	76,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	1.586.079.000
Rincian Output		:	01 FBA.001	Pelaksanaan dan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	798.867.000
		:	02 FBA.002	Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	787.212.000
Kegiatan		:	6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah			614.624.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun			
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6112.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	614.624.000
Rincian Output		:	01 EBA.957	Layanan Hukum	1,00	Layanan	614.624.000
Kegiatan		:	6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah			128.890.716.000
		:	1. 01	Persentase Layanan Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah			
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6113.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	73.675.812.000
Rincian Output		:	01 EBA.956	Layanan BMN	1,00	Layanan	93.250.000
		:	02 EBA.959	Layanan Protokoler	1,00	Layanan	580.115.000
		:	03 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	1.466.694.000
		:	04 EBA.994	Layanan Perkantoran	2,00	Layanan	71.535.753.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6113.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	15,00	Unit, m2, Paket	3.189.618.000
Rincian Output		:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	14,00	Unit	1.330.618.000
		:	02 EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1,00	Unit	1.859.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : I A. 7

Klasifikasi Rincian Output	5	:	6113.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	18,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	52.025.286.000
Rincian Output		:	01	EBD.001 Layanan Pembinaan Pembangunan Daerah	8,00	Dokumen	50.682.208.000
		:	02	EBD.002 Layanan Penyusunan Dokumen Lakin Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal - SBKU	1,00	Dokumen	7.780.000
		:	03	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	155.701.000
		:	04	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	99.817.000
		:	05	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	7,00	Dokumen	1.079.780.000
Kegiatan		:	6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah			1.789.111.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase Penyelesaian Layanan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah			
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6114.CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	Unit, KabKota, Kecamatan, TitikLokasi	1.500.000.000
Rincian Output		:	01	CBT.001 Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	Unit	1.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6114.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	289.111.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	289.111.000
Kegiatan		:	6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah			441.138.000
		:	1. 01	Pengelolaan Organisasi dan SDM lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah			
Klasifikasi Rincian Output	8	:	6115.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	357.093.000
Rincian Output		:	01	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	357.093.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : I A. 8

Klasifikasi Rincian Output	9	:	6115.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	302,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	72.845.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	302.00	Orang	72.845.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	6115.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	11.200.000
Rincian Output		:	01 EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Dokumen	11.200.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

ttd.
Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE
NIP 196712291993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025**



DS:0421-2851-4921-2366

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : I B. 1

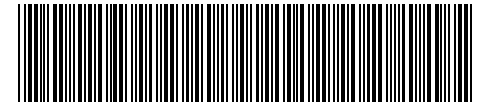
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	416.948.656.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	730.163	Rp.	10.660.367.000	
1. Rupiah Murni	Rp.	165.869.448.000		(2) RPLN	US\$	11.720.403	Rp.	171.117.883.000	
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	196.016.810.000		(2) RHLN	US\$	975.244	Rp.	14.238.560.000	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	55.062.398.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	55.062.398.000			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	INTERNATIONALBANK 9459-ID	USD	475,96					
		1739NSEA	IDR	7.615.305,00	3	7.615.305			
2	1	INTERNATIONALBANK 9024-ID	USD	1.904,58					
		1HFQ7GNA	IDR	30.473.276,00	3	30.473.276			
3	1	ASIANDEVELOPMENTB 4410-INO	JPY	847,22	2	10.660.367			
		1NPBHBMA	IDR	13.555.466,00	3	2.895.099			
4	1	INTERNATIONALBANK 8976-ID	USD	8.133,39					
		1PF7SCLA	IDR	130.134.203,00	3	130.134.203			
5	2	GOVERNMENTOFTHEU GA.10.04.2023	USD	2.990,33					

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025**



DS:0421-2851-4921-2366

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : I B. 2

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	416.948.656.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	730.163	Rp.	10.660.367.000	
1. Rupiah Murni	Rp.	165.869.448.000		(2) RPLN	US\$	11.720.403	Rp.	171.117.883.000	
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	196.016.810.000		(2) RHLN	US\$	975.244	Rp.	14.238.560.000	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	55.062.398.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	55.062.398.000			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		27YDNA6A	IDR	47.845.296,00					
6	2	UNITEDNATIONSCHIL	USD		5	47.845.296			
		CP-20.08.2021	USD	264,52					
		2C7EJQHA	IDR	4.232.233,00					
7	2	INTERNATIONALBANK	USD		5	4.232.233			
		TF0C1687-TF0C3	USD	889,91					
		2HUXN2PA	IDR	14.238.560,00	3	14.238.560			
7	2	INTERNATIONALBANK	USD						
		TF0C1687-TF0C3	USD	889,91					
		2HUXN2PA	IDR	14.238.560,00	3	14.238.560			
8	2	UNITEDNATIONSPOPU	USD						
		IPA17.02.21	USD	186,55					

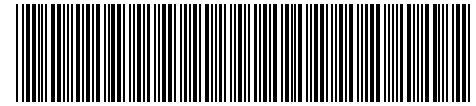
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025

I B. SUMBER DANA



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	416.948.656.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	730.163	Rp.	10.660.367.000
1. Rupiah Murni	Rp.	165.869.448.000		(2) RPLN	US\$	11.720.403	Rp.	171.117.883.000
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	196.016.810.000		(2) RHLN	US\$	975.244	Rp.	14.238.560.000
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	55.062.398.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	55.062.398.000		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2TCK92FA	IDR	2.984.869,00	5	2.984.869			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	52.923.434	360.995.604	3.029.618	-	-	416.948.656		
010.06.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	-	283.626.988	-	-	-	283.626.988		
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	-	23.546.083	-	-	-	23.546.083		
1254.AAG	Peraturan Menteri (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	322.149	-	-	-	322.149	01 . 54	
01	RM	-	322.149	-	-	-	322.149	133@	
1254.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	136.602	-	-	-	136.602	01 . 54	
01	RM	-	136.602	-	-	-	136.602	133@	
1254.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	23.087.332	-	-	-	23.087.332	01 . 54	
01	RM	-	23.087.332	-	-	-	23.087.332	133@	
6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	-	260.080.905	-	-	-	260.080.905		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6139.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	171.850	-	-	-	171.850	01 . 54	
01 RM		-	171.850	-	-	-	171.850	133@	
6139.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	209.899.818	-	-	-	209.899.818	01 . 54	
01 RM		-	6.665.906	-	-	-	6.665.906	133@	
02 PLN		-	7.615.305	-	-	-	7.615.305	133@	RK 1739NSEA
02 PLN		-	30.473.276	-	-	-	30.473.276	133	RK 1HFQ7GNA
02 PLN		-	2.895.099	-	-	-	2.895.099	133@	RK 1NPBHBMA
02 PLN		-	130.134.203	-	-	-	130.134.203	133	RK 1PF7SCLA
02 PLN		-	10.660.367	-	-	-	10.660.367	140@	PL 1NPBHBMA
09 HLN		-	14.238.560	-	-	-	14.238.560	133	RK 2HUXN2PA
11 HLL		-	4.232.233	-	-	-	4.232.233	140	- 2C7EJQHA
11 HLL		-	2.984.869	-	-	-	2.984.869	140	- 2TCK92FA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6139.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	16.930.976	-	-	-	16.930.976	01 . 54	
01	RM	-	16.930.976	-	-	-	16.930.976	133@	
6139.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	33.078.261	-	-	-	33.078.261	01 . 54	
01	RM	-	33.078.261	-	-	-	33.078.261	133@	
010.06.WA	Program Dukungan Manajemen	52.923.434	77.368.616	3.029.618	-	-	133.321.668		
6111	Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	-	1.586.079	-	-	-	1.586.079		
6111.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.586.079	-	-	-	1.586.079	01 . 54	
01	RM	-	1.586.079	-	-	-	1.586.079	133	
6112	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	-	614.624	-	-	-	614.624		
6112.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	614.624	-	-	-	614.624	01 . 54	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	614.624	-	-	-	614.624	133	
6113	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	52.923.434	72.937.664	3.029.618	-	-	128.890.716		
6113.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	52.923.434	20.752.378	-	-	-	73.675.812	01 . 54	
01 RM		52.923.434	20.752.378	-	-	-	73.675.812	133	
6113.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	160.000	3.029.618	-	-	3.189.618	01 . 54	
01 RM		-	160.000	3.029.618	-	-	3.189.618	133	
6113.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	52.025.286	-	-	-	52.025.286	01 . 54	
01 RM		-	4.179.990	-	-	-	4.179.990	133@	
11 HLL		-	47.845.296	-	-	-	47.845.296	140	- 27YDNA6A
6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	-	1.789.111	-	-	-	1.789.111		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6114.CBT	Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	01 . 54	
01	RM	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000	133	
6114.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	289.111	-	-	-	289.111	01 . 54	
01	RM	-	289.111	-	-	-	289.111	133	
6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	-	441.138	-	-	-	441.138		
6115.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	357.093	-	-	-	357.093	01 . 54	
01	RM	-	357.093	-	-	-	357.093	133	
6115.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	72.845	-	-	-	72.845	01 . 54	
01	RM	-	72.845	-	-	-	72.845	133	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
6115.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	11.200	-	-	-	11.200	01 . 54	
01 RM		-	11.200	-	-	-	11.200	133	
JUMLAH		52.923.434	360.995.604	3.029.618	-	-	416.948.656		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

ttd.
Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE
NIP 196712291993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH													
		RENCANA PENARIKAN DANA	3.570.330	8.525.769	11.113.783	7.602.829	6.356.710	9.848.351	62.763.768	17.972.528	39.688.939	63.665.064	70.958.881	114.881.704	416.948.656
		BELANJA PEGAWAI	3.120.274	3.307.059	6.970.517	3.378.754	3.378.885	6.810.306	3.236.308	3.463.864	3.943.113	4.717.154	5.146.705	5.450.501	52.923.434
		BELANJA BARANG	450.057	5.218.711	4.143.267	2.827.391	2.915.637	3.038.045	59.481.413	14.489.310	35.745.826	58.849.079	65.477.597	108.359.272	360.995.604
		BELANJA MODAL	0	0	0	1.396.684	62.188	0	46.047	19.354	0	98.832	334.580	1.071.932	3.029.618
010.06.CM.1254		Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah	2.613	2.613	31.127	11.083	49.087	93.989	329.719	1.031.573	1.451.699	3.161.358	11.544.310	5.836.912	23.546.083
010.06.CM.6139		52 BELANJA BARANG DAN JASA Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah	2.613	2.613	31.127	11.083	49.087	93.989	329.719	1.031.573	1.451.699	3.161.358	11.544.310	5.836.912	23.546.083
010.06.WA.6111		52 BELANJA BARANG DAN JASA Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	198.544	1.975.923	1.966.226	985.573	1.104.302	1.162.942	12.345.793	11.022.376	31.371.536	52.274.568	50.761.142	94.911.980	260.080.905
010.06.WA.6112		52 BELANJA BARANG DAN JASA Kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus Bidang Pembangunan Daerah	198.544	1.975.923	1.966.226	985.573	1.104.302	1.162.942	12.345.793	11.022.376	31.371.536	52.274.568	50.761.142	94.911.980	260.080.905
010.06.WA.6113		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	0	333.332	0	533.332	333.332	166.666	219.417	1.586.079
010.06.WA.6113		52 BELANJA BARANG DAN JASA Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pembangunan Daerah	0	0	0	0	0	0	333.332	0	533.332	333.332	166.666	219.417	1.586.079
010.06.WA.6113		52 BELANJA BARANG DAN JASA Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	0	25.252	22.052	22.652	27.902	31.602	31.052	148.047	159.626	30.026	60.063	56.350	614.624
010.06.WA.6113		52 BELANJA BARANG DAN JASA Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah	0	25.252	22.052	22.652	27.902	31.602	31.052	148.047	159.626	30.026	60.063	56.350	614.624
		51 BELANJA PEGAWAI	3.120.274	3.307.059	6.970.517	3.378.754	3.378.885	6.810.306	3.236.308	3.463.864	3.943.113	4.717.154	5.146.705	5.450.501	52.923.434
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	248.524	1.681.990	2.080.712	1.760.862	1.676.047	1.701.146	46.385.451	2.221.183	2.175.409	2.970.818	2.865.320	7.170.203	72.937.664

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (039729) DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	1.396.684	62.188	0	46.047	19.354	0	98.832	334.580	1.071.932	3.029.618
	010.06.WA.6114	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pembangunan Daerah	376	1.513.767	14.053	8.505	12.894	12.894	22.360	32.633	19.452	35.027	25.699	91.450	1.789.111
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	376	1.513.767	14.053	8.505	12.894	12.894	22.360	32.633	19.452	35.027	25.699	91.450	1.789.111
	010.06.WA.6115	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pembangunan Daerah	0	19.166	29.097	38.717	45.404	35.472	33.706	33.497	34.771	43.949	54.397	72.960	441.138
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	19.166	29.097	38.717	45.404	35.472	33.706	33.497	34.771	43.949	54.397	72.960	441.138

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

ttd.
Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE
NIP 196712291993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
IV A. B L O K I R**



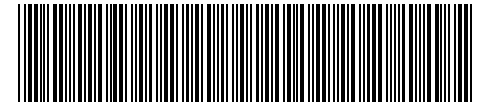
DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [039729] DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
039729	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 58.946.993	522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.600
	52 Belanja Barang Rp. 58.946.993		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
010.06.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.273.946
1254	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
1254.AAG	Peraturan Menteri	524112	Belanja Perjalanan Dinas Tetap(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 210.000
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.449		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.350
1254.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.525	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.920
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
1254.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan	6139	Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.000.000	6139.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.943
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 84.174		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.300
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
IV A. B L O K I R**



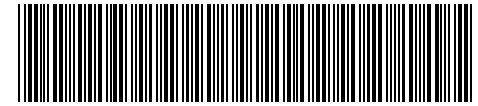
DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [039729] DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
6139.FBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.643	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.723.572
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522141 Belanja Sewa(PLN)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 231.090
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.400	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.958
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.670	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(PLN)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.400
	Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 64.627
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522191 Belanja Jasa Lainnya(PLN)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.445		522191 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 760.020
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.210	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PLN)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.210		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.032.547
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.600	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.600	522131 Belanja Jasa Konsultan(PLN)			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.015.960			
522131 Belanja Jasa Konsultan(PLN)				
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.015.960				
Kebijakan penyesuaian belanja negara				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
IV A. B L O K I R**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [039729] DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6139.PBL	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.100 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.000 Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.590 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 377.600 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.183.539 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.887.468 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.100 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.235.118 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 262.357 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.771 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.403.839 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 383.546 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 809.628 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.700 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
IV A. B L O K I R**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [039729] DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6139.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	010.06.WA 6113 6113.EBD	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.523.992 Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 607.274 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.834.760 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.800 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Program Dukungan Manajemen Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pembangunan Daerah
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.587.705 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Layanan Manajemen Kinerja Internal
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 558.625 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 660.631 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 958.724 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.944.227 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.410 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

ttd.
Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE
NIP 196712291993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.06.1.039729/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:0421-2851-4921-2366

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [039729] DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

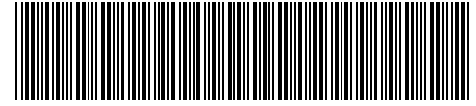
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah

ttd.
Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE
NIP 196712291993031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.07.1.621892/2025**



DS:9009-1924-4028-8200

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 13

Tanggal : 18 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
- Sebesar : Rp. 95.199.015.000 (SEMBILAN PULUH LIMA MILIAR SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	95.199.015.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 95.199.015.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025



DS:9009-1924-4028-8200

Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	95.199.015.000
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	Rp.	27.400.000.000
01.03	PELAYANAN UMUM	Rp.	67.799.015.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025



DS:9009-1924-4028-8200

Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH

CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	27.400.000.000
CM.1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	Rp.	9.000.000.000
CM.1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Rp.	3.800.000.000
CM.3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	Rp.	5.000.000.000
CM.6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	Rp.	9.600.000.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	67.799.015.000
WA.6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	Rp.	1.180.891.000
WA.6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	Rp.	64.843.522.000
WA.6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	Rp.	256.000.000
WA.6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	Rp.	1.518.602.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : I A. 1

Program	:	010.07.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa			27.400.000.000
Kegiatan	:	1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa			9.000.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa di DOB yang disusun			
		2. 02	Jumlah Daerah yang difasilitasi Dalam Penguatan Kapasitas dan Kinerja Daerah Bersifat Kekhususan dan Keistimewaan			
		3. 03	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Terkait Penataan Daerah yang disusun			
		4. 04	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Daerah Asimetris yang disusun			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1259.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	4,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.000.000.000
Rincian Output	:	01 PBL.001	Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian sengketa di DOB	4.00	Rekomendasi Kebijakan	3.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1259.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	10,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	6.000.000.000
Rincian Output	:	01 UBA.001	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penguatan Kapasitas dan Kinerja Daerah Bersifat Kekhususan dan Keistimewaan	10.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	6.000.000.000
Kegiatan	:	1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			3.800.000.000
	:	1. 01	Jumlah Permendagri Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah yang disusun			
		2. 02	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola			
		3. 03	Jumlah Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)			
		4. 04	Jumlah Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah (EPPD)			
		5. 05	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Provinsi Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang disusun			
		6. 06	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kab/Kota Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang disusun			
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1261.AAG	Peraturan Menteri	1,00	PerMen, Perka, RPermen	76.264.000
Rincian Output	:	01 AAG.001	Permendagri Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 terkait Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah	1.00	PerMen	76.264.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : I A. 2

Peraturan Menteri

PerMen, Perka, RPermen

Klasifikasi Rincian Output	4	:	1261.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	234.290.000
Rincian Output		:	01 ABL.001	Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Provinsi Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	173.957.000
		:	02 ABL.002	Rekomendasi Peningkatan Kapasitas Kab/Kota Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	60.333.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	1261.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1,00	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	709.900.000
Rincian Output		:	01 FAB.001	Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	1,00	Sistem Informasi	709.900.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	1261.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	250,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	2.779.546.000
Rincian Output		:	01 FBA.001	Provinsi yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	16,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.529.810.000
		:	02 FBA.002	Kabupaten/kota yang berkinerja tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD)	234,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	249.736.000
Kegiatan		:	3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa			5.000.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perizinan di daerah yang disusun			
		:	2. 02	Jumlah Database Peraturan Daerah yang terintegrasi			
		:	3. 03	Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kualitas Rancangan Perda dan Perkada yang telah sesuai dengan hasil review Kemendagri			
		:	4. 04	Jumlah Daerah yang memiliki Skor Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Perda berkategori Sangat Baik			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	7	:	3991.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.000.000.000
Rincian Output		:	01 PBL.001	Rekomendasi simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perizinan di daerah	(PN)	2,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	3991.QMA	Data dan Informasi Publik		1,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.000.000.000
Rincian Output		:	01 QMA.001	Database Peraturan Daerah yang terintegrasi	(PN)	1,00	Data	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	3991.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		53,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	3.000.000.000
Rincian Output		:	01 UBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam penguatan kualitas Rancangan Perda dan Perkada yang telah sesuai dengan hasil review Kemendagri	(PN)	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.000.000.000
Rincian Output		:	02 UBA.002	Daerah yang memiliki Skor Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Perda berkategori Sangat Baik	(PN)	15,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000
Kegiatan		:	6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah				9.600.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah Asosiasi Pemerintahan Daerah dan DPRD yang optimal				
		:	2. 01	Jumlah Surat Keputusan tentang Indeks Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah yang disusun				
		:	3. 02	Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam Penyelesaian permasalahan KDH dan DPRD dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah				
		:	4. 02	Jumlah Daerah yang memiliki skor Indeks Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah dengan kategori Baik				
		:	5. 03	Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam Penyelesaian permasalahan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah				
		:	6. 03	Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian Administrasi Pemberhentian dan Pensiun KDH serta PAW Anggota DPRD				
		:	7. 04	Jumlah Daerah yang Kepala Daerah dan DPRD-nya yang menyampaikan LKPJ dan rekomendasi LKPJ tepat waktu				
		:	8. 04	Jumlah Daerah yang dilakukan pembinaan netralitas ASN pasca pilkada serentak				
		:	9. 05	Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi KDH dan DPRD				
		:	10. 05	Jumlah Sistem Informasi yang dikelola				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH

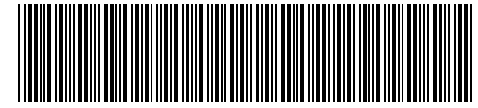
Halaman : I A. 4

Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah

- 11. 06 Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam Penyelesaian hasil Pilkada serentak 2024
- 12. 06 Jumlah Rekomendasi kebijakan penguatan manajemen ASN daerah dalam rangka Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 13. 07 Jumlah kebijakan di bidang pembinaan kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- 14. 07 Jumlah Daerah yang di Evaluasi Efektivitas Perangkat Daerah berdasarkan PP Perangkat Daerah eksisting
- 15. 08 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang disusun

Klasifikasi Rincian Output	10	:	6140.AAH	Peraturan lainnya	1,00	peraturan, Rancangan Peraturan, Surat Keputusan	358.300.000
Rincian Output		:	01	AAH.001	1,00	Surat Keputusan	358.300.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	6140.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1,00	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	160.000.000
Rincian Output		:	01	FAB.001	1,00	Sistem Informasi	160.000.000
Klasifikasi Rincian Output	12	:	6140.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	7,00	Lembaga, KL, Pemda, Unit Kerja	600.000.000
Rincian Output		:	01	FAI.001	7,00	Lembaga	600.000.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	6140.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	428,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	4.481.700.000
Rincian Output		:	01	FBA.001	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.081.700.000
		:	02	FBA.002	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	750.000.000
		:	03	FBA.003	200,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	600.000.000
		:	04	FBA.004	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	564.876.000
		:	05	FBA.005	38,00	Provinsi	285.124.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



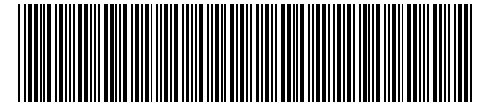
DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : I A. 5

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah			Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota		
		KDH dan DPRD	38.00	Provinsi	
06	FBA.006	Daerah yang difasilitasi dalam Penyelesaian hasil Pilkada serentak 2024	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	700.000.000
07	FBA.007	Netralitas ASN di daerah pasca pilkada serentak	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14	6140.PBL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.800.000.000
Rincian Output	01	PBL.001 Rekomendasi kebijakan penguatan manajemen ASN daerah dalam rangka Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	800.000.000
	02	PBL.002 Rekomendasi Kebijakan Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	2.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	15	6140.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	1.200.000.000
Rincian Output	01	UBA.001 Evaluasi Efektivitas Perangkat Daerah berdasarkan PP Perangkat Daerah eksisting	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.200.000.000
Program	010.07.WA	Program Dukungan Manajemen			67.799.015.000
Kegiatan	6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah			1.180.891.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun			
Klasifikasi Rincian Output	1	6116.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.180.891.000
Rincian Output	01	EBA.957 Layanan Hukum	1,00	Layanan	1.180.891.000
Kegiatan	6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah			64.843.522.000
	1. 01	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran yang disusun			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : I A. 6

Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah

- 2. 02 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP
- 3. 03 Jumlah Dokumen verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- 4. 04 Jumlah Layanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan
- 5. 05 Jumlah Layanan Penyelesaian Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat Waktu
- 6. 06 Jumlah Dokumen Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Ditjen Otda
- 7. 07 Jumlah Unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan
- 8. 08 Jumlah data/informasi lingkup Ditjen Otda yang terstruktur menuju e-Database Kementerian Dalam Negeri

Klasifikasi Rincian Output	2	:	6117.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	15,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	59.662.009.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1,00	Layanan	139.000.000
		:	02	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	2.770.000.000
		:	03	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	523.648.000
		:	04	EBA.994 Layanan Perkantoran	12,00	Layanan	56.229.361.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6117.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket	1.032.285.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	1,00	Unit	1.032.285.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6117.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	5,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	4.149.228.000
Rincian Output		:	01	EBD.001 Layanan Koordinasi dan Konsolidasi Rencana Program dan Kegiatan Lingkup Ditjen Otonomi Daerah	1,00	Dokumen	994.550.000
		:	02	EBD.002 Layanan penyusunan LAKIN Satker Eselon I tanpa satker vertikal	1,00	Dokumen	17.300.000
		:	03	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	447.548.000
		:	04	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	239.830.000
		:	05	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	2.450.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : I A. 7

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Dokumen, Layanan, Laporan,
Rekomendasi

Kegiatan	: 6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah			256.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik dan Pengaduan Masyarakat Lingkup Ditjen Otonomi Daerah			
Klasifikasi Rincian Output 5	: 6118.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	256.000.000
Rincian Output	: 01 EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,00	Layanan	256.000.000
Kegiatan	: 6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah			1.518.602.000
	: 1. 01	Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Otonomi Daerah			
	: 2. 02	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Otonomi Daerah			
Klasifikasi Rincian Output 6	: 6119.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	802.487.000
Rincian Output	: 01 EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	802.487.000
Klasifikasi Rincian Output 7	: 6119.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	270,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	716.115.000
Rincian Output	: 01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	270,00	Orang	716.115.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

ttd.
AKMAL MALIK
NIP. 197003161991011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025**



DS:9009-1924-4028-8200

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : I B. 1

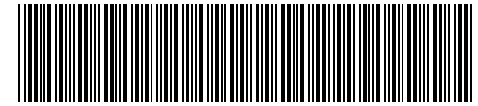
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	95.199.015.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	95.199.015.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



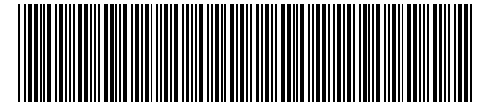
DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
621892	DITJEN OTONOMI DAERAH	44.489.693	48.847.287	1.862.035	-	-	95.199.015		
010.07.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	-	26.455.000	945.000	-	-	27.400.000		
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	-	9.000.000	-	-	-	9.000.000		
1259.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	01 . 51	
01	RM	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	133@	
1259.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	01 . 51	
01	RM	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	133@	
1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	3.100.000	700.000	-	-	3.800.000		
1261.AAG	Peraturan Menteri (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	76.264	-	-	-	76.264	01 . 51	
01	RM	-	76.264	-	-	-	76.264	133@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1261.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	234.290	-	-	-	234.290	01 . 51	
01	RM	-	234.290	-	-	-	234.290	133@	
1261.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	9.900	700.000	-	-	709.900	01 . 51	
01	RM	-	9.900	700.000	-	-	709.900	133@	
1261.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.779.546	-	-	-	2.779.546	01 . 51	
01	RM	-	2.779.546	-	-	-	2.779.546	133@	
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	-	4.880.000	120.000	-	-	5.000.000		
3991.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 51	
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	133@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



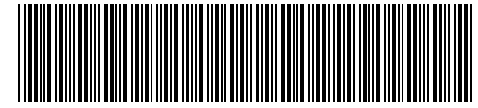
DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3991.QMA	Data dan Informasi Publik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	880.000	120.000	-	-	1.000.000	01 . 51	
01	RM	-	880.000	120.000	-	-	1.000.000	133@	
3991.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	01 . 51	
01	RM	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	133@	
6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	-	9.475.000	125.000	-	-	9.600.000		
6140.AAH	Peraturan lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	358.300	-	-	-	358.300	01 . 51	
01	RM	-	358.300	-	-	-	358.300	133@	
6140.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	35.000	125.000	-	-	160.000	01 . 51	
01	RM	-	35.000	125.000	-	-	160.000	133@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



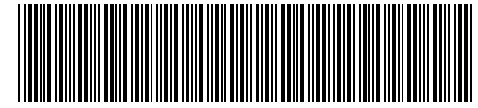
DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6140.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	600.000	-	-	-	600.000	01 . 51	
01	RM	-	600.000	-	-	-	600.000	133@	
6140.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.481.700	-	-	-	4.481.700	01 . 51	
01	RM	-	4.481.700	-	-	-	4.481.700	133@	
6140.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	01 . 51	
01	RM	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000	133@	
6140.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	01 . 51	
01	RM	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000	133@	
010.07.WA	Program Dukungan Manajemen	44.489.693	22.392.287	917.035	-	-	67.799.015		
6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	-	1.180.891	-	-	-	1.180.891		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6116.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.180.891	-	-	-	1.180.891	01 . 51	
01 RM		-	1.180.891	-	-	-	1.180.891	133@	
6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	44.489.693	19.436.794	917.035	-	-	64.843.522		
6117.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	44.489.693	15.172.316	-	-	-	59.662.009	01 . 51	
01 RM		44.489.693	15.172.316	-	-	-	59.662.009	133@	
6117.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	115.250	917.035	-	-	1.032.285	01 . 51	
01 RM		-	115.250	917.035	-	-	1.032.285	133@	
6117.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.149.228	-	-	-	4.149.228	01 . 51	
01 RM		-	4.149.228	-	-	-	4.149.228	133@	
6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	-	256.000	-	-	-	256.000		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6118.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	256.000	-	-	-	256.000	01 . 51	
01 RM		-	256.000	-	-	-	256.000	133@	
6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	-	1.518.602	-	-	-	1.518.602		
6119.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	802.487	-	-	-	802.487	01 . 51	
01 RM		-	802.487	-	-	-	802.487	133@	
6119.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	716.115	-	-	-	716.115	01 . 51	
01 RM		-	716.115	-	-	-	716.115	133@	
JUMLAH		44.489.693	48.847.287	1.862.035	-	-	95.199.015		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

ttd.
AKMAL MALIK
NIP. 197003161991011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	621892	DITJEN OTONOMI DAERAH													
		RENCANA PENARIKAN DANA	4.541.015	4.196.134	8.790.972	4.332.517	4.455.797	8.146.871	4.295.754	4.881.156	5.707.616	6.759.589	6.704.748	32.386.844	95.199.015
		BELANJA PEGAWAI	2.334.424	2.766.950	6.226.527	2.968.343	2.946.409	6.141.116	2.985.772	2.992.467	3.724.044	3.718.643	3.683.869	4.001.131	44.489.693
		BELANJA BARANG	2.206.591	1.429.184	2.564.446	1.364.175	1.509.388	2.005.756	1.309.982	1.858.024	1.969.683	3.025.646	3.020.879	26.583.533	48.847.287
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	30.666	13.889	15.300	0	1.802.180	1.862.035
	010.07.CM.1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa	1.560	293.748	419.326	242.452	289.453	525.934	257.601	437.251	466.367	691.315	803.085	4.571.909	9.000.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.560	293.748	419.326	242.452	289.453	525.934	257.601	437.251	466.367	691.315	803.085	4.571.909	9.000.000
	010.07.CM.1261	Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0	1.894	81.282	165.236	68.204	156.261	74.243	158.719	83.951	171.403	107.454	2.731.350	3.800.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	1.894	81.282	165.236	68.204	156.261	74.243	158.719	83.951	171.403	107.454	2.031.350	3.100.000
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
	010.07.CM.3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa	0	0	222.524	50.524	143.504	219.671	103.081	298.748	254.698	232.803	623.956	2.850.493	5.000.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	222.524	50.524	143.504	219.671	103.081	298.748	254.698	232.803	623.956	2.730.493	4.880.000
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	010.07.CM.6140	Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah	0	67.461	189.724	144.592	96.568	168.324	165.118	104.552	287.423	909.209	731.272	6.735.758	9.600.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	67.461	189.724	144.592	96.568	168.324	165.118	104.552	287.423	909.209	731.272	6.610.758	9.475.000
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000
	010.07.WA.6116	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah	20.830	35.906	70.826	142.204	4.860	2.430	53.030	2.430	0	0	0	848.375	1.180.891
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	20.830	35.906	70.826	142.204	4.860	2.430	53.030	2.430	0	0	0	848.375	1.180.891

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (07) Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (621892) DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	010.07.WA.6117	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah	4.501.545	3.746.899	7.755.065	3.563.192	3.846.991	7.065.343	3.597.681	3.877.758	4.615.178	4.746.159	4.324.889	13.202.822	64.843.522
		51 BELANJA PEGAWAI	2.334.424	2.766.950	6.226.527	2.968.343	2.946.409	6.141.116	2.985.772	2.992.467	3.724.044	3.718.643	3.683.869	4.001.131	44.489.693
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	2.167.121	979.950	1.528.538	594.849	900.582	924.227	611.910	854.625	877.245	1.012.216	641.021	8.344.511	19.436.794
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	30.666	13.889	15.300	0	857.180	917.035
	010.07.WA.6118	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah	17.080	0	52.225	0	0	7.379	0	0	0	8.700	6.000	164.616	256.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	17.080	0	52.225	0	0	7.379	0	0	0	8.700	6.000	164.616	256.000
	010.07.WA.6119	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah	0	50.226	0	24.318	6.216	1.530	45.000	1.700	0	0	108.092	1.281.520	1.518.602
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	50.226	0	24.318	6.216	1.530	45.000	1.700	0	0	108.092	1.281.520	1.518.602

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

ttd.
AKMAL MALIK
NIP. 197003161991011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [621892] DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
621892	DITJEN OTONOMI DAERAH		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 23.716.218		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.600
	52 Belanja Barang Rp. 21.914.183		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	53 Belanja Modal Rp. 1.802.035		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
010.07.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
1259	Fasilitasi Penataan daerah, otonomi khusus/istimewa		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 223.077
1259.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)	521211	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 111.698		521211 Belanja Bahan(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.621
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Relaksasi
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.600		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 180.100
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 153.700		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
	efisiensi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 150.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 339.721		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 148.861
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 588.203		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 204.075
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [621892] DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
1261	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 142.700 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	1261.FAB	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 68.183 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
1261.AAG	Peraturan Menteri	1261.FAB	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.484 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.200 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
1261.ABL	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	1261.FBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Sistem Informasi Pemerintahan
1261.ABL	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	1261.FBA	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.600 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.520 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
1261.ABL	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.120 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	1261.FBA	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.300 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
1261.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	1261.FBA	536111 Belanja Modal Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 700.000 Efisiensi Inpres 1/2025
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.365 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
1261.ABL	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	1261.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.240 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.680 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.825

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [621892] DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.500
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.240		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 89.179
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 504.800
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 333.686	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 340.083
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		efisiensi anggaran
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 319.032	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 319.032
3991	Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Desa		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
3991.PBL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521211	Belanja Bahan(RM)	522141	Belanja Sewa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.500
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
522131	Belanja Jasa Konsultan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.800
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.000		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 65.843
			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
IV A. B L O K I R**



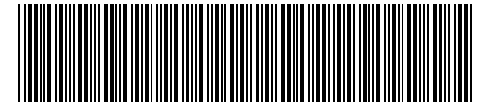
DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [621892] DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
3991.UBA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 180.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	6140 6140.AAH	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 589.620 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Pembinaan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 223.057 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 536111 Belanja Modal Lainnya(RM)		Peraturan lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.300 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.360 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.680 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 76.806 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 162.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.408 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 69.300 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Sistem Informasi Pemerintahan
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 452.403 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.945 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 125.000 Efisiensi Inpres 1/2025

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
IV A. B L O K I R**



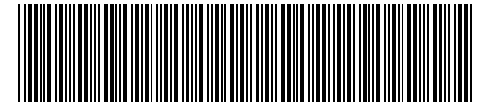
DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [621892] DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6140.FAI	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6140.PBL	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.990		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 99.168
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 662.770
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 37.860		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.100		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 192.002	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.226.863		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.400	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	521211 Belanja Bahan(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 161.000	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 161.175		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
6140.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)		
521211 Belanja Bahan(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 521.380		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 684.743	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.000		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 99.615			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
IV A. B L O K I R**



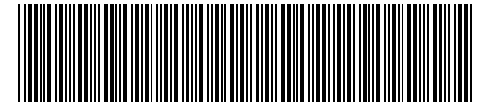
DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [621892] DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6140.UBA	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	010.07.WA 6116 6116.EBA	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 371.363		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 418.141
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Program Dukungan Manajemen
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 257.370		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Otonomi Daerah
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM)
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 149.650
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 448.698		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)
6140.UBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 180.000		
521211 Belanja Bahan(RM)	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.970	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.480		
522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.920	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 73.451		
522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 66.363	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 87.557		
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 274.034	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [621892] DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : IV.A. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN
6117 6117.EBA	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.700 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522112 Belanja Langganan Telepon(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 309.950 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	6117 Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Otonomi Daerah			523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 413.910 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Layanan Dukungan Manajemen Internal			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.066.415 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 614.593 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 162.690 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.640 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 266.200 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 434.122 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			6117.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 115.250 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 585.518 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.240 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [621892] DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : IV.A. 8
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6117.EBD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6119 6119.EBA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.000
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 857.035		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.000
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 962.347		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 56.500
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Otonomi Daerah		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 163.440	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211 Belanja Bahan(RM)		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 134.245		
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 674.697	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 32.200		
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 62.715	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.885		
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 777.608	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.675		
6118 6118.EBA	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Otonomi Daerah		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Layanan Dukungan Manajemen Internal			
522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [621892] DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : IV.A. 9
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6119.EBC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 338.400		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Layanan Manajemen SDM Internal		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.300		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.000		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 172.215			
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.000			
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 162.100			
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)			
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 134.500			
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

ttd.
AKMAL MALIK
NIP. 197003161991011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.07.1.621892/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:9009-1924-4028-8200

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [07] Ditjen Otonomi Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [621892] DITJEN OTONOMI DAERAH

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

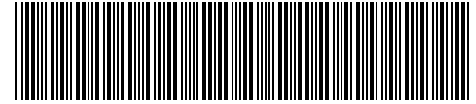
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

ttd.
AKMAL MALIK
NIP. 197003161991011001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.08.1.634082/2025**



DS:4096-9303-3063-5101

Revisi ke 17

Tanggal : 16 Desember 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- Sebesar : Rp. 2.001.814.306.000 (DUA TRILIUN SATU MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT BELAS JUTA TIGA RATUS ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 01 PELAYANAN UMUM
01.03 PELAYANAN UMUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	734.271.618.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	152.524.460.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	1.072.864.748.000	5. Hibah Langsung	Rp.	42.153.480.000
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	1.072.864.748.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	42.153.480.000
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 2.001.814.306.000

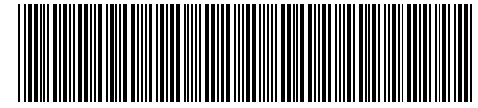
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025

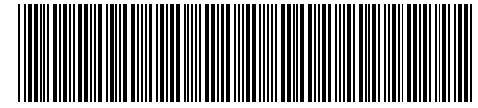


DS:4096-9303-3063-5101

Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

CP	Program Tata Kelola Kependudukan	Rp.	1.917.921.124.000
CP.1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan	Rp.	548.693.367.000
CP.1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	Rp.	271.119.430.000
CP.1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Rp.	25.243.579.000
CP.6997	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital	Rp.	1.072.864.748.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	83.893.182.000
WA.6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp.	1.231.369.000
WA.6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp.	74.150.071.000
WA.6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp.	1.009.769.000
WA.6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp.	7.501.973.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : I A. 1

Program	: 010.08.CP	Program Tata Kelola Kependudukan	1.917.921.124.000
Kegiatan	: 1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan	548.693.367.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah Kab/Kota yang terpenuhi Sarpras database kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) nasional secara online	
	: 2. 02	Persentase Kab/Kota terlayani dgn konfigurasi SIAK Terpusat	
	: 3. 03	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana SIAK	
	: 4. 04	Jumlah Data Recovery Center yang dioperasionalisasi dan dikelola	
	: 5. 05	Persentase sarana dan prasarana SIAK yang diremajakan	
	: 6. 06	Jumlah data center dioperasionalisasi dan dikelola	
	: 7. 07	Jumlah daerah yang mengoperasionalisasi, mengelola dan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana SIAK	
	: 8. 08	Jumlah daerah yang mengoperasionali-sasi, mengelola dan melakukan pemenuhan sarana dan prasarana UPIK Kalibata	
	: 9. 09	Jumlah daerah yang database kependudukan tersambung Jaringan Komunikasi Data secara nasional	
	: 10. 10	Jumlah Kab/Kota yang terpenuhi operasionalisasi SIAK dan Pengelolaan database kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) nasional secara online	
	: 11. 11	Jumlah daerah yang terlayani pengelolaan KTP-el berbasis NIK dan Biometrik	
	: 12. 12	Jumlah database kependudukan yang update	
	: 13. 13	Persentase pemenuhan Sarpras DC di Ibu Kota Negara Baru (IKN)Terbangun	
	: 14. 14	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik	
	: 15. 15	Jumlah Eksternal Sistem yang terkoneksi dengan SIAK	
	: 16. 16	Jumlah sistem Pengamanan dan Pengendalian Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	
	: 17. 17	Jumlah lembaga pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	
	: 18. 18	Integrasi dan Operasionalisasi SIAK ke Portal Luar Negeri	
	: 19. 19	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan di Daerah	
	: 20. 20	Jumlah lembaga pengguna daerah yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	1	:	1268.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2.660,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	6.866.055.000
Rincian Output		:	01	BDB.001 Fasilitasi Data Kependudukan Nasional	1000.00	Lembaga	2.509.461.000
		:	02	BDB.002 Fasilitasi Data Kependudukan Daerah	300.00	Lembaga	649.345.000
		:	03	BDB.003 Fasilitasi Data Balikan Nasional	1000.00	Lembaga	2.198.609.000
		:	04	BDB.004 Fasilitasi Data Balikan Daerah	300.00	Lembaga	399.902.000
		:	05	BDB.005 Lembaga yang difasilitasi dalam Integrasi data kependudukan Nasional	60.00	Lembaga	1.108.738.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1268.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,00	Unit	126.314.508.000
Rincian Output		:	01	CAN.001 Sarpras SIAK serta DC dan DRC Kependudukan	3,00	Unit	126.314.508.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1268.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	3,00	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	198.446.215.000
Rincian Output		:	01	FAB.001 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1,00	Sistem Informasi	164.336.743.000
		:	02	FAB.002 Sistem Informasi Integrasi Data dan Dokumen Kependudukan Nasional	1,00	Sistem Informasi	33.938.472.000
		:	03	FAB.003 Sistem Informasi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,00	Sistem Informasi	171.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1268.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	552,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	204.393.449.000
Rincian Output		:	01	FBA.001 Daerah yang difasilitasi dalam Layanan Jaringan Komunikasi Data secara Online	552.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	204.393.449.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	1268.QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	1.300,00	Lembaga, Unit Kerja, Hektar, Bidang	12.673.140.000
Rincian Output		:	01	QAB.001 Pelayanan Koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional (PN)	1300.00	Lembaga	12.673.140.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



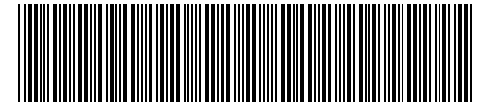
DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : I A. 3

Kegiatan	:	1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan				271.119.430.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pelayanan pencatatan kelahiran secara online				
		2. 02	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahira pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun				
		3. 03	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan				
		4. 04	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan				
		5. 05	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianya dilaporkan				
		6. 06	Presentase Data Perubahan Status Kewarganegaraan (WNI menjadi WNA, WNA menjadi WNI dan Anak Berkewarganegaraan Ganda) sesuai dengan yang dilaporkan				
		7. 07	Jumlah daerah yang melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk perluasan jangkauan layanan pencatatan perkawinan				
		8. 08	Jumlah keping Blangko KTP-el untuk daerah yang dipenuhi				
Klasifikasi Rincian Output	6	:	1269.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	26.140.000,00	Orang, Akta, Keping, Bidang		266.763.330.000
Rincian Output	:	01	BAA.001 Blangko KTP-el untuk daerah	26140000.00	Keping		266.763.330.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	1269.PBM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian		1.000.000.000
Rincian Output	:	01	PBM.001 Rekomendasi Kebijakan masukan Revisi undang - undang Nomor (PN) 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan	1.00	Rekomendasi Kebijakan		1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	1269.QAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	989.500,00	Orang, Akta, Keping, Bidang		3.356.100.000
Rincian Output	:	01	QAA.001 Akta Kematian yang diterbitkan (PN)	400000.00	Akta		594.500.000
		02	QAA.002 Akta Perkawinan yang diterbitkan	35000.00	Akta		832.000.000
		03	QAA.003 Akta Perceraian yang diterbitkan	4500.00	Akta		832.000.000
		04	QAA.004 Akta Kelahiran yang diterbitkan	550000.00	Akta		1.097.600.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



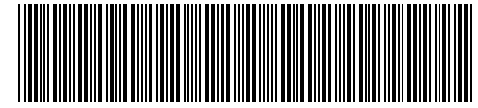
DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : I A. 4

Kegiatan	: 1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	25.243.579.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah Kebijakan/ Pedoman/Juknis Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2. 02	Jumlah perguruan tinggi yang melakukan kerjasama Pengembangan SDM dengan Ditjen Dukcapil	
	3. 03	Jumlah daerah yang melakukan inventarisasi aset dukcapil di daerah	
	4. 04	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola adminduk di daerah	
	5. 05	Persentase ADB pengelola SIAK Berstatus ASN	
	6. 06	Persentase Operator pengelola SIAK Berstatus ASN	
	7. 07	Jumlah daerah yang melaksanakan Koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terkait Aparatur Penyelenggaran Adminduk	
	8. 08	Jumlah daerah yang melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan adminduk daerah sesuai undang-undang adminduk	
	9. 09	Jumlah daerah yang dievaluasi dan dinilai kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan adminduk daerah sesuai undang-undang adminduk	
	10. 10	Jumlah daerah yang menerapkan aplikasi database pejabat dukcapil secara online dan mengelola Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dan Operator SIAK	
	11. 11	Jumlah OPD Dukcapil yang mendapatkan pembinaan zona Integritas	
	12. 12	Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelayanan SIAK	
	13. 13	Jumlah inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
	14. 14	Jumlah daerah yang melaksanakan perluasan jangkauan pelayanan pencatatan sipil berbasis teknologi berbasis lintas sektor	
	15. 15	Jumlah daerah yang melaksanakan pendokumentasian bidang pencatatan sipil sesuai ketentuan	
	16. 16	Jumlah Kebijakan/ Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk	
	17. 17	Persentase Penduduk rentan yang terselesaikan pengurusan dokumen	
	18. 18	Jumlah Perwakilan RI yang melaksanakan pendataan WNI yang memiliki SKPLN	
	19. 19	Persentase Penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk	
	20. 20	Persentase penerbitan identitas bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME	
	21. 21	Jumlah daerah yang menerbitkan dokumen kependudukan bagi petugas khusus sesuai ketentuan	
	22. 22	Persentase penerbitan identitas bagi penduduk rentan	
	23. 23	Persentase daerah yang melakukan pelayanan adminduk secara daring melalui Kios Layanan Dukcapil Mandiri atau Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

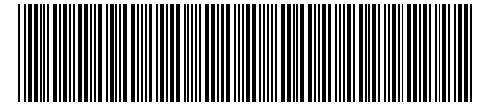
Halaman : I A. 5

Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

24.	24	Jumlah daerah melakukan pendataan penduduk non permanen			
25.	25	Jumlah daerah yang melayani perpindahan penduduk dari penduduk non permanen menjadi penduduk permanen			
26.	26	Jumlah daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk sesuai ketentuan			
27.	27	Jumlah daerah yang melaksanakan korespondensi kedinasan secara elektronik			
28.	28	Jumlah Kebijakan/ Pedoman/Juknis Pedoman pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan			
29.	29	Daerah di Wilayah 3T yang mendapatkan peningkatan layanan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil yang mudah dan inovatif			
30.	30	Jumlah Kebijakan/ Pedoman/Juknis Pedoman pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Daerah			

Klasifikasi Rincian Output	9	:	1271.AAG	Peraturan Menteri	1,00	PerMen, Perka, RPermen	200.000.000
Rincian Output	01	:	AAG.001	Peraturan Menteri tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	1.00	PerMen	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	1271.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.726,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	21.632.538.000
Rincian Output	01	:	FBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	552.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	11.173.867.000
	02	:	FBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	70.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000.000
	03	:	FBA.003	Daerah yang difasilitasi dalam Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil	552.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	5.309.438.000
	04	:	FBA.005	Daerah yang difasilitasi dalam Integrasi data kependudukan Daerah	552.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.649.233.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	1271.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	45,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	3.411.041.000
Rincian Output	01	:	UBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) secara inklusif	5.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	911.041.000
	02	:	UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam Pembentukan Data Kelahiran dan Kematian yang Terintegrasi Antar Lembaga	40.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.500.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



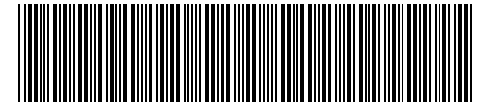
DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : I A. 6

Kegiatan	:	6997	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital			1.072.864.748.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah daerah yang kinerja layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meningkat			
		2. 02	Jumlah sapras infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dukcapil yang ditingkatkan			
		3. 03	Jumlah sistem e-KYC dan Digital ID yang ditingkatkan			
		4. 04	Jumlah Lembaga pengguna yang memanfaatkan dan mengadopsi e-KYC dan Digital ID			
		5. 05	Jumlah Daerah yang ditingkatkan dan dikembangkan kapasitas kelembagaannya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan			
		6. 06	Jumlah Aparatur dukcapil yang ditingkatkan kapasitas sumber daya manusiannya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan			
Klasifikasi Rincian Output	12	:	6997.ABM Kebijakan Bidang Pelayanan Publik	8,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	18.410.077.000
Rincian Output	:	01	ABM.001 Rekomendasi Standarisasi peralatan pelayanan adminduk	1,00	Rekomendasi Kebijakan	711.197.000
		02	ABM.002 Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk	1,00	Rekomendasi Kebijakan	870.000.000
		03	ABM.003 Rekomendasi Penegakan Hukum Penyelenggaraan Adminduk	1,00	Rekomendasi Kebijakan	750.000.000
		04	ABM.004 Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Adminduk	2,00	Rekomendasi Kebijakan	12.148.880.000
		05	ABM.005 Grand Desain Penyelenggaraan Adminduk	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.550.000.000
		06	ABM.006 Inisiatif Srategis Administrasi Kependudukan Pemerintah Daerah	2,00	Rekomendasi Kebijakan	2.380.000.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	6997.AEH Promosi	1,00	promosi, Kegiatan	1.152.000.000
Rincian Output	:	01	AEH.001 Promosi interoperabilitas dan pengakuan ID digital skala nasional maupun internasional	1,00	Kegiatan	1.152.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	6997.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	30.320.475.000
Rincian Output	:	01	AFA.001 Standar autentikasi biometrik dan teknologi deduplikasi adminduk	1,00	NSPK	2.929.990.000
		02	AFA.002 Roadmap Pengembangan Aplikasi ID Digital dan e-KYC	2,00	NSPK	9.770.000.000
		03	AFA.003 Roadmap pengadaan infrastruktur TIK dan informasi serta keamanan siber	1,00	NSPK	11.291.460.000
		04	AFA.004 Pedoman teknis pemanfaatan data untuk mendukung lembaga	1,00	NSPK	6.329.025.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

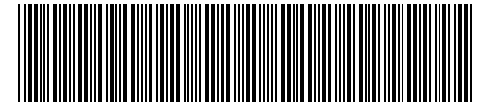
Halaman : I A. 7

Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
pengguna berintegrasi dengan layanan Dukcapil

NSPK, Rancangan Standar, Pedoman,
Standar
1.00 NSPK

Klasifikasi Rincian Output	15	:	6997.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	36.101.995.000
Rincian Output		:	01	BAH.001 Dukungan Manajemen PMU ID Digital	1,00	layanan	36.101.995.000
Klasifikasi Rincian Output	16	:	6997.BMB	Komunikasi Publik	1,00	layanan, kegiatan, Media, Orang, Volume	35.754.000.000
Rincian Output		:	01	BMB.002 Rebranding Dukcapil	1,00	layanan	35.754.000.000
Klasifikasi Rincian Output	17	:	6997.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	422,00	Unit	457.382.212.000
Rincian Output		:	01	CAN.001 Sarana dan Prasarana Pelayanan Adminduk	180,00	Unit	16.807.158.000
		:	02	CAN.003 Perangkat dan Jaringan Layanan Adminduk di daerah perbatasan dan 3T (terluar, terisolasi, tertinggal)	43,00	Unit	9.230.820.000
		:	03	CAN.004 Sarana dan Prasarana Digitalisasi Dokumen Kependudukan	40,00	Unit	3.850.000.000
		:	04	CAN.005 Penguatan Infrastruktur TIK Dukcapil	159,00	Unit	427.494.234.000
Klasifikasi Rincian Output	18	:	6997.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	12,00	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	193.424.085.000
Rincian Output		:	01	FAB.002 Sistem Informasi Notifikasi Otomatis antara Layanan Adminduk dan Layanan Eksternal	1,00	Sistem Informasi	11.750.000.000
		:	02	FAB.004 Command center, dan peningkatan keamanan informasi dan siber Dukcapil	2,00	Sistem Informasi	30.810.860.000
		:	03	FAB.006 Sistem baru dan implementasi proses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, e-KYC dan ID digital, serta pengelolaan lembaga pengguna	3,00	Sistem Informasi	30.359.675.000
		:	04	FAB.007 Tanda tangan elektronik dan standarisasi data alamat	2,00	Sistem Informasi	54.800.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : I A. 8

Sistem Informasi Pemerintahan

Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan

05	FAB.008	Platform untuk berbagi dan pertukaran data Dukcapil	2.00	Sistem Informasi	43.000.000.000
06	FAB.009	Sistem Informasi Pemanfaatan Data Kependudukan Daerah	1.00	Sistem Informasi	6.000.000.000
07	FAB.010	Sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM)	1.00	Sistem Informasi	16.703.550.000

Klasifikasi Rincian Output 19 : 6997.FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara 4.252,00 Orang, KL, Daerah, Unit Kerja 89.401.599.000

Rincian Output	: 01	FAC.002	Peningkatan Kapasitas Aparatur untuk Sertifikasi dan Pelatihan ISO	2400.00	Orang	5.000.000.000
		02	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam penyelenggaraan layanan adminduk	1200.00	Orang	16.462.218.000
		03	Peningkatan Kapasitas Aparatur Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil	652.00	Orang	67.939.381.000

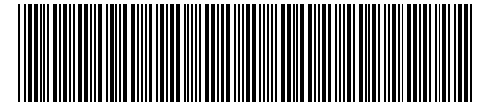
Klasifikasi Rincian Output 20 : 6997.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 1.119,00 Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, KabKota 101.466.328.000

Rincian Output	: 01	FBA.001	Daerah yang difasilitasi dalam Pendaftaran Penduduk melalui layanan jemput bola di daerah 12 Provinsi dengan cakupan PRCR yang rendah	15.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	27.002.483.000
		02	Daerah yang difasilitasi dalam penyelenggaraan dan monitoring program jemput bola nasional untuk daerah 3T, daerah dengan cakupan kinerja rendah dan kelompok penduduk rentan	546.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	65.460.000.000
		03	Daerah yang di fasilitasi dalam Penerapan Rekomendasi Mekanisme Optimalisasi Sistem Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Secara inkulsif	552.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	8.521.650.000
		04	Daerah yang difasilitasi dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	6.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	482.195.000

Klasifikasi Rincian Output 21 : 6997.UAB Sistem Informasi Pemerintahan 1,00 Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan 109.451.977.000

Rincian Output	: 01	UAB.001	Aplikasi ID digital (PN)	1.00	Sistem Informasi	109.451.977.000
----------------	------	---------	--------------------------	------	------------------	-----------------

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



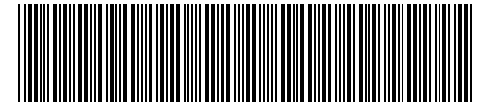
DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : I A. 9

Program	:	010.08.WA	Program Dukungan Manajemen			83.893.182.000
Kegiatan	:	6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			1.231.369.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun			
		2. 02	Revisi Undangundang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan			
		3. 03	Penyusunan Pedoman/SOP Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6120.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.231.369.000
Rincian Output	:	01 EBA.957	Layanan Hukum	1,00	Layanan	1.231.369.000
Kegiatan	:	6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			74.150.071.000
	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran			
		2. 02	Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan danTindak Lanjut LHP			
		3. 03	Persentase Penyelesaian verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)			
		4. 04	Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Ditjen Dukcapil			
		5. 05	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan			
		6. 06	Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat Waktu			
		7. 07	Persentase pemeliharaan peralatan KTP-el Kabupaten dan Kecamatan			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6121.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	63.431.650.000
Rincian Output	:	01 EBA.001	Layanan koordinasi penyelesaian aset dukcapil di daerah	1,00	Layanan	1.102.099.000
		02 EBA.956	Layanan BMN	1,00	Layanan	139.000.000
		03 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	4.342.344.000
		04 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	57.848.207.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



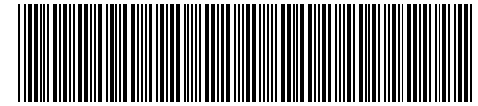
DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : I A. 10

Klasifikasi Rincian Output	3	:	6121.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	59,00	Unit, m2, Paket	3.254.500.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	58,00	Unit	654.500.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1,00	Unit	2.600.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6121.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	7,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	6.947.321.000
Rincian Output		:	01	EBD.001 Layanan Koordinasi Isu Aktual lingkup Ditjen Dukcapil	1,00	Dokumen	5.473.237.000
		:	02	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	108.344.000
		:	03	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	186.450.000
		:	04	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	3,00	Dokumen	860.850.000
		:	05	EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,00	Dokumen	318.440.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6121.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1,00	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	516.600.000
Rincian Output		:	01	FAB.001 Pemeliharaan Perangkat KTP-el	1,00	Sistem Informasi	516.600.000
Kegiatan		:	6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			1.009.769.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan lingkup Ditjen Dukcapil			
		:	2. 02	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup Ditjen Dukcapil			
		:	3. 03	Jumlah data/informasi lingkup Ditjen Dukcapil yang terstruktur menuju e-Database Kementerian Dalam Negeri			
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6122.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.009.769.000
Rincian Output		:	01	EBA.959 Layanan Protokoler	1,00	Layanan	334.440.000
		:	02	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	675.329.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : I A. 11

Kegiatan	:	6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil			7.501.973.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Pembinaan OPD Dukcapil yang membangun zona Integritas			
		2. 02	Asistensi dan fasilitasi penilaian zona integritas			
		3. 03	Capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Dukcapil			
		4. 04	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Dukcapil			
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6123.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	50.200.000
Rincian Output		:	01 EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	50.200.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	6123.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	500,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	7.451.773.000
Rincian Output		:	01 EBC.954 Layanan Manajemen SDM	500.00	Layanan	7.451.773.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

ttd.
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.
NIP. 196703081993011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025**



DS:4096-9303-3063-5101

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.001.814.306.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.		0
1. Rupiah Murni	Rp.	734.271.618.000		(2) RPLN	US\$	73.483.887	Rp.		1.072.864.748.000
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	1.072.864.748.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	42.153.480.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	42.153.480			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	INTERNATIONALBANK	USD						
		IBRD9520-ID	USD	67.054,05					
		1F2VZKKA	IDR	1.072.864.748,00	3	1.072.864.748			
1	1		IDR		3	1.072.864.748			
		00000000	IDR						
2	4	PEMERINTAHKOTAMAN	IDR	498.918,00					
		800/D.08/DUKCAPI	USD						
		217BRSEA	IDR	498.918,00	5	498.918			
3	4	PEMERINTAHKABUPATE	IDR	1.995.672,00					
		400.8.1.2/4116/S	USD						
		22NE265A	IDR	1.995.672,00	5	1.995.672			
4	4	PEMERINTAHKOTAPON	IDR	498.918,00					

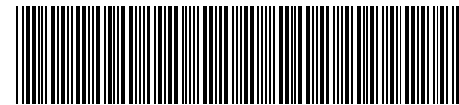
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025

I B. SUMBER DANA



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.001.814.306.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	734.271.618.000		(2) RPLN	US\$	73.483.887	Rp.	1.072.864.748.000
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	1.072.864.748.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	42.153.480.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	42.153.480		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		000.3.3.2/13756/	USD						
		27CBP2WA	IDR	498.918,00					
5	4	PEMERINTAHKABUPATE	IDR	509.100,00	5	498.918			
		400.8.1.2/3328/S	USD						
		27RUPRFA	IDR	509.100,00					
6	4	PEMERINTAHKABUPATE	IDR	509.100,00	5	509.100			
		000.3.3.2/12087/	USD						
		2AC17H4A	IDR	509.100,00					
7	4	PEMERINTAHKOTAPEK	IDR	509.100,00	5	509.100			
		P.PK.02.01/Dukca	USD						
		2ERCHUDA	IDR	509.100,00					

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025

I B. SUMBER DANA



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : I B. 3

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.001.814.306.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	734.271.618.000		(2) RPLN	US\$	73.483.887	Rp.	1.072.864.748.000
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	1.072.864.748.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	42.153.480.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	42.153.480		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	4	PEMERINTAHKABUPATE	IDR	560.010,00	5	509.100			
		B-0007.7.7.1/599	USD						
9	4	PEMERINTAHKABUPATE	IDR	356.370,00	5	560.010			
		000.3.3.2/12485/	USD						
10	4	PEMERINTAHKABUPATE	IDR	356.370,00	5	356.370			
		2L4JNUXA	IDR						
11	4	PEMERINTAHKABUPATE	IDR	19.997.448,00	5	19.997.448			
		000.3.3.2/11807/	USD						
		2M2DRLHA	IDR	19.997.448,00					
		PEMERINTAHKABUPATE	IDR	203.640,00					

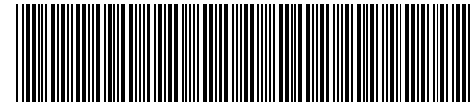
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025

I B. SUMBER DANA



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.001.814.306.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	734.271.618.000		(2) RPLN	US\$	73.483.887	Rp.	1.072.864.748.000
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	1.072.864.748.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	42.153.480.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	42.153.480		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		000.3.3.2/4904/S 2MASJMSA	USD IDR						
				203.640,00					
12	4	PEMERINTAHKABUPATE	IDR	1.486.572,00	5	203.640			
		000.3.3.2/13063/ 2NQVMEJA	USD IDR						
				1.486.572,00					
13	4	PEMERINTAHKABUPATE	IDR	1.394.934,00	5	1.486.572			
		900/648/Disdukca 2NT8ZHQA	USD IDR						
				1.394.934,00					
14	4	PEMERINTAHKABUPATE	IDR	1.018.200,00	5	1.394.934			
		000.3.3.2/11805/ 2P2VRGGA	USD IDR						
				1.018.200,00					

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025

I B. SUMBER DANA



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : I B. 5

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.001.814.306.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	734.271.618.000		(2) RPLN	US\$	73.483.887	Rp.	1.072.864.748.000
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	1.072.864.748.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	42.153.480.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	42.153.480		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	4	PEMERINTAHKABUPATE 000.3.3.2/13352/	IDR	101.820,00	5	1.018.200			
		2PLURYBA	IDR	101.820,00					
16	4	PEMERINTAHKABUPATE T/400.12/1106.1/	IDR	7.997.961,00	5	101.820			
		2QF7VN8A	IDR	7.997.961,00					
17	4	PEMERINTAHKOTABAL 400.8.1.2/3444/S	IDR	1.079.292,00	5	7.997.961			
		2TA9F4JA	IDR	1.079.292,00					
18	4	PEMERINTAHKOTABAT	IDR	2.036.400,00	5	1.079.292			

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025

I B. SUMBER DANA



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : I B. 6

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.001.814.306.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	734.271.618.000		(2) RPLN	US\$	73.483.887	Rp.	1.072.864.748.000
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	1.072.864.748.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	42.153.480.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	42.153.480		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		000.3.3.2/11055/ 2TD42XZA	USD IDR	2.036.400,00					
19	4	PEMERINTAHKOTASAM	IDR	509.100,00	5	2.036.400			
		000.3.3.2/7434/S 2THNQHYA	USD IDR	509.100,00					
20	4	PEMERINTAHKABUPATE	IDR	198.549,00	5	509.100			
		000.3.3.2/7969/S 2VGD84WA	USD IDR	198.549,00					
21	4	PEMERINTAHKABUPATE	IDR	692.376,00	5	198.549			
		000.3.3.2/12486/ 2XQR7AXA	USD IDR	692.376,00					

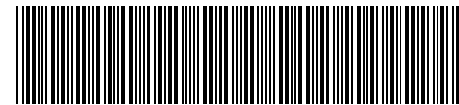
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025

I B. SUMBER DANA



DS:4096-9303-3063-5101

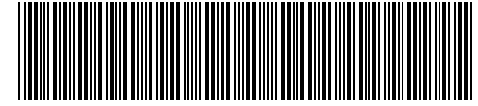
Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.001.814.306.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	734.271.618.000		(2) RPLN	US\$	73.483.887	Rp.	1.072.864.748.000
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	1.072.864.748.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	42.153.480.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	42.153.480		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					5	692.376			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



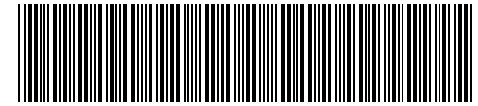
DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	41.904.979	1.256.115.575	703.793.752	-	-	2.001.814.306		
010.08.CP	Program Tata Kelola Kependudukan	-	1.215.381.872	702.539.252	-	-	1.917.921.124		
1268	Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan	-	388.765.533	159.927.834	-	-	548.693.367		
1268.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.129.189	1.736.866	-	-	6.866.055	01 . 54	
01	RM	-	5.129.189	1.736.866	-	-	6.866.055	133@	
1268.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	14.276	126.300.232	-	-	126.314.508	01 . 54	
01	RM	-	14.276	2.695.327	-	-	2.709.603	133@	
04	PNBP	-	-	123.604.905	-	-	123.604.905	133	
1268.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	174.021.872	24.424.343	-	-	198.446.215	01 . 54	
01	RM	-	162.268.041	7.258.619	-	-	169.526.660	133@	
04	PNBP	-	11.753.831	17.165.724	-	-	28.919.555	133	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



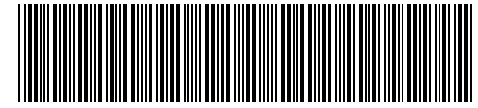
DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1268.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	204.393.449	-	-	-	204.393.449	01 . 54	
01	RM	-	204.393.449	-	-	-	204.393.449	133@	
1268.QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	5.206.747	7.466.393	-	-	12.673.140	01 . 54	
01	RM	-	5.206.747	7.466.393	-	-	12.673.140	133@	
1269	Pembinaan Administrasi Kependudukan	-	271.089.430	30.000	-	-	271.119.430		
1269.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	266.763.330	-	-	-	266.763.330	01 . 54	
01	RM	-	224.609.850	-	-	-	224.609.850	133@	
10	HLD	-	498.918	-	-	-	498.918	133	217BRSEA
10	HLD	-	1.995.672	-	-	-	1.995.672	133	22NE265A
10	HLD	-	498.918	-	-	-	498.918	133	27CBP2WA
10	HLD	-	509.100	-	-	-	509.100	133	27RUPRFA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



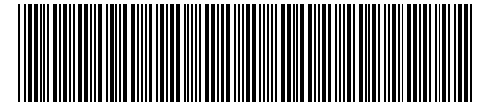
DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 HLD		-	509.100	-	-	-	509.100	133	2AC17H4A
10 HLD		-	509.100	-	-	-	509.100	133	2ERCHUDA
10 HLD		-	560.010	-	-	-	560.010	133	2F91LT2A
10 HLD		-	356.370	-	-	-	356.370	133	2L4JNUXA
10 HLD		-	19.997.448	-	-	-	19.997.448	133	2M2DRLHA
10 HLD		-	203.640	-	-	-	203.640	133	2MASJMSA
10 HLD		-	1.486.572	-	-	-	1.486.572	133	2NQVMEJA
10 HLD		-	1.394.934	-	-	-	1.394.934	133	2NT8ZHQA
10 HLD		-	1.018.200	-	-	-	1.018.200	133	2P2VRGGA
10 HLD		-	101.820	-	-	-	101.820	133	2PLURYBA
10 HLD		-	7.997.961	-	-	-	7.997.961	133	2QF7VN8A
10 HLD		-	1.079.292	-	-	-	1.079.292	133	2TA9F4JA
10 HLD		-	2.036.400	-	-	-	2.036.400	133	2TD42XZA
10 HLD		-	509.100	-	-	-	509.100	133	2THNQHYA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



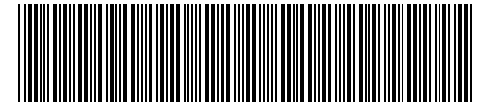
DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 HLD		-	198.549	-	-	-	198.549	133	2VGD84WA
10 HLD		-	692.376	-	-	-	692.376	133	2XQR7AXA
1269.PBM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 54	
01 RM		-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	133@	
1269.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.326.100	30.000	-	-	3.356.100	01 . 54	
01 RM		-	3.326.100	30.000	-	-	3.356.100	133@	
1271	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	24.750.239	493.340	-	-	25.243.579		
1271.AAG	Peraturan Menteri (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	200.000	-	-	-	200.000	01 . 54	
01 RM		-	200.000	-	-	-	200.000	133@	
1271.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	21.534.538	98.000	-	-	21.632.538	01 . 54	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



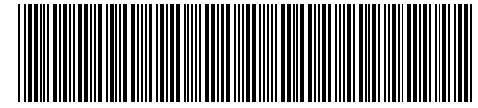
DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	21.534.538	98.000	-	-	21.632.538	133@	
1271.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.015.701	395.340	-	-	3.411.041	01 . 54	
01 RM		-	3.015.701	395.340	-	-	3.411.041	133@	
6997	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital	-	530.776.670	542.088.078	-	-	1.072.864.748		
6997.ABM	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	18.229.877	180.200	-	-	18.410.077	01 . 54	
02 PLN		-	18.229.877	180.200	-	-	18.410.077	133@	RK 1F2VZKKA
6997.AEH	Promosi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.152.000	-	-	-	1.152.000	01 . 54	
02 PLN		-	1.152.000	-	-	-	1.152.000	133@	RK 1F2VZKKA
6997.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	30.280.255	40.220	-	-	30.320.475	01 . 54	
02 PLN		-	30.280.255	40.220	-	-	30.320.475	133@	RK 1F2VZKKA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



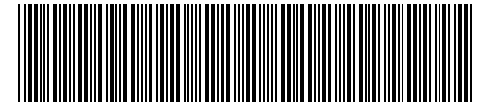
DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6997.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	35.601.995	500.000	-	-	36.101.995	01 . 54	
02	PLN	-	35.601.995	500.000	-	-	36.101.995	133@	RK 1F2VZKKA
6997.BMB	Komunikasi Publik (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	35.754.000	-	-	-	35.754.000	01 . 54	
02	PLN	-	35.754.000	-	-	-	35.754.000	133@	RK 1F2VZKKA
6997.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	130.962.981	326.419.231	-	-	457.382.212	01 . 54	
02	PLN	-	130.962.981	326.419.231	-	-	457.382.212	133@	RK 1F2VZKKA
6997.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	84.927.635	108.496.450	-	-	193.424.085	01 . 54	
02	PLN	-	84.927.635	108.496.450	-	-	193.424.085	133@	RK 1F2VZKKA
6997.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	89.401.599	-	-	-	89.401.599	01 . 54	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



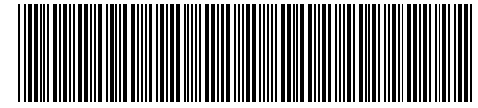
DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	PLN	-	89.401.599	-	-	-	89.401.599	133@	RK 1F2VZKKA
6997.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	101.466.328	-	-	-	101.466.328	01 . 54	
02	PLN	-	101.466.328	-	-	-	101.466.328	133@	RK 1F2VZKKA
6997.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	3.000.000	106.451.977	-	-	109.451.977	01 . 54	
02	PLN	-	3.000.000	106.451.977	-	-	109.451.977	133@	RK 1F2VZKKA
010.08.WA	Program Dukungan Manajemen	41.904.979	40.733.703	1.254.500	-	-	83.893.182		
6120	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	1.231.369	-	-	-	1.231.369		
6120.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.231.369	-	-	-	1.231.369	01 . 54	
01	RM	-	1.231.369	-	-	-	1.231.369	133@	
6121	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41.904.979	30.990.592	1.254.500	-	-	74.150.071		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



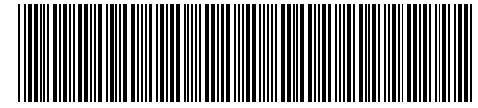
DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 8
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6121.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	41.904.979	21.526.671	-	-	-	63.431.650	01 . 54	
01	RM	41.904.979	21.526.671	-	-	-	63.431.650	133@	
6121.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	2.000.000	1.254.500	-	-	3.254.500	01 . 54	
01	RM	-	2.000.000	1.254.500	-	-	3.254.500	133	
6121.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	6.947.321	-	-	-	6.947.321	01 . 54	
01	RM	-	6.947.321	-	-	-	6.947.321	133@	
6121.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	516.600	-	-	-	516.600	01 . 54	
01	RM	-	516.600	-	-	-	516.600	133	
6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	1.009.769	-	-	-	1.009.769		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kewenangan : (KP)

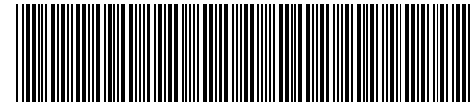
Halaman : II. 9
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6122.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.009.769	-	-	-	1.009.769	01 . 54	
01 RM		-	1.009.769	-	-	-	1.009.769	133@	
6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	7.501.973	-	-	-	7.501.973		
6123.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	50.200	-	-	-	50.200	01 . 54	
01 RM		-	50.200	-	-	-	50.200	133@	
6123.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	7.451.773	-	-	-	7.451.773	01 . 54	
01 RM		-	7.451.773	-	-	-	7.451.773	133@	
JUMLAH		41.904.979	1.256.115.575	703.793.752	-	-	2.001.814.306		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

ttd.
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.
NIP. 196703081993011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.328.072	5.741.883	89.761.042	112.095.614	13.380.351	22.447.242	127.864.109	60.216.589	64.438.621	40.102.742	47.815.924	1.412.622.117	2.001.814.306
		BELANJA PEGAWAI	1.280.171	2.676.489	5.456.132	2.604.242	2.596.687	5.369.325	2.923.779	2.891.772	4.207.342	3.850.447	3.858.708	4.189.887	41.904.979
		BELANJA BARANG	4.046.985	3.051.464	84.259.997	109.475.028	10.389.331	17.063.629	122.052.779	57.260.389	59.469.779	35.715.103	41.161.368	712.169.722	1.256.115.575
		BELANJA MODAL	917	13.930	44.913	16.344	394.333	14.289	2.887.550	64.428	761.500	537.192	2.795.847	696.262.508	703.793.752
010.08.CP.1268		Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan	13.706	176.325	831.407	26.983.135	7.814.513	14.657.355	61.215.321	54.229.689	57.590.814	13.722.959	19.440.496	292.017.648	548.693.367
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	13.706	163.836	794.259	26.970.647	7.423.674	14.654.918	58.334.546	54.172.868	56.854.185	13.312.763	16.856.007	139.214.125	388.765.533
		53 BELANJA MODAL	0	12.489	37.148	12.489	390.840	2.437	2.880.775	56.821	736.629	410.195	2.584.489	152.803.523	159.927.834
010.08.CP.1269		Pembinaan Administrasi Kependudukan	0	253.206	78.677.774	78.481.409	0	0	60.204.516	13.558	0	3.601.285	17.164.287	32.723.396	271.119.430
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	253.206	78.677.774	78.481.409	0	0	60.204.516	13.558	0	3.601.285	17.164.287	32.693.396	271.089.430
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
010.08.CP.1271		Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	61.458	280.317	610.358	304.474	431.003	101.692	339.733	419.885	234.949	1.240.627	855.092	20.363.989	25.243.579
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	61.458	280.317	606.086	304.113	431.003	100.313	339.733	415.763	234.949	1.234.681	855.092	19.886.730	24.750.239
		53 BELANJA MODAL	0	0	4.272	361	0	1.379	0	4.122	0	5.947	0	477.258	493.340
010.08.CP.6997		Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital	201.411	661.696	490.721	433.721	233.156	0	665.897	345.641	731.878	14.625.682	3.400.754	1.051.074.192	1.072.864.748
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	200.495	660.254	487.227	430.227	229.662	0	659.121	342.157	707.006	14.622.198	3.358.599	509.079.724	530.776.670
		53 BELANJA MODAL	917	1.442	3.494	3.494	3.494	0	6.776	3.485	24.871	3.485	42.155	541.994.468	542.088.078
010.08.WA.6120		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan	0	29.496	142.726	49.181	44.062	0	25.891	27.750	0	383.202	253.813	275.248	1.231.369

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (634082) DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pencatatan Sipil													
	010.08.WA.6121	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	29.496	142.726	49.181	44.062	0	25.891	27.750	0	383.202	253.813	275.248	1.231.369
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.051.497	3.555.063	8.133.593	4.948.902	4.089.747	6.783.967	4.568.312	4.439.350	5.524.848	6.072.935	6.308.930	14.672.926	74.150.071
		51 BELANJA PEGAWAI	1.280.171	2.676.489	5.456.132	2.604.242	2.596.687	5.369.325	2.923.779	2.891.772	4.207.342	3.850.447	3.858.708	4.189.887	41.904.979
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	3.771.327	878.574	2.677.462	2.344.660	1.493.061	1.404.170	1.644.533	1.547.579	1.317.506	2.104.922	2.281.018	9.525.780	30.990.592
	010.08.WA.6122	53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	10.473	0	0	0	117.566	169.203	957.258	1.254.500
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	51.514	9.275	121.462	24.362	143.784	107.296	15.008	0	30.693	15.250	491.124	1.009.769
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	51.514	9.275	121.462	24.362	143.784	107.296	15.008	0	30.693	15.250	491.124	1.009.769
	010.08.WA.6123	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	734.266	865.189	773.329	743.507	760.444	737.142	725.708	356.132	425.359	377.302	1.003.595	7.501.973
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	734.266	865.189	773.329	743.507	760.444	737.142	725.708	356.132	425.359	377.302	1.003.595	7.501.973
		PERKIRAAN PENERIMAAN	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	464.890.871
		- PNBP (425692)	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	38.740.906	464.890.871

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

ttd.
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.
NIP. 196703081993011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [634082] DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN		
634082	DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan		Rp. 806.558.930	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 125.830
	52 Belanja Barang		Rp. 537.267.667	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	53 Belanja Modal	Rp. 269.291.263	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
010.08.CP 1268	Program Tata Kelola Kependudukan Pengelolaan, Informasi dan Integrasi data Kependudukan	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
1268.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		521211 Belanja Bahan(RM)	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 432.675
			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 498.115	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM)	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 54.810	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 65.940	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		536111	Belanja Modal Lainnya(RM)	
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 1.005.450	
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)	Rp. 18.800	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 18.800	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		1268.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211	Belanja Bahan(RM)	
522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)	Rp. 10	Tidak Dapat Dicairkan		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 10	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		
	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		536111	Belanja Modal Lainnya(RM)	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Rp. 1.653.055	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 264.577	
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 1.653.055	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		1268.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	
			521211	Belanja Bahan(RM)	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [634082] DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Rp. 422.999		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 507.670
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 78.920		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 69.700
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 79.174		524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.340
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
522131	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 465.012		524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 106.800
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
522141	Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.044		536111	Belanja Modal Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
522151	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.685		1268.FBA	Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 168.300
522191	Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.276.980			
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
				Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [634082] DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
1268.QAB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.730 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	1269.BAA	Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 58.200 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 403.200 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.019.860 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.440 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 179.394 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.600 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 198.077 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 131.544 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.800 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 445.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31.800 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam		1269 Pembinaan Administrasi Kependudukan
			1269.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat
			521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 103 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [634082] DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
1269.PBM	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	1269.QAA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.050 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.000 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 335.280 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.125 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 62.450 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik		Pelayanan Publik kepada masyarakat
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 64.320 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 246.616 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 495.000 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.400 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.900 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.591.323 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.500

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [634082] DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
1271 1271.AAG	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 259.975 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 147.720 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 664.377 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.000 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	1271.FBA	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.399.976 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.600 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 293.200 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 420.000 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.000 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025	
	Pembinaan Aparatur Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			
	Peraturan Menteri			
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.850 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.800			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [634082] DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.554.056	1271.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211	Belanja Bahan(RM)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 602.723
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 68.870		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.112.308		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.320
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.714.380	522131	Belanja Jasa Konsultan(RM)
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200.000
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)		Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 945.000	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 841.120
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.000	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
536111	Belanja Modal Lainnya(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.510
		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
		532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 395.340
			Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [634082] DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : IV.A. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6997 6997.ABM	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6997.AEH 6997.AFA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Penguatan Administrasi Kependudukan dan Identitas Digital		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PLN)
	Kebijakan Bidang Pelayanan Publik		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.734.200
	521211 Belanja Bahan(PLN)		Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.109.343		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PLN)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 180.200
	522131 Belanja Jasa Konsultan(PLN)		Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.846.000		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Promosi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522131 Belanja Jasa Konsultan(PLN)
	522151 Belanja Jasa Profesi(PLN)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.152.000
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 181.700	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		
522191 Belanja Jasa Lainnya(PLN)	521211 Belanja Bahan(PLN)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.282.217	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 427.670		
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PLN)	522131 Belanja Jasa Konsultan(PLN)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.028.327	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.297.625		
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PLN)	522151 Belanja Jasa Profesi(PLN)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.575.320	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 298.200		
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [634082] DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : IV.A. 8
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PLN)	521211	Belanja Bahan(PLN)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.458.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 929.948
	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PLN)	522131	Belanja Jasa Konsultan(PLN)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.600		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.457.990
	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PLN)	522141	Belanja Sewa(PLN)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.204.400		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.041.440
	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PLN)	522151	Belanja Jasa Profesi(PLN)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 563.760		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.012.000
	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PLN)	522191	Belanja Jasa Lainnya(PLN)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.220		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.313.400
	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6997.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PLN)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran(PLN)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.650.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 482.964		Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PLN)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [634082] DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : IV.A. 9
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6997.BMB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 76.000 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6997.CAN	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 965.870 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.760.000 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.126.400 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 521211 Belanja Bahan(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 150.642 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.475.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.830 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 500.000 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.414.828 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Komunikasi Publik 522131 Belanja Jasa Konsultan(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 176.000 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522141 Belanja Sewa(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.124.600 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.537.200		522151 Belanja Jasa Profesi(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.600

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [634082] DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : IV.A. 10
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6997.FAB	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PLN)		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PLN)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 112.510.131		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.000
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PLN)		522131 Belanja Jasa Konsultan(PLN)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.754.470		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.941.361
	Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PLN)		522151 Belanja Jasa Profesi(PLN)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 440.880		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 172.900
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
526311 Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda(PLN)		522191 Belanja Jasa Lainnya(PLN)	
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.495.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 57.326.710	
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PLN)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PLN)	
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51.284.049		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.584.299	
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025	
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Sistem Informasi Pemerintahan	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PLN)	
521211 Belanja Bahan(PLN)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 551.100	
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 994.923		Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025	
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
IV A. B L O K I R**



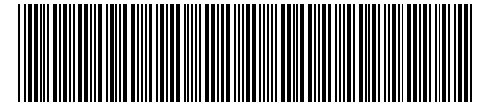
DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [634082] DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : IV.A. 11
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.238.517 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.163.000 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 105.356.200 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 37.642.510 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.500.000 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.754.800 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 536111 Belanja Modal Lainnya(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.640.250 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.873.800 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
6997.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara		
	521211 Belanja Bahan(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.060.675 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.054.228 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522141 Belanja Sewa(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.557.030 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.880.635 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [634082] DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : IV.A. 12
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6997.FBA	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.218.984 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6997.UAB 010.08.WA 6120 6120.EBA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 889.760 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.058.000 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.724.205 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Sistem Informasi Pemerintahan
	522131 Belanja Jasa Konsultan(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.700.890 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 106.451.977 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 62.700 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Program Dukungan Manajemen
	522191 Belanja Jasa Lainnya(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 65.460.000 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PLN) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.399.773 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PLN)		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.560 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.800 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.009 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [634082] DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : IV.A. 13
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6121	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6121.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
6121.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 136.024 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.580 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025	522141	Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.000 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 637.285 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522191	Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.800 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 416.428 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.520 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 70.890 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.800 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025	6122	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		6122.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 345.456 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 130.380 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [634082] DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

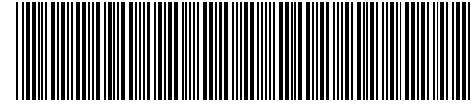
Halaman : IV.A. 14
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6123 6123.EBA	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 56.320 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6123.EBC	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.285 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Layanan Manajemen SDM Internal
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 37.350 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.750 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.300 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.884 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 85.200 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.890 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.220 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	6123 Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	6123.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	521211 Belanja Bahan(RM)		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

ttd.
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.
NIP. 196703081993011001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.08.1.634082/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:4096-9303-3063-5101

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [634082] DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

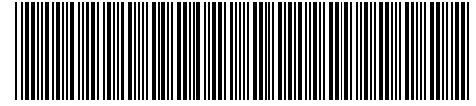
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

ttd.
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.
NIP. 196703081993011001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.09.1.662766/2025**



DS:9286-4025-0420-1000

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 18

Tanggal : 23 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Unit Organisasi : (09) Ditjen Bina Keuangan Daerah
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
- Sebesar : Rp. 109.386.087.000 (SERATUS SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA DELAPAN PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	109.226.087.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	160.000.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	160.000.000	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 109.386.087.000

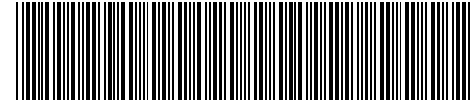
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025

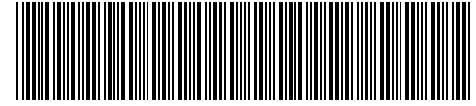


DS:9286-4025-0420-1000

Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	109.386.087.000
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	Rp.	44.860.000.000
01.03	PELAYANAN UMUM	Rp.	64.526.087.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025

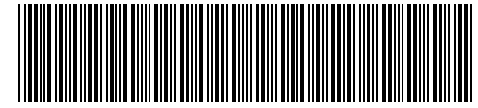


DS:9286-4025-0420-1000

Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	44.860.000.000
CM.1276	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	Rp.	7.933.844.000
CM.6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	Rp.	36.926.156.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	64.526.087.000
WA.6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	Rp.	750.000.000
WA.6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	Rp.	61.856.059.000
WA.6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	Rp.	520.028.000
WA.6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	Rp.	1.400.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



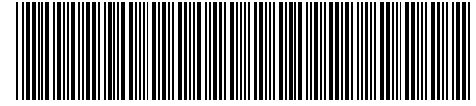
DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Halaman : I A. 1

Program	:	010.09.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa			44.860.000.000
Kegiatan	:	1276	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah			7.933.844.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah			
		2. 02	Jumlah Daerah yang Optimal Dalam memanfaatkan Dana Transfer			
		3. 03	Jumlah Daerah Yang Difasilitasi Dalam Menerbitkan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah			
		4. 04	Jumlah Daerah Yang Difasilitasi Dalam Memanfaatkan Pinjaman Daerah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1276.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	988.974.000
Rincian Output	:	01 BMA.001	Data dan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	1,00	Data	988.974.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1276.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	480,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	3.944.870.000
Rincian Output	:	01 FBA.001	Daerah yang Optimal Dalam Memanfaatkan Dana Transfer	480,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.944.870.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1276.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	220,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	3.000.000.000
Rincian Output	:	01 UBA.001	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Menerbitkan Obligasi Daerah/Sukuk Daerah (PN)	110,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000
		02 UBA.002	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Memanfaatkan Pinjaman Daerah (PN)	110,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.000.000.000
Kegiatan	:	6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah			36.926.156.000
	:	1. 01	Jumlah Permendagri Bidang Perencanaan Anggaran Daerah			
	:	2. 02	Jumlah Permendagri Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah			
	:	3. 03	Jumlah Permendagri Bidang Pendapatan Daerah			
	:	4. 04	Jumlah Permendagri Bidang Pengelolaan BUMD, BLUD dan BMD			
	:	5. 05	Jumlah Konferensi dan Event Pengelolaan Keuangan Daerah			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9286-4025-0420-1000

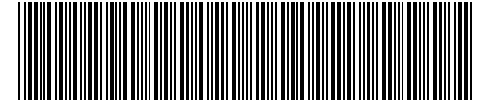
Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah

- 6. 06 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Publik Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
- 7. 07 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Publik Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- 8. 08 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
- 9. 09 Jumlah Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan APBD
- 10. 10 Jumlah Provinsi Yang Memenuhi Anggaran SPM
- 11. 11 Jumlah Daerah Yang Menerapkan SIPD Bidang Keuangan Daerah
- 12. 12 Jumlah Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 13. 13 Jumlah Daerah yang LKPD nya Akuntabel Dengan Perolehan Opini WTP
- 14. 14 Jumlah Daerah yang Difasilitasi Dalam Rangka Penerapan Cashless/Transaksi Non Tunai
- 15. 15 Jumlah Provinsi Yang Mencapai Realisasi Belanja secara Optimal
- 16. 16 Jumlah Daerah yang Menerapkan PPK BLUD
- 17. 17 Jumlah Ketersediaan Peta Jalan Belanja Pegawai Di Daerah
- 18. 18 Jumlah Ketersediaan Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 19. 19 Jumlah Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
- 20. 20 Jumlah Daerah Dengan Proporsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat
- 21. 21 Jumlah Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)
- 22. 22 Jumlah Daerah Dengan Proporsi Kontribusi BUMD Meningkat Dalam APBD

Klasifikasi Rincian Output	4	:	6141.AAG	Peraturan Menteri	5,00	PerMen, Perka, RPermen	1.000.000.000	
Rincian Output		:	01	AAG.001	Permendagri Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	1.00	PerMen	200.000.000
		:	02	AAG.002	Permendagri Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1.00	PerMen	200.000.000
		:	03	AAG.003	Permendagri Bidang Pendapatan Daerah	1.00	PerMen	200.000.000
		:	04	AAG.004	Permendagri Bidang Pengelolaan BMD	1.00	PerMen	200.000.000
		:	05	AAG.005	Permendagri Bidang Pengelolaan BLUD	1.00	PerMen	200.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

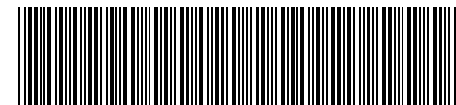
Halaman : I A. 3

Peraturan Menteri

PerMen, Perka, RPermen

Klasifikasi Rincian Output	5	:	6141.AEG	Konferensi dan Event	16,00	Kegiatan, Paket Kegiatan	3.500.000.000
Rincian Output		:	01	AEG.002 Konferensi dan Event Pengelolaan Keuangan Daerah	16,00	Kegiatan	3.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6141.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1,00	NSPK	160.000.000
Rincian Output		:	01	AFA.004 Rancangan Standar Redesain Proses Bisnis SIPD RI Bidang Keuangan Daerah	1,00	NSPK	160.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6141.BMA	Data dan Informasi Publik	3,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	1.722.818.000
Rincian Output		:	01	BMA.001 Data dan Informasi Publik Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	1,00	Data	716.922.000
		:	02	BMA.002 Data dan Informasi Publik Bidang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	1,00	Data	705.896.000
		:	03	BMA.003 Data dan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,00	Data	300.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	6141.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	2,00	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	1.286.676.000
Rincian Output		:	01	FAB.001 Modul Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	2,00	Modul Aplikasi	1.286.676.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	6141.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.744,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, KabKota	10.688.974.000
Rincian Output		:	01	FBA.021 Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan APBD	38,00	Provinsi	1.938.690.000
		:	02	FBA.022 Provinsi Yang Memenuhi Anggaran SPM	38,00	Provinsi	500.000.000
		:	03	FBA.023 Daerah Yang Menerapkan SIPD Bidang Keuangan Daerah	546,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.261.310.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Halaman : I A. 4

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota

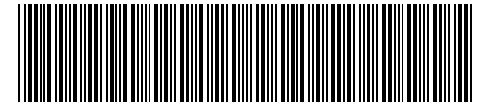
04	FBA.024	Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	38.00	Provinsi	1.000.000.000
05	FBA.025	Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penyusunan LKPD	500.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.000.000.000
06	FBA.027	Provinsi Yang Difasilitasi Dalam Pencapaian Realisasi Belanja secara Optimal	38.00	Provinsi	1.000.000.000
07	FBA.028	Daerah yang Menerapkan PPK BLUD	546.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	988.974.000

Klasifikasi Rincian Output 10	:	6141.QMA	Data dan Informasi Publik	2,00	layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi	3.000.000.000
Rincian Output	:	01	QMA.001 Peta Jalan Belanja Pegawai Di Daerah	1,00	Data	1.000.000.000
		02	QMA.002 Basis Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1,00	Data	2.000.000.000

Klasifikasi Rincian Output 11	:	6141.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1.231,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	15.567.688.000
Rincian Output	:	01	UBA.011 Provinsi Yang Memenuhi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	19,00	Provinsi	1.000.000.000
		02	UBA.012 Daerah Dengan Proporsi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Meningkat	300,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	4.900.766.000
		03	UBA.013 Daerah Yang Melaksanakan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU)	2,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000.000
		04	UBA.014 Daerah Dengan Proporsi Kontribusi BUMD Meningkat Dalam APBD	300,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.400.000.000
		05	UBA.015 Daerah Yang Melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah Secara Wajar	500,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	3.266.922.000
		06	UBA.016 Daerah yang Difasilitasi Dalam Rangka Penerapan Cashless/Transaksi Non Tunai (PN)	110,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000.000

Program	:	010.09.WA	Program Dukungan Manajemen			64.526.087.000
Kegiatan	:	6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah			750.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Layanan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



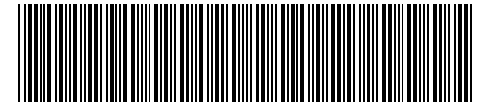
DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	1	:	6124.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	750.000.000
Rincian Output		:	01 EBA.957	Layanan Hukum	1.00	Layanan	750.000.000
Kegiatan		:	6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah			61.856.059.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Persentase Penyelesaian Layanan Umum, Rumah Tangga dan BMN Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah			
		:	2. 02	Persentase Penyelesaian Layanan Perkantoran Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah			
		:	3. 03	Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah			
		:	4. 04	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah			
		:	5. 05	Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah			
		:	6. 06	Persentase Penyelesaian Layanan Manajemen Keuangan Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah			
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6125.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	59.376.281.000
Rincian Output		:	01 EBA.956	Layanan BMN	1.00	Layanan	139.000.000
		:	02 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	2.061.000.000
		:	03 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	57.176.281.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6125.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	70,00	Unit, m2, Paket	1.000.000.000
Rincian Output		:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	70.00	Unit	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6125.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.479.778.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	530.959.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	240.000.000
		:	03 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	708.819.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Halaman : I A. 6

Kegiatan	:	6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah			520.028.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Layanan Kehumasan dan Protokoler Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah			
		2. 02	Jumlah data/informasi Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6126.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	520.028.000
Rincian Output	:	01	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1,00	Layanan	284.824.000
		02	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	235.204.000
Kegiatan	:	6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah			1.400.000.000
	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Layanan SDM Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah			
		2. 02	Persentase Penyelesaian Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah			
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6127.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	700.000.000
Rincian Output	:	01	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	700.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6127.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	300,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	700.000.000
Rincian Output	:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	300,00	Orang	700.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

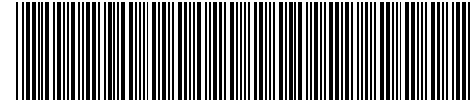
ttd.
Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si
NIP. 197206061992031012

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025

I B. SUMBER DANA



DS:9286-4025-0420-1000

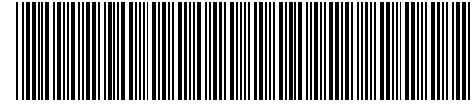
Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
 Unit Organisasi : (09) Ditjen Bina Keuangan Daerah
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

				Pagu			Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	109.386.087.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	109.226.087.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	10.959	Rp.	160.000.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	160.000.000		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	INTERNATIONALBANK TF0C4755 2S9MDU8A	USD USD IDR	10,00 160.000,00	3	160.000			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



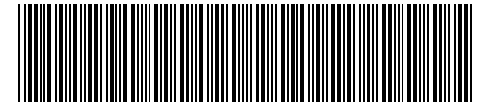
DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	46.186.381	62.199.706	1.000.000	-	-	109.386.087		
010.09.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	-	44.860.000	-	-	-	44.860.000		
1276	Pembinaan dan Fasilitasi Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	-	7.933.844	-	-	-	7.933.844		
1276.BMA	Data dan Informasi Publik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	988.974	-	-	-	988.974	01 . 51	
01	RM	-	988.974	-	-	-	988.974	133@	
1276.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.944.870	-	-	-	3.944.870	01 . 51	
01	RM	-	3.944.870	-	-	-	3.944.870	133@	
1276.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	01 . 51	
01	RM	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	133@	
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik	-	36.926.156	-	-	-	36.926.156		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



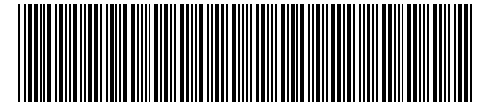
DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6141.AAG	Peraturan Menteri (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 51	
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	133@	
6141.AEG	Konferensi dan Event (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	01 . 51	
01	RM	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000	133@	
6141.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	160.000	-	-	-	160.000	01 . 51	
09	HLN	-	160.000	-	-	-	160.000	133	RK 2S9MDU8A
6141.BMA	Data dan Informasi Publik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.722.818	-	-	-	1.722.818	01 . 51	
01	RM	-	1.722.818	-	-	-	1.722.818	133@	
6141.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.286.676	-	-	-	1.286.676	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



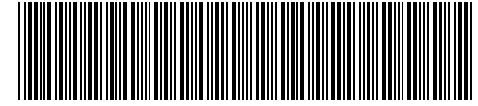
DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	1.286.676	-	-	-	1.286.676	133@	
6141.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	10.688.974	-	-	-	10.688.974	01 . 51	
01 RM		-	10.688.974	-	-	-	10.688.974	133@	
6141.QMA	Data dan Informasi Publik (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	01 . 51	
01 RM		-	3.000.000	-	-	-	3.000.000	133@	
6141.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	15.567.688	-	-	-	15.567.688	01 . 51	
01 RM		-	15.567.688	-	-	-	15.567.688	133@	
010.09.WA	Program Dukungan Manajemen	46.186.381	17.339.706	1.000.000	-	-	64.526.087		
6124	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	-	750.000	-	-	-	750.000		
6124.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	750.000	-	-	-	750.000	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



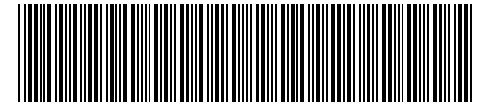
DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	750.000	-	-	-	750.000	133@	
6125	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	46.186.381	14.669.678	1.000.000	-	-	61.856.059		
6125.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	46.186.381	13.189.900	-	-	-	59.376.281	01 . 51	
01 RM		46.186.381	13.189.900	-	-	-	59.376.281	133@	
6125.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	01 . 51	
01 RM		-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	133@	
6125.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.479.778	-	-	-	1.479.778	01 . 51	
01 RM		-	1.479.778	-	-	-	1.479.778	133@	
6126	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	-	520.028	-	-	-	520.028		
6126.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	520.028	-	-	-	520.028	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
Kewenangan : (KP)

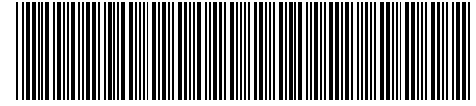
Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	520.028	-	-	-	520.028	133	
6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	-	1.400.000	-	-	-	1.400.000		
6127.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	700.000	-	-	-	700.000	01 . 51	
01 RM		-	700.000	-	-	-	700.000	133@	
6127.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	700.000	-	-	-	700.000	01 . 51	
01 RM		-	700.000	-	-	-	700.000	133@	
JUMLAH		46.186.381	62.199.706	1.000.000	-	-	109.386.087		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

ttd.
Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si
NIP. 197206061992031012

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Unit Organisasi : (09) Ditjen Bina Keuangan Daerah

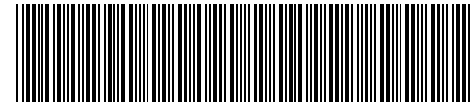
Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode>Nama Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.996.909	5.600.595	9.568.483	4.532.138	4.423.728	8.503.067	5.249.575	5.865.918	7.173.111	6.037.126	8.096.092	41.339.343	109.386.087
		BELANJA PEGAWAI	2.404.620	3.247.126	6.626.994	3.260.840	3.213.388	6.643.490	3.200.879	3.366.426	3.415.170	3.507.306	3.690.527	3.609.614	46.186.381
		BELANJA BARANG	592.289	2.353.469	2.879.149	1.120.266	1.106.040	1.859.577	1.882.520	2.462.974	3.635.891	2.529.820	4.361.340	37.416.369	62.199.706
		BELANJA MODAL	0	0	62.340	151.032	104.300	0	166.176	36.518	122.050	0	44.225	313.360	1.000.000
010.09.CM.1276		Pembinaan dan Fasilitas Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah	38.908	534.285	70.538	39.236	39.598	55.620	136.060	211.071	171.420	50.700	1.580.959	5.005.450	7.933.844
010.09.CM.6141		52 BELANJA BARANG DAN JASA Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	38.908	534.285	70.538	39.236	39.598	55.620	136.060	211.071	171.420	50.700	1.580.959	5.005.450	7.933.844
010.09.WA.6124		52 BELANJA BARANG DAN JASA Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah	162.014	789.755	504.031	272.006	335.981	688.011	708.705	1.163.685	2.130.600	921.096	282.054	28.968.219	36.926.156
010.09.WA.6125		52 BELANJA BARANG DAN JASA Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Keuangan Daerah	162.014	789.755	504.031	272.006	335.981	688.011	708.705	1.163.685	2.130.600	921.096	282.054	28.968.219	36.926.156
010.09.WA.6126		51 BELANJA PEGAWAI	6.421	36.721	45.070	32.660	25.997	72.069	10.332	25.794	43.608	9.136	91.815	350.377	750.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	6.421	36.721	45.070	32.660	25.997	72.069	10.332	25.794	43.608	9.136	91.815	350.377	750.000
		53 BELANJA MODAL	2.784.478	4.179.227	8.897.389	4.161.446	3.987.776	7.582.131	4.280.770	4.418.529	4.698.659	5.033.179	5.861.847	5.970.628	61.856.059
		51 BELANJA PEGAWAI	2.404.620	3.247.126	6.626.994	3.260.840	3.213.388	6.643.490	3.200.879	3.366.426	3.415.170	3.507.306	3.690.527	3.609.614	46.186.381
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	379.858	932.101	2.208.054	749.574	670.088	938.642	913.715	1.015.585	1.161.439	1.525.873	2.127.095	2.047.654	14.669.678
		53 BELANJA MODAL	0	0	62.340	151.032	104.300	0	166.176	36.518	122.050	0	44.225	313.360	1.000.000
010.09.WA.6126		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Keuangan Daerah	5.089	30.615	16.510	12.366	16.585	74.577	63.700	30.618	31.336	13.842	224.405	385	520.028

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (09) Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (662766) DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

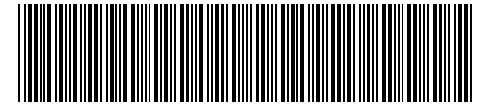
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	5.089	30.615	16.510	12.366	16.585	74.577	63.700	30.618	31.336	13.842	224.405	385	520.028
	010.09.WA.6127	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah	0	29.993	34.945	14.425	17.791	30.660	50.008	16.221	97.489	9.173	55.013	1.044.284	1.400.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	29.993	34.945	14.425	17.791	30.660	50.008	16.221	97.489	9.173	55.013	1.044.284	1.400.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

ttd.
Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si
NIP. 197206061992031012

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
IV A. B L O K I R**



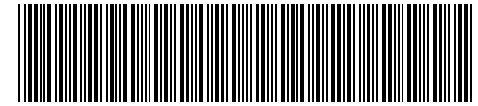
DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [662766] DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
662766	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 196.146
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 31.121.129		Efisiensi Belanja
	52 Belanja Barang Rp. 30.821.129	1276.FBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	53 Belanja Modal Rp. 300.000		Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah
010.09.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	521211	Belanja Bahan(RM)
1276	Pembinaan dan Fasilitas Dana Transfer dan Pembiayaan Daerah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 411.271
1276.BMA	Data dan Informasi Publik		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 132.652	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 160.700
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.500	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.162.713
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.300	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.140
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Belanja
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 173.166	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Efisiensi Belanja		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 133.050
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Efisiensi Belanja
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 189.720	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Efisiensi Belanja		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 463.850
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
IV A. B L O K I R**



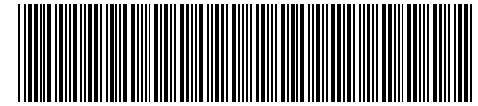
DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [662766] DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
1276.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 227.776	6141.AEG	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Konferensi dan Event	
522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.400	521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 477.120
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.780.376	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.350
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 492.240	522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 140.700
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6141	Pembinaan Pengelolaan Keuangan, Badan Usaha/Layanan, dan Barang Milik Daerah	522191	Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 950.000
6141.AAG	Peraturan Menteri	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 190.620	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.508.146
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 39.800	6141.BMA	Data dan Informasi Publik
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 240.424
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 177.610	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
IV A. B L O K I R**



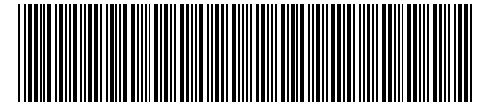
DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [662766] DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6141.FAB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 145.375 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6141.FBA	Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.151.330 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 239.471 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.350 Efisiensi Belanja
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 61.200 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Sistem Informasi Pemerintahan		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 84.800 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 94.740 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.274.291 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.754.058 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.600 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6141.QMA Data dan Informasi Publik		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211 Belanja Bahan(RM)		
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 430.530 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 550.800 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 134.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
IV A. B L O K I R**



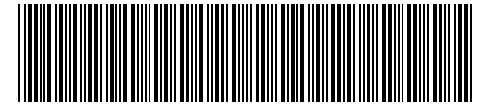
DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [662766] DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6141.UBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	010.09.WA 6124 6124.EBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.252.301 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 838.240 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.800 Efisiensi Belanja
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 673.200 Efisiensi Belanja		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.121.212 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.265.401 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 390.409 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.950 Efisiensi Belanja		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Program Dukungan Manajemen Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Keuangan Daerah
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522131 Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Layanan Dukungan Manajemen Internal 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 92.705 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.800 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [662766] DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
6125 6125.EBA	Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Rp. 103.200	6125.EBB	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Rp. 76.895		532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 233.600 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Rp. 97.200		536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 66.400 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Rp. 486.785		6125.EBD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Layanan Manajemen Kinerja Internal
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Rp. 1.205.643			521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 252.647 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Rp. 48.030			521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.050 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
				Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 39.700 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
				Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 76.594 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
				Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.800

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [662766] DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

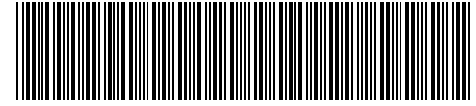
Halaman : IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6127 6127.EBA	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 267.750 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6127.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 169.520 Efisiensi Belanja Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.800 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.430 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.408 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 266.400 Efisiensi Belanja Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Keuangan Daerah		
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 327.360 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.007 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.080 Efisiensi Belanja Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 53.550 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

ttd.
Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si
NIP. 197206061992031012

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.09.1.662766/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:9286-4025-0420-1000

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [09] Ditjen Bina Keuangan Daerah
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [662766] DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

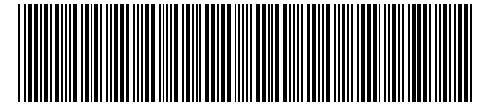
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah

ttd.
Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si
NIP. 197206061992031012



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.11.1.403222/2025**



DS:5913-3903-0602-7171

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 10

Tanggal : 11 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- Unit Organisasi : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (403222) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
- Sebesar : Rp. 57.481.498.000 (LIMA PULUH TUJUH MILIAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	57.481.498.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 57.481.498.000

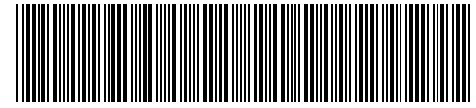
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025

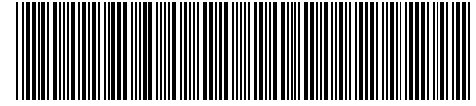


DS:5913-3903-0602-7171

Satker : (403222) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	57.481.498.000
01.03	PELAYANAN UMUM	Rp.	46.558.829.000
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	10.922.669.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025

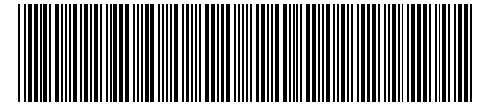


DS:5913-3903-0602-7171

Satker : (403222) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	10.922.669.000
CM.1283	Pembinaan inovasi daerah	Rp.	3.690.000.000
CM.6142	Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Rp.	6.058.579.000
CM.6143	Pembinaan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah	Rp.	1.174.090.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	46.558.829.000
WA.6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Rp.	113.800.000
WA.6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Rp.	45.706.766.000
WA.6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Rp.	14.770.000
WA.6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Rp.	723.493.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403222) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Halaman : I A. 1

Program	:	010.11.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa			10.922.669.000
Kegiatan	:	1283	Pembinaan inovasi daerah			3.690.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah pemerintah daerah yang mereplikasi inovasi pengendalian inflasi			
		2. 02	Penilaian inovasi daerah secara terpadu berbasis Indeks Inovasi Daerah.			
		3. 03	Jumlah Wilayah Metropolitan yang menerapkan Pilot Inovasi Tematik			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1283.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	38,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	427.156.000
Rincian Output	:	01 FBA.001	Optimalisasi Difusi Inovasi Dalam Pengendalian Inflasi pada Pemerintah Daerah	38.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	427.156.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1283.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	548,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	3.262.844.000
Rincian Output	:	01 UBA.001	Daerah Metropolitan yang difasilitasi dalam Penerapan Pilot Project Inovasi Tematik	2,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.500.000.000
		02 UBA.002	Daerah yang difasilitasi dalam Penguatan Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri	546,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.762.844.000
Kegiatan	:	6142	Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri			6.058.579.000
	:	1. 01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan lingkup Pemerintahan Dalam Negeri			
		2. 02	Jumlah Peraturan Menteri yang di Hasilkan			
		3. 03	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			
		4. 04	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Perkiraan Strategik Nasional			
		5. 05	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah			
		6. 06	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Indeks Tata Kelola Pemda			
		7. 07	Jumlah Rekomendasi Forum Diskusi Aktual/Seminar/ Diskusi Publik yang dihasilkan			
		8. 08	Jumlah Rekomendasi penguatan strategi kebijakan pusat dan daerah yang dihasilkan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403222) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	6142.AAG	Peraturan Menteri	3,00	PerMen, Perka, RPermen	450.000.000	
Rincian Output		:	01	AAG.001	Revisi Permendagri 19 Tahun 2020 "Tentang Pedoman IPKD"	1,00	PerMen	150.000.000
		:	02	AAG.002	Revisi Permendagri 17 Tahun 2016 "Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah"	1,00	PerMen	150.000.000
		:	03	AAG.003	Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri "Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah"	1,00	PerMen	150.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6142.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	30,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	4.009.887.000	
Rincian Output		:	01	ABL.001	Rekomendasi strategi kebijakan lingkup Politik, Hukum dan Pemerintahan Dalam Negeri.	5,00	Rekomendasi Kebijakan	791.308.000
		:	02	ABL.002	Rekomendasi Strategi Kebijakan lingkup Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik .	3,00	Rekomendasi Kebijakan	434.394.000
		:	03	ABL.003	Rekomendasi Strategi Kebijakan Lingkup Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Desa.	2,00	Rekomendasi Kebijakan	300.000.000
		:	04	ABL.004	Rekomendasi Strategi Kebijakan lingkup Pengembangan SDM, TI, dan Inovasi Pemdagri	1,00	Rekomendasi Kebijakan	150.000.000
		:	05	ABL.005	Forum Diskusi Aktual/ Diskusi Publik	7,00	Rekomendasi Kebijakan	1.065.606.000
		:	06	ABL.007	Penguatan Strategi Kebijakan Pusat dan Daerah	12,00	Rekomendasi Kebijakan	1.268.579.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6142.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	1,00	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	100.000.000	
Rincian Output		:	01	FAB.001	Pengembangan/Pembangunan Layanan Digital IPKD	1,00	Sistem Informasi	100.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6142.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	622,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	1.498.692.000	
Rincian Output		:	01	FBA.001	Pengukuran Pengelolaan Keuangan Daerah	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	500.000.000
		:	02	FBA.002	Penilaian Kepemimpinan Kepala Daerah	546,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	458.692.000
		:	03	FBA.003	Penilaian Tata Kelola Pemerintahan Daerah	38,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	540.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403222) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Halaman : I A. 3

Kegiatan	:	6143	Pembinaan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah			1.174.090.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah daerah yang mengalami peningkatan kualitas strategi kebijakan daerah dalam perumusan kebijakan				
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6143.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	25,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, KabKota	1.174.090.000
Rincian Output	:	01	FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Strategi Kebijakan di daerah	25.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.174.090.000
Program	:	010.11.WA	Program Dukungan Manajemen			46.558.829.000	
Kegiatan	:	6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri			113.800.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Layanan penyelesaian rancangan program legislasi dan bahan kebijakan yang disusun lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6128.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	113.800.000
Rincian Output	:	01	EBA.957	Pelayanan hukum dan kepatuhan internal	1.00	Layanan	113.800.000
Kegiatan	:	6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri			45.706.766.000	
	:	1. 01	Persentase Penyelesaian dokumen Perencanaan dan Anggaran lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri				
	:	2. 02	Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindaklanjut LHP lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri				
	:	3. 03	Persentase penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai SIMAK BMN lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri				
	:	4. 04	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri				
	:	5. 05	Rating kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan pada lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri				
	:	6. 06	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri				
	:	7. 07	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri				
	:	8. 08	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



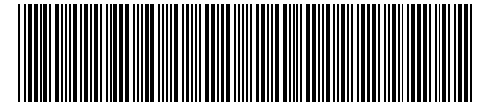
DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403222) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	2	:	6129.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	43.491.458.000
Rincian Output		:	01	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	1.331.194.000
		:	02	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	42.160.264.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6129.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	41,00	Unit, m2, Paket	492.400.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	25,00	Unit	224.400.000
		:	02	EBB.971 Layanan Prasarana Internal	16,00	Unit	268.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6129.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.722.908.000
Rincian Output		:	01	EBD.001 Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker - Eselon I Tanpa Satker Vertikal	1,00	Dokumen	456.872.000
		:	02	EBD.002 Dokumen Lakin Satker - Eselon I Tanpa Satker Vertikal	1,00	Dokumen	25.415.000
		:	03	EBD.003 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	242.780.000
		:	04	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5,00	Dokumen	65.460.000
		:	05	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5,00	Dokumen	225.350.000
		:	06	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	2,00	Dokumen	707.031.000
Kegiatan		:	6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri			14.770.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Pelayanan data/informasi lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri yang terstruktur menuju e-database Kementerian Dalam Negeri			
		:	2. 02	Persentase penyelesaian permohonan informasi pada lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri			
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6130.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	14.770.000
Rincian Output		:	01	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	14.770.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403222) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

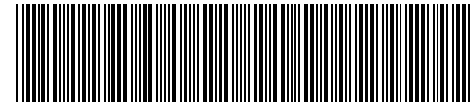
Halaman : I A. 5

Kegiatan	:	6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri			723.493.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase penyelesaian pembinaan jabatan fungsional, kepegawaian, dan sistem prosedur			
		2. 02	Capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri			
		3. 03	Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri			
Klasifikasi Rincian Output 6	:	6131.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	438.553.000
Rincian Output	:	01 EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2,00	Layanan	438.553.000
Klasifikasi Rincian Output 7	:	6131.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	25,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	200.000.000
Rincian Output	:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	25,00	Orang	200.000.000
Klasifikasi Rincian Output 8	:	6131.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	84.940.000
Rincian Output	:	01 EBD.001	Layanan Penyusunan Dokumen Manajemen Resiko BSKDN Kemendagri	1,00	Dokumen	84.940.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

ttd.
Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd
NIP. 196704291986021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



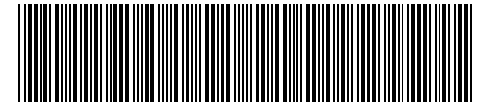
DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403222) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403222	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	27.420.706	29.357.392	703.400	-	-	57.481.498		
010.11.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	-	10.711.669	211.000	-	-	10.922.669		
1283	Pembinaan inovasi daerah	-	3.579.000	111.000	-	-	3.690.000		
1283.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	427.156	-	-	-	427.156	01 . 51	
01	RM	-	427.156	-	-	-	427.156	133@	
1283.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.151.844	111.000	-	-	3.262.844	01 . 51	
01	RM	-	3.151.844	111.000	-	-	3.262.844	133@	
6142	Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	-	5.958.579	100.000	-	-	6.058.579		
6142.AAG	Peraturan Menteri (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	450.000	-	-	-	450.000	01 . 51	
01	RM	-	450.000	-	-	-	450.000	133@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



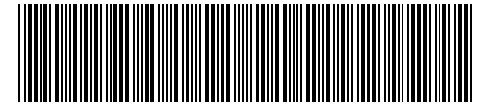
DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403222) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6142.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.009.887	-	-	-	4.009.887	01 . 51	
01	RM	-	4.009.887	-	-	-	4.009.887	133@	
6142.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	100.000	-	-	100.000	01 . 51	
01	RM	-	-	100.000	-	-	100.000	133	
6142.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.498.692	-	-	-	1.498.692	01 . 51	
01	RM	-	1.498.692	-	-	-	1.498.692	133@	
6143	Pembinaan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah	-	1.174.090	-	-	-	1.174.090		
6143.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.174.090	-	-	-	1.174.090	01 . 51	
01	RM	-	1.174.090	-	-	-	1.174.090	133@	
010.11.WA	Program Dukungan Manajemen	27.420.706	18.645.723	492.400	-	-	46.558.829		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



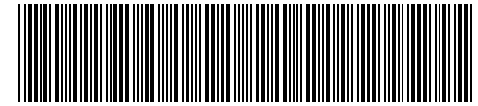
DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403222) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6128	Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	-	113.800	-	-	-	113.800		
6128.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	113.800	-	-	-	113.800	01 . 51	
01	RM	-	113.800	-	-	-	113.800	133	
6129	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	27.420.706	17.793.660	492.400	-	-	45.706.766		
6129.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	27.420.706	16.070.752	-	-	-	43.491.458	01 . 51	
01	RM	27.420.706	16.070.752	-	-	-	43.491.458	133@	
6129.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	492.400	-	-	492.400	01 . 51	
01	RM	-	-	492.400	-	-	492.400	133	
6129.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.722.908	-	-	-	1.722.908	01 . 51	
01	RM	-	1.722.908	-	-	-	1.722.908	133@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



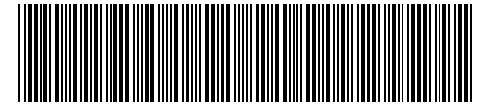
DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403222) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6130	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	-	14.770	-	-	-	14.770		
6130.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	14.770	-	-	-	14.770	01 . 51	
01 RM		-	14.770	-	-	-	14.770	133	
6131	Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	-	723.493	-	-	-	723.493		
6131.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	438.553	-	-	-	438.553	01 . 51	
01 RM		-	438.553	-	-	-	438.553	133@	
6131.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	200.000	-	-	-	200.000	01 . 51	
01 RM		-	200.000	-	-	-	200.000	133@	
6131.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	84.940	-	-	-	84.940	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403222) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kewenangan : (KP)

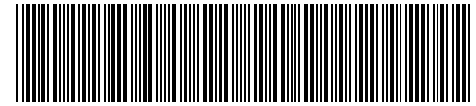
Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	84.940	-	-	-	84.940	133@	
JUMLAH		27.420.706	29.357.392	703.400	-	-	57.481.498		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

ttd.
Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd
NIP. 196704291986021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



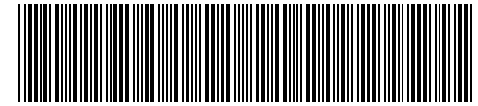
DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403222) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	403222	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.210.387	4.281.982	6.092.645	3.533.469	3.295.928	5.107.400	3.697.544	4.749.562	4.994.567	3.417.866	3.801.613	13.298.535	57.481.498
		BELANJA PEGAWAI	806.742	1.667.313	3.445.304	1.680.934	1.647.251	3.387.359	1.710.578	2.001.372	2.313.058	2.240.807	2.239.763	4.280.226	27.420.706
		BELANJA BARANG	403.645	2.609.643	2.647.309	1.846.854	1.647.198	1.679.259	1.984.012	2.612.354	2.475.220	1.065.578	1.547.739	8.838.581	29.357.392
		BELANJA MODAL	0	5.026	32	5.681	1.479	40.782	2.954	135.837	206.289	111.482	14.111	179.729	703.400
010.11.CM.1283		Pembinaan inovasi daerah	0	10.820	10.565	7.538	5.644	54.118	9.751	7.559	37.513	401.114	621.434	2.523.944	3.690.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	5.794	10.534	1.858	4.165	13.336	6.797	7.559	25.358	389.632	607.322	2.506.645	3.579.000
		53 BELANJA MODAL	0	5.026	32	5.681	1.479	40.782	2.954	0	12.155	11.482	14.111	17.299	111.000
010.11.CM.6142		Penguatan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	98.776	239.429	82.316	86.769	140.713	179.713	189.328	89.595	63.167	545.700	433.988	3.909.084	6.058.579
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	98.776	239.429	82.316	86.769	140.713	179.713	189.328	89.595	63.167	445.700	433.988	3.909.084	5.958.579
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
010.11.CM.6143		Pembinaan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	0	0	54.614	191.419	164.479	0	212.799	550.779	1.174.090
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	54.614	191.419	164.479	0	212.799	550.779	1.174.090
010.11.WA.6128		Layanan Legislasi dan Litigasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	0	809	37.787	5.354	2.072	0	4.588	6.375	0	0	53.343	3.472	113.800
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	809	37.787	5.354	2.072	0	4.588	6.375	0	0	53.343	3.472	113.800
010.11.WA.6129		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	1.111.611	3.979.194	5.941.272	3.348.313	3.110.027	4.821.145	3.405.209	4.392.885	4.655.367	2.438.431	2.467.526	6.035.787	45.706.766
		51 BELANJA PEGAWAI	806.742	1.667.313	3.445.304	1.680.934	1.647.251	3.387.359	1.710.578	2.001.372	2.313.058	2.240.807	2.239.763	4.280.226	27.420.706
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	304.869	2.311.882	2.495.967	1.667.379	1.462.776	1.433.785	1.694.631	2.255.677	2.148.175	197.625	227.763	1.593.131	17.793.660

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (11) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403222) Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	010.11.WA.6130	53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	135.837	194.134	0	0	162.429	492.400
		Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	4.860	0	3.860	1.810	0	4.240	14.770
	010.11.WA.6131	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	4.860	0	3.860	1.810	0	4.240	14.770
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	0	51.729	20.705	85.494	37.472	52.425	29.195	61.728	70.180	30.811	12.524	271.230	723.493
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	51.729	20.705	85.494	37.472	52.425	29.195	61.728	70.180	30.811	12.524	271.230	723.493

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

ttd.
Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd
NIP. 196704291986021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
IV A. B L O K I R**



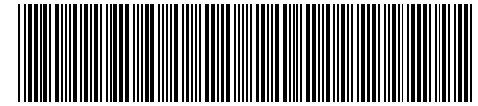
DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [11] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [403222] Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
403222	Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 6.492.173		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 6.492.173	1283.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
010.11.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa		521211 Belanja Bahan(RM)
1283	Pembinaan inovasi daerah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 87.497
1283.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 52.536		522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.000
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.800		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.600
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.000		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 155.560		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 164.552
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.760		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.111
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 188.500		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.240

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
IV A. B L O K I R**



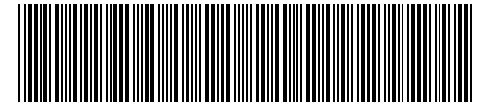
DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [11] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [403222] Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6142	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6142.AAG	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6142.AAG	Peraturan Menteri	6142.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.145		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.590
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 78.548		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 750.645
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6142.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 144.900
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 310.839		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM)
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 186.321
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.650		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.360
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 288.400		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 180.400
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 770.948		kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 410.031
			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
IV A. B L O K I R**



DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [11] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [403222] Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6143	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.725 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6129.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 256.496 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 128.478 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 286.385 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.500 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	6143 Pembinaan Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah		522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.900 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6143.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	6129.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 86.745 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 108.440 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.525 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 425.470 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
010.11.WA	Program Dukungan Manajemen		
	6129 Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
IV A. B L O K I R**



DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [11] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [403222] Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6131	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6131.EBC	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 123.400		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.320
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 288.338		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 85.800
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Layanan Manajemen SDM Internal
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.895	521211 Belanja Bahan(RM)		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.650		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.500	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya		
6131.EBA Pengelolaan Organisasi dan SDM Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Layanan Dukungan Manajemen Internal	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
521211 Belanja Bahan(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.501		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 31.387	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
kebijakan penyesuaian belanja negara dan kebijakan pemerintah lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.100		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.400	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6131.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	521211 Belanja Bahan(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.922			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
IV A. B L O K I R**



DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [11] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [403222] Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN
	Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 499		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp. 1.530		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

ttd.
Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd
NIP. 196704291986021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.11.1.403222/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:5913-3903-0602-7171

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [11] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [403222] Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

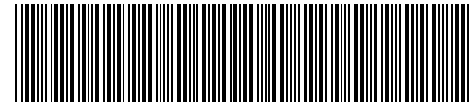
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

ttd.
Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd
NIP. 196704291986021001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.12.2.506138/2025**



DS:7998-3049-3608-0905

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 12

Tanggal : 05 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Provinsi : (02) JAWA BARAT
4. Kode/Nama Satker : (506138) BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
- Sebesar : Rp. 21.352.200.000 (DUA PULUH SATU MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH DUA JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	20.260.320.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	1.091.880.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN B O G O R (023) Rp. 21.352.200.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506138/2025



DS:7998-3049-3608-0905

Satker : (506138) BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	21.352.200.000
01.03	PELAYANAN UMUM	Rp.	19.962.870.000
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	1.389.330.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506138/2025

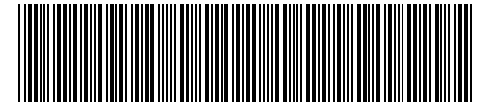


DS:7998-3049-3608-0905

Satker : (506138) BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	1.389.330.000
CM.6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Rp.	1.389.330.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	19.962.870.000
WA.6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	19.912.299.000
WA.6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	50.571.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506138/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7998-3049-3608-0905

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (506138) BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

Halaman : I A. 1

Program	: 010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa			1.389.330.000
Kegiatan	: 6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri			1.389.330.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 02	Jumlah Pembinaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri			
	: 2. 03	Jumlah Pengembangan Kompetensi Standarisasi dan Sertifikasi			
	: 3. 04	Jumlah Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri			
	: 4. 05	Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan			
	: 5. 06	Jumlah Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis			
	: 6. 07	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda			
	: 7. 08	Jumlah KDH dan WKDH yang mengikuti orientasorientasi			
	: 8. 09	Jumlah Camat yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pembangunan			
	: 9. 11	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Perda dan Perkada			
	: 10. 12	Jumlah Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah			
	: 11. 99	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi perencanaan dan penganggaran SPM			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 6144.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	468,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	1.389.330.000
Rincian Output	: 01 FAC.009	Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	468,00	Orang	1.389.330.000
Program	: 010.12.WA	Program Dukungan Manajemen			19.962.870.000
Kegiatan	: 6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia			19.912.299.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran			
	: 2. 02	Presentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP			
	: 3. 03	Presentase Penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu			
	: 4. 04	Presentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506138/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7998-3049-3608-0905

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (506138) BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN

Halaman : I A. 2

Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 5. 05 Presentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan
- 6. 06 Hasil Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 7. 07 Presentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu

Klasifikasi Rincian Output	1	:	6133.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	9.257.469.000
Rincian Output		:	01 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	28.979.000
		:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	9.228.490.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6133.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	10,00	Unit, m2, Paket	10.631.400.000
Rincian Output		:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	10.00	Unit	10.631.400.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6133.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	23.430.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	12.120.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	4.125.000
		:	03 EBD.955	Pengelolaan keuangan	1.00	Dokumen	7.185.000
Kegiatan		:	6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia			50.571.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6135.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	31,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	50.571.000
Rincian Output		:	01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	31.00	Orang	50.571.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506138/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7998-3049-3608-0905

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (506138) BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	3.842.545	6.878.255	10.631.400	-	-	21.352.200		
010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	-	1.389.330	-	-	-	1.389.330		
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	1.389.330	-	-	-	1.389.330		
6144.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (02.05 JAWA BARAT / KAB. BOGOR)	-	1.389.330	-	-	-	1.389.330	02 . 05	
01	RM	-	307.450	-	-	-	307.450	023	
04	PNBP	-	1.081.880	-	-	-	1.081.880	023	
010.12.WA	Program Dukungan Manajemen	3.842.545	5.488.925	10.631.400	-	-	19.962.870		
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.842.545	5.438.354	10.631.400	-	-	19.912.299		
6133.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (02.05 JAWA BARAT / KAB. BOGOR)	3.842.545	5.414.924	-	-	-	9.257.469	02 . 05	
01	RM	3.842.545	5.414.924	-	-	-	9.257.469	023	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506138/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7998-3049-3608-0905

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (506138) BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Kewenangan : (KD)

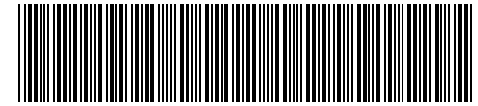
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6133.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (02.05 JAWA BARAT / KAB. BOGOR)	-	-	10.631.400	-	-	10.631.400	02 . 05	
01 RM		-	-	10.631.400	-	-	10.631.400	023	
6133.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (02.05 JAWA BARAT / KAB. BOGOR)	-	23.430	-	-	-	23.430	02 . 05	
01 RM		-	13.430	-	-	-	13.430	023	
04 PNBP		-	10.000	-	-	-	10.000	023	
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	50.571	-	-	-	50.571		
6135.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (02.05 JAWA BARAT / KAB. BOGOR)	-	50.571	-	-	-	50.571	02 . 05	
01 RM		-	50.571	-	-	-	50.571	023	
JUMLAH		3.842.545	6.878.255	10.631.400	-	-	21.352.200		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506138/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



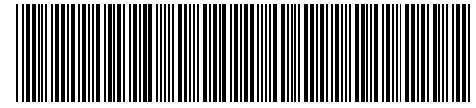
DS:7998-3049-3608-0905

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (506138) BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	506138	BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	537.185	1.364.149	997.398	579.353	689.166	714.187	683.016	896.007	877.082	5.585.194	3.454.545	4.974.918	21.352.200
		BELANJA PEGAWAI	206.562	228.899	452.301	215.765	217.366	431.829	227.669	224.562	436.768	370.278	370.278	460.267	3.842.545
		BELANJA BARANG	330.623	742.888	545.097	363.588	471.799	282.358	455.347	671.445	440.314	826.345	1.028.360	720.091	6.878.255
		BELANJA MODAL	0	392.362	0	0	0	0	0	0	0	4.388.571	2.055.907	3.794.560	10.631.400
010.12.CM.6144		Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	0	307.450	0	0	0	39.533	75.554	0	0	431.536	535.257	0	1.389.330
010.12.WA.6133		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	307.450	0	0	0	39.533	75.554	0	0	431.536	535.257	0	1.389.330
010.12.WA.6133		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	536.422	1.051.438	996.132	578.087	683.567	662.972	604.433	877.736	877.082	5.150.224	2.919.287	4.974.918	19.912.299
		51 BELANJA PEGAWAI	206.562	228.899	452.301	215.765	217.366	431.829	227.669	224.562	436.768	370.278	370.278	460.267	3.842.545
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	329.860	430.177	543.831	362.322	466.201	231.143	376.764	653.174	440.314	391.376	493.103	720.091	5.438.354
		53 BELANJA MODAL	0	392.362	0	0	0	0	0	0	0	4.388.571	2.055.907	3.794.560	10.631.400
010.12.WA.6135		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	763	5.261	1.266	1.266	5.598	11.682	3.030	18.271	0	3.434	0	0	50.571
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	763	5.261	1.266	1.266	5.598	11.682	3.030	18.271	0	3.434	0	0	50.571
		PERKIRAAN PENERIMAAN	0	0	0	0	0	0	73.125	108.000	308.000	308.000	567.725	0	1.364.850

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506138/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7998-3049-3608-0905

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (506138) BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

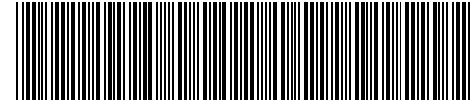
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- PNBPN (425421)	0	0	0	0	0	0	73.125	108.000	308.000	308.000	567.725	0	1.364.850

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506138/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7998-3049-3608-0905

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [12] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [506138] BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506138/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:7998-3049-3608-0905

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [12] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [506138] BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.12.1.403231/2025**



DS:7520-5833-5498-0069

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 22

Tanggal : 18 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- Kode>Nama Satker : (403231) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
- Sebesar : Rp. 124.879.480.000 (SERATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	108.925.946.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	15.953.534.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- KPPN JAKARTA IV (133) Rp. 124.879.480.000

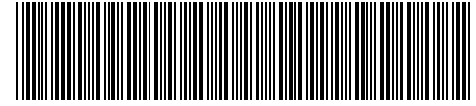
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.1.403231/2025

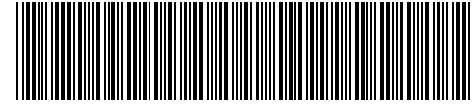


DS:7520-5833-5498-0069

Satker : (403231) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	124.879.480.000
01.03	PELAYANAN UMUM	Rp.	81.237.460.000
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	43.642.020.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.1.403231/2025

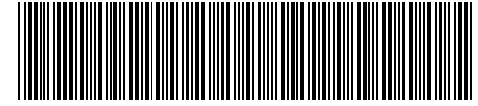


DS:7520-5833-5498-0069

Satker : (403231) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	45.441.612.000
CM.1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	Rp.	1.799.592.000
CM.6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Rp.	43.642.020.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	79.437.868.000
WA.6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	130.089.000
WA.6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	78.074.105.000
WA.6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	784.863.000
WA.6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	448.811.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.1.403231/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7520-5833-5498-0069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403231) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Halaman : I A. 1

Program	:	010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa			45.441.612.000
Kegiatan	:	1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi			1.799.592.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Standard Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri			
		2. 02	Jumlah Pejabat Strategis Pemerintahan Dalam Negeri yang Tersertifikasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1285.ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	1.869,00	Orang, Sertifikat	1.596.002.000
Rincian Output	:	01 ADI.002	Sertifikasi Jabatan Aparatur Kementerian Dalam Negeri (RM)	1869,00	Orang	1.596.002.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1285.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	6,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	203.590.000
Rincian Output	:	01 AFA.001	NSPK Standarisasi dan Sertifikasi	6,00	NSPK	203.590.000
Kegiatan	:	6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri			43.642.020.000
	:	1. 02	Jumlah Pembinaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri			
	:	2. 03	Jumlah Pengembangan Kompetensi Standarisasi dan Sertifikasi			
	:	3. 04	Jumlah Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri			
	:	4. 05	Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan			
	:	5. 06	Jumlah Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis			
	:	6. 07	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda			
	:	7. 08	Jumlah KDH dan WKDH yang mengikuti orientasorientasi			
	:	8. 09	Jumlah Camat yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pembangunan			
	:	9. 11	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Perda dan Perkada			
	:	10. 12	Jumlah Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah			
	:	11. 99	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi perencanaan dan penganggaran SPM			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.1.403231/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7520-5833-5498-0069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403231) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	3	:	6144.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	7.980,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	32.812.144.000	
Rincian Output		:	01	FAC.003	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan	2819.00	Orang	12.912.591.000
		:	02	FAC.006	Sertifikasi Jabatan Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	240.00	Orang	62.900.000
		:	03	FAC.007	Aparatur mengikuti Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	2910.00	Orang	14.597.321.000
		:	04	FAC.008	Aparatur Mengikuti Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis	1741.00	Orang	4.581.155.000
		:	05	FAC.S02	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 6 Hari Bidang Standarisasi dan Sertifikasi	30.00	Orang	3.100.000
		:	06	FAC.S03	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	60.00	Orang	152.735.000
		:	07	FAC.S04	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Manajemen Kepemimpinan	60.00	Orang	149.080.000
		:	08	FAC.S05	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 5 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	60.00	Orang	149.165.000
		:	09	FAC.S06	Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 12 Hari Bidang Fungsional dan Teknis	60.00	Orang	204.097.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6144.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.842,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	10.829.876.000	
Rincian Output		:	01	UAC.001	KDH dan WKDH yang mengikuti Orientasi (PN)	1092.00	Orang	10.350.000.000
		:	02	UAC.002	Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	120.00	Orang	173.536.000
		:	03	UAC.004	Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah	120.00	Orang	163.500.000
		:	04	UAC.005	Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Perda dan Perkada	150.00	Orang	43.450.000
		:	05	UAC.007	Pejabat Fungsional Penata Perizinan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	360.00	Orang	99.390.000
Program		:	010.12.WA	Program Dukungan Manajemen			79.437.868.000	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.1.403231/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7520-5833-5498-0069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403231) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Halaman : I A. 3

Kegiatan	:	6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia			130.089.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Presentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6132.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	130.089.000
Rincian Output	:	01 EBA.957	Layanan Hukum	1,00	Layanan	130.089.000
Kegiatan	:	6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia			78.074.105.000
	:	1. 01	Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran			
	:	2. 02	Presentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP			
	:	3. 03	Presentase Penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu			
	:	4. 04	Presentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan			
	:	5. 05	Presentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan			
	:	6. 06	Hasil Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	:	7. 07	Presentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6133.AEA	Koordinasi	3,00	kegiatan	1.814.570.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Koordinasi, dan sinergitas program pengembangan kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	3,00	kegiatan	1.814.570.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6133.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	67.478.001.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	1.437.725.000
	:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	66.040.276.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.1.403231/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



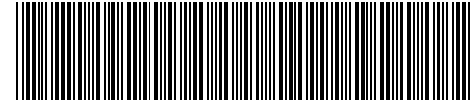
DS:7520-5833-5498-0069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403231) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	4	:	6133.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket	7.483.760.000
Rincian Output		:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.00	Unit	7.483.760.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6133.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.297.774.000
Rincian Output		:	01 EBD.002	Layanan Penyusunan LAKIN untuk Unit Eselon I dengan jumlah satker 6	1.00	Dokumen	80.483.000
		:	02 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	168.095.000
		:	03 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	315.852.000
		:	04 EBD.955	Pengelolaan keuangan	3.00	Dokumen	733.344.000
Kegiatan		:	6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia			784.863.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Presentase Pengaduan Masyarakat Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti			
		:	2. 02	Presentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6134.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	784.863.000
Rincian Output		:	01 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	633.883.000
		:	02 EBA.965	Layanan Integrasi Sistem Informasi	1.00	Layanan	150.980.000
Kegiatan		:	6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia			448.811.000
		:	1. 01	Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6135.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	183.074.000
Rincian Output		:	01 EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	5.00	Dokumen	183.074.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.1.403231/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7520-5833-5498-0069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403231) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

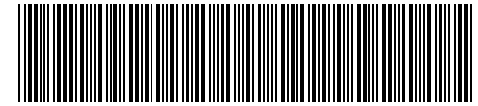
Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	8	:	6135.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	206,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	265.737.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	206.00	Orang	265.737.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.1.403231/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



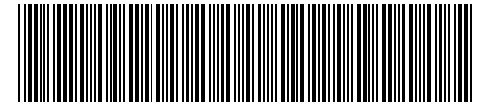
DS:7520-5833-5498-0069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403231) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	38.896.528	78.499.192	7.483.760	-	-	124.879.480		
010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	-	45.441.612	-	-	-	45.441.612		
1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	-	1.799.592	-	-	-	1.799.592		
1285.ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.596.002	-	-	-	1.596.002	01 . 51	
01	RM	-	5.250	-	-	-	5.250	133	
04	PNBP	-	1.590.752	-	-	-	1.590.752	133	
1285.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	203.590	-	-	-	203.590	01 . 51	
01	RM	-	46.250	-	-	-	46.250	133	
04	PNBP	-	157.340	-	-	-	157.340	133	
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	43.642.020	-	-	-	43.642.020		
6144.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	32.812.144	-	-	-	32.812.144	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.1.403231/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



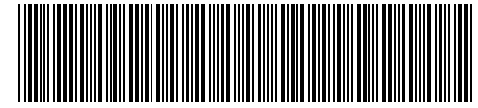
DS:7520-5833-5498-0069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403231) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	19.644.368	-	-	-	19.644.368	133	
04 PNPB		-	13.167.776	-	-	-	13.167.776	133@	
6144.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	10.829.876	-	-	-	10.829.876	01 . 51	
01 RM		-	10.829.876	-	-	-	10.829.876	133	
010.12.WA	Program Dukungan Manajemen	38.896.528	33.057.580	7.483.760	-	-	79.437.868		
6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	130.089	-	-	-	130.089		
6132.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	130.089	-	-	-	130.089	01 . 51	
01 RM		-	130.089	-	-	-	130.089	133	
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.896.528	31.693.817	7.483.760	-	-	78.074.105		
6133.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.814.570	-	-	-	1.814.570	01 . 51	
01 RM		-	1.804.570	-	-	-	1.804.570	133	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.1.403231/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



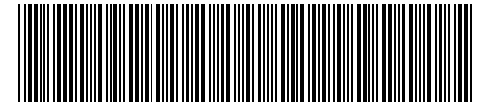
DS:7520-5833-5498-0069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403231) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	10.000	-	-	-	10.000	133@	
6133.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	38.896.528	28.581.473	-	-	-	67.478.001	01 . 51	
01	RM	38.896.528	28.581.473	-	-	-	67.478.001	133	
6133.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	7.483.760	-	-	7.483.760	01 . 51	
01	RM	-	-	6.491.094	-	-	6.491.094	133	
04	PNBP	-	-	992.666	-	-	992.666	133	
6133.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.297.774	-	-	-	1.297.774	01 . 51	
01	RM	-	1.262.774	-	-	-	1.262.774	133	
04	PNBP	-	35.000	-	-	-	35.000	133@	
6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	784.863	-	-	-	784.863		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.1.403231/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7520-5833-5498-0069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403231) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kewenangan : (KP)

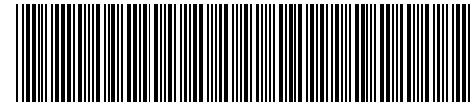
Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6134.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	784.863	-	-	-	784.863	01 . 51	
01 RM		-	784.863	-	-	-	784.863	133	
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	448.811	-	-	-	448.811		
6135.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	183.074	-	-	-	183.074	01 . 51	
01 RM		-	183.074	-	-	-	183.074	133	
6135.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	265.737	-	-	-	265.737	01 . 51	
01 RM		-	265.737	-	-	-	265.737	133	
JUMLAH		38.896.528	78.499.192	7.483.760	-	-	124.879.480		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.1.403231/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7520-5833-5498-0069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403231) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	7.864.018	4.800.447	9.731.398	3.728.729	17.993.069	7.372.673	5.399.772	5.856.983	6.236.418	9.394.872	23.074.973	23.426.130	124.879.480
		BELANJA PEGAWAI	1.847.159	2.629.539	5.402.381	2.589.337	2.538.015	5.264.092	2.665.729	2.733.654	2.862.491	3.451.565	3.175.341	3.737.223	38.896.528
		BELANJA BARANG	6.016.858	2.170.908	4.329.017	1.139.391	15.455.054	2.108.581	2.734.043	3.123.329	3.373.927	5.747.341	19.899.632	12.401.112	78.499.192
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.965	0	7.287.795	7.483.760
	010.12.CM.1285	Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi	179.862	33.871	4.141	650.400	149.435	14.697	12.662	289.619	311	149.126	185.467	130.001	1.799.592
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	179.862	33.871	4.141	650.400	149.435	14.697	12.662	289.619	311	149.126	185.467	130.001	1.799.592
	010.12.CM.6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	3.058.061	56.988	4.134.699	406.263	11.211.138	1.802.878	1.513.492	1.376.626	254.687	1.090.370	8.667.341	10.069.477	43.642.020
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	3.058.061	56.988	4.134.699	406.263	11.211.138	1.802.878	1.513.492	1.376.626	254.687	1.090.370	8.667.341	10.069.477	43.642.020
	010.12.WA.6132	Layanan Legislasi dan Litigasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	48.429	2	2	2	43.617	0	0	0	0	0	0	38.038	130.089
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	48.429	2	2	2	43.617	0	0	0	0	0	0	38.038	130.089
	010.12.WA.6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.496.538	4.697.907	5.533.990	2.655.386	6.508.466	5.475.616	3.864.320	4.128.334	5.785.675	7.868.733	14.133.853	12.925.289	78.074.105
		51 BELANJA PEGAWAI	1.847.159	2.629.539	5.402.381	2.589.337	2.538.015	5.264.092	2.665.729	2.733.654	2.862.491	3.451.565	3.175.341	3.737.223	38.896.528
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	2.649.379	2.068.368	131.609	66.048	3.970.451	211.525	1.198.591	1.394.680	2.923.184	4.221.202	10.958.511	1.900.271	31.693.817
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.965	0	7.287.795	7.483.760
	010.12.WA.6134	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Bidang	29.755	0	14.076	0	29.042	28.110	0	11.032	179.565	270.948	30.528	191.806	784.863

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.1.403231/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7520-5833-5498-0069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (403231) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pengembangan Sumber Daya Manusia													
	010.12.WA.6135	52 BELANJA BARANG DAN JASA	29.755	0	14.076	0	29.042	28.110	0	11.032	179.565	270.948	30.528	191.806	784.863
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	51.372	11.679	44.490	16.678	51.372	51.372	9.298	51.372	16.180	15.696	57.784	71.519	448.811
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	51.372	11.679	44.490	16.678	51.372	51.372	9.298	51.372	16.180	15.696	57.784	71.519	448.811
		PERKIRAAN PENERIMAAN	0	0	0	0	200.000	2.214.112	2.147.600	2.147.600	2.097.600	2.047.600	2.431.608	4.494.516	17.780.636
		- PNBP (425421)	0	0	0	0	0	2.047.600	2.047.600	2.047.600	2.047.600	2.047.600	2.409.300	1.545.602	14.192.902
		- PNBP (425429)	0	0	0	0	200.000	166.512	100.000	100.000	50.000	0	22.308	2.948.914	3.587.734

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.1.403231/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7520-5833-5498-0069

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [12] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [403231] BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN
403231	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			Efisiensi Anggaran
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	74.947	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang	Rp.	74.947	522151 Belanja Jasa Profesi(PNBP)
010.12.CM 6144	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.400
6144.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara			Efisiensi Anggaran
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(PNBP)			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.947			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Inpres No 1 Tahun 2025			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.520
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Efisiensi Anggaran
010.12.WA 6133	Program Dukungan Manajemen Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia			Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6133.AEA	Koordinasi			
	521211 Belanja Bahan(PNBP)			
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.310			
	Efisiensi Anggaran			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)			
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.330			
	Efisiensi Anggaran			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)			
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.360			
	Efisiensi Anggaran			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
6133.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			
	521211 Belanja Bahan(PNBP)			
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.080			

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.1.403231/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:7520-5833-5498-0069

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [12] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [403231] BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

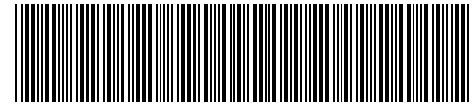
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.12.2.403216/2025**



DS:6782-3752-0913-8069

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 14

Tanggal : 12 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Provinsi : (02) JAWA BARAT
4. Kode>Nama Satker : (403216) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG
- Sebesar : Rp. 33.069.255.000 (TIGA PULUH TIGA MILIAR ENAM PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	20.166.843.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	12.902.412.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANDUNG I (022) Rp. 33.069.255.000

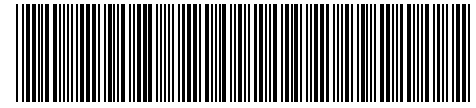
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.403216/2025



DS:6782-3752-0913-8069

Satker : (403216) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	33.069.255.000
01.03	PELAYANAN UMUM	Rp.	21.088.043.000
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	11.981.212.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.403216/2025



DS:6782-3752-0913-8069

Satker : (403216) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG

CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	11.981.212.000
CM.6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Rp.	11.981.212.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	21.088.043.000
WA.6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	21.036.210.000
WA.6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	51.833.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.403216/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6782-3752-0913-8069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (403216) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG

Halaman : I A. 1

Program	: 010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa				11.981.212.000
Kegiatan	: 6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri				11.981.212.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 02	Jumlah Pembinaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri				
	: 2. 03	Jumlah Pengembangan Kompetensi Standarisasi dan Sertifikasi				
	: 3. 04	Jumlah Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				
	: 4. 05	Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan				
	: 5. 06	Jumlah Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis				
	: 6. 07	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda				
	: 7. 08	Jumlah KDH dan WKDH yang mengikuti orientasorientasi				
	: 8. 09	Jumlah Camat yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pembangunan				
	: 9. 11	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Perda dan Perkada				
	: 10. 12	Jumlah Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah				
	: 11. 99	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi perencanaan dan penganggaran SPM				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 6144.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	5.599,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja		11.941.212.000
Rincian Output	: 01 FAC.009	Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	5599.00	Orang		11.941.212.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 6144.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	60,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja		40.000.000
Rincian Output	: 01 UAC.002	Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	60.00	Orang		40.000.000
Program	: 010.12.WA	Program Dukungan Manajemen				21.088.043.000
Kegiatan	: 6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia				21.036.210.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.403216/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6782-3752-0913-8069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (403216) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG

Halaman : I A. 2

Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 2. 02 Presentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP
- 3. 03 Presentase Penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu
- 4. 04 Presentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan
- 5. 05 Presentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan
- 6. 06 Hasil Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 7. 07 Presentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu

Klasifikasi Rincian Output	1	:	6133.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	17.419.380.000
Rincian Output		:	01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	121.420.000
		:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	17.297.960.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6133.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	128,00	Unit, m2, Paket	3.464.600.000
Rincian Output		:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	128,00	Unit	3.464.600.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6133.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	152.230.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	67.510.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	22.466.000
		:	03 EBD.955	Pengelolaan keuangan	1,00	Dokumen	62.254.000
Kegiatan		:	6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia			51.833.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.403216/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:6782-3752-0913-8069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (403216) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG

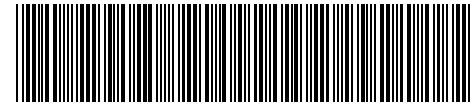
Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	4	:	6135.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	58,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	51.833.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	58.00	Orang	51.833.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.403216/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



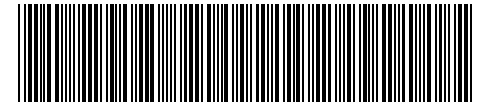
DS:6782-3752-0913-8069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (403216) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG	11.004.520	19.000.135	3.064.600	-	-	33.069.255		
010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	-	11.981.212	-	-	-	11.981.212		
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	11.981.212	-	-	-	11.981.212		
6144.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (02.51 JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)	-	11.941.212	-	-	-	11.941.212	02 . 51	
04	PNBP	-	11.941.212	-	-	-	11.941.212	022	
6144.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (02.51 JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)	-	40.000	-	-	-	40.000	02 . 51	
01	RM	-	40.000	-	-	-	40.000	022	
010.12.WA	Program Dukungan Manajemen	11.004.520	7.018.923	3.064.600	-	-	21.088.043		
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.004.520	6.967.090	3.064.600	-	-	21.036.210		
6133.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (02.51 JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)	11.004.520	6.414.860	-	-	-	17.419.380	02 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.403216/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6782-3752-0913-8069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (403216) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		11.004.520	6.414.860	-	-	-	17.419.380	022	
6133.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (02.51 JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)	-	400.000	3.064.600	-	-	3.464.600	02 . 51	
01 RM		-	200.000	2.323.400	-	-	2.523.400	022	
04 PNB		-	200.000	741.200	-	-	941.200	022	
6133.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (02.51 JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)	-	152.230	-	-	-	152.230	02 . 51	
01 RM		-	132.230	-	-	-	132.230	022	
04 PNB		-	20.000	-	-	-	20.000	022	
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	51.833	-	-	-	51.833		
6135.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (02.51 JAWA BARAT / KOTA BANDUNG)	-	51.833	-	-	-	51.833	02 . 51	
01 RM		-	51.833	-	-	-	51.833	022	
JUMLAH		11.004.520	19.000.135	3.064.600	-	-	33.069.255		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.403216/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



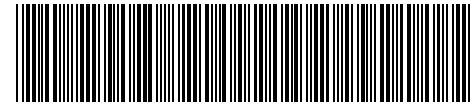
DS:6782-3752-0913-8069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (403216) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	403216	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.757.686	1.548.192	1.785.075	2.004.637	1.154.690	2.572.833	2.243.778	2.646.178	3.816.912	4.601.104	4.301.349	4.636.819	33.069.255
		BELANJA PEGAWAI	736.896	745.005	750.636	1.550.879	739.816	1.573.878	736.384	756.832	829.131	826.118	873.526	885.417	11.004.520
		BELANJA BARANG	1.020.790	803.187	1.034.439	453.758	414.874	998.955	1.507.394	1.723.936	2.275.257	3.181.278	2.330.211	3.256.056	19.000.135
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	165.410	712.524	593.708	1.097.612	495.346	3.064.600
010.12.CM.6144		Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	0	363.126	322.894	60.722	30.507	0	619.683	1.104.556	1.583.966	2.919.256	1.999.999	2.976.502	11.981.212
010.12.WA.6133		52 BELANJA BARANG DAN JASA Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	363.126	322.894	60.722	30.507	0	619.683	1.104.556	1.583.966	2.919.256	1.999.999	2.976.502	11.981.212
010.12.WA.6135		51 BELANJA PEGAWAI	736.896	745.005	750.636	1.550.879	739.816	1.573.878	736.384	756.832	829.131	826.118	873.526	885.417	11.004.520
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.020.790	432.959	693.611	393.036	379.367	998.955	884.211	615.880	687.791	258.521	326.712	275.257	6.967.090
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	165.410	712.524	593.708	1.097.612	495.346	3.064.600
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	7.102	17.934	0	5.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.297	51.833
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	7.102	17.934	0	5.000	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.297	51.833
		PERKIRAAN PENERIMAAN	779.284	584.799	0	0	0	393.738	2.542.295	5.785.936	2.365.544	4.151.975	0	0	16.603.571
		- PNBP (425151)	0	0	0	0	0	87.858	0	0	0	0	0	0	87.858
		- PNBP (425421)	656.434	441.474	0	0	0	305.880	2.430.470	5.784.361	2.217.494	4.150.400	0	0	15.986.513

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.403216/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6782-3752-0913-8069

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (403216) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- PNBP (425429)	122.850	143.325	0	0	0	0	111.825	1.575	148.050	1.575	0	0	529.200

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.403216/2025
IV A. B L O K I R**



DS:6782-3752-0913-8069

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [12] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [403216] PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.403216/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:6782-3752-0913-8069

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [12] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [403216] PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

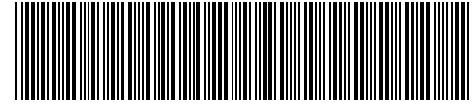
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.12.2.506137/2025**



DS:5316-2923-1507-0003

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 13

Tanggal : 18 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
4. Kode>Nama Satker : (506137) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI
- Sebesar : Rp. 23.224.312.000 (DUA PULUH TIGA MILIAR DUA RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	14.956.878.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	8.267.434.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BUKITTINGGI (011) Rp. 23.224.312.000

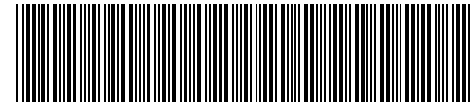
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506137/2025

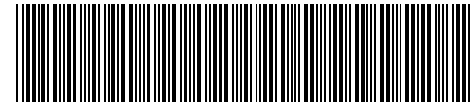


DS:5316-2923-1507-0003

Satker : (506137) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	23.224.312.000
01.03	PELAYANAN UMUM	Rp.	16.298.686.000
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	6.925.626.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506137/2025

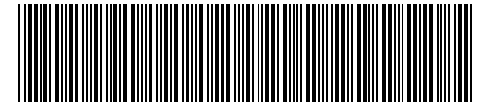


DS:5316-2923-1507-0003

Satker : (506137) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI

CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	6.925.626.000
CM.6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Rp.	6.925.626.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	16.298.686.000
WA.6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	15.856.348.000
WA.6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	442.338.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506137/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5316-2923-1507-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (506137) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI

Halaman : I A. 1

Program	:	010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa			6.925.626.000
Kegiatan	:	6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri			6.925.626.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 02	Jumlah Pembinaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri			
		2. 03	Jumlah Pengembangan Kompetensi Standarisasi dan Sertifikasi			
		3. 04	Jumlah Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri			
		4. 05	Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan			
		5. 06	Jumlah Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis			
		6. 07	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda			
		7. 08	Jumlah KDH dan WKDH yang mengikuti orientasorientasi			
		8. 09	Jumlah Camat yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pembangunan			
		9. 11	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Perda dan Perkada			
		10. 12	Jumlah Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah			
		11. 99	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi perencanaan dan penganggaran SPM			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6144.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.891,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	6.838.858.000
Rincian Output	:	01 FAC.009	Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	1891.00	Orang	6.838.858.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6144.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	60,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	86.768.000
Rincian Output	:	01 UAC.002	Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	60.00	Orang	86.768.000
Program	:	010.12.WA	Program Dukungan Manajemen			16.298.686.000
Kegiatan	:	6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia			15.856.348.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506137/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5316-2923-1507-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (506137) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI

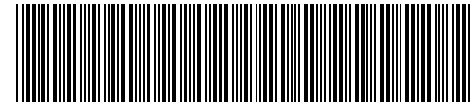
Halaman : I A. 2

Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 2. 02 Presentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP
- 3. 03 Presentase Penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu
- 4. 04 Presentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan
- 5. 05 Presentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan
- 6. 06 Hasil Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 7. 07 Presentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu

Klasifikasi Rincian Output	1	:	6133.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	14.636.968.000
Rincian Output		:	01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	20.300.000
		:	02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	14.616.668.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6133.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	271,00	Unit, m2, Paket	1.159.360.000
Rincian Output		:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	271,00	Unit	1.159.360.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6133.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	60.020.000
Rincian Output		:	01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	10.010.000
		:	02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	10.000
		:	03 EBD.955	Pengelolaan keuangan	1,00	Dokumen	50.000.000
Kegiatan		:	6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia			442.338.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506137/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:5316-2923-1507-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (506137) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI

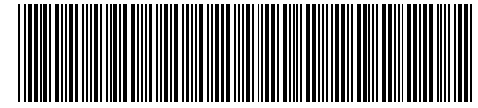
Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	4	:	6135.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	51,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	442.338.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	51,00	Orang	442.338.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506137/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5316-2923-1507-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (506137) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI	8.914.867	13.150.085	1.159.360	-	-	23.224.312		
010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	-	6.925.626	-	-	-	6.925.626		
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	6.925.626	-	-	-	6.925.626		
6144.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (08.51 SUMATERA BARAT / KOTA BUKITTINGGI)	-	6.838.858	-	-	-	6.838.858	08 . 51	
04	PNBP	-	6.838.858	-	-	-	6.838.858	011	
6144.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (08.51 SUMATERA BARAT / KOTA BUKITTINGGI)	-	86.768	-	-	-	86.768	08 . 51	
01	RM	-	86.768	-	-	-	86.768	011	
010.12.WA	Program Dukungan Manajemen	8.914.867	6.224.459	1.159.360	-	-	16.298.686		
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.914.867	5.782.121	1.159.360	-	-	15.856.348		
6133.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (08.51 SUMATERA BARAT / KOTA BUKITTINGGI)	8.914.867	5.722.101	-	-	-	14.636.968	08 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506137/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:5316-2923-1507-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (506137) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI
Kewenangan : (KD)

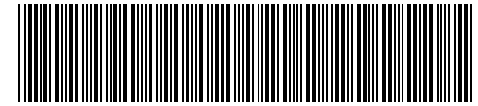
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		8.914.867	5.701.801	-	-	-	14.616.668	011	
04 PNB		-	20.300	-	-	-	20.300	011	
6133.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (08.51 SUMATERA BARAT / KOTA BUKITTINGGI)	-	-	1.159.360	-	-	1.159.360	08 . 51	
04 PNB		-	-	1.159.360	-	-	1.159.360	011@	
6133.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (08.51 SUMATERA BARAT / KOTA BUKITTINGGI)	-	60.020	-	-	-	60.020	08 . 51	
01 RM		-	20	-	-	-	20	011	
04 PNB		-	60.000	-	-	-	60.000	011@	
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	442.338	-	-	-	442.338		
6135.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (08.51 SUMATERA BARAT / KOTA BUKITTINGGI)	-	442.338	-	-	-	442.338	08 . 51	
01 RM		-	253.422	-	-	-	253.422	011	
04 PNB		-	188.916	-	-	-	188.916	011	
JUMLAH		8.914.867	13.150.085	1.159.360	-	-	23.224.312		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506137/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5316-2923-1507-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (506137) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	216.650	839.124	1.531.940	875.337	766.752	1.311.716	1.091.118	1.209.579	1.615.861	3.536.112	5.278.014	4.952.108	23.224.312
		BELANJA PEGAWAI	216.650	520.730	1.055.523	500.104	505.706	1.056.803	668.880	637.429	813.878	788.283	847.604	1.303.277	8.914.867
		BELANJA BARANG	0	318.395	476.417	375.233	261.046	254.912	422.238	572.151	801.983	2.747.829	3.795.290	3.124.591	13.150.085
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635.119	524.241	1.159.360
010.12.CM.6144		Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	0	159.197	238.208	187.766	130.651	127.581	211.326	286.356	401.473	1.336.919	1.896.053	1.950.095	6.925.626
010.12.WA.6133		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	159.197	238.208	187.766	130.651	127.581	211.326	286.356	401.473	1.336.919	1.896.053	1.950.095	6.925.626
		Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	216.650	679.927	1.293.732	687.571	636.101	1.184.135	879.792	923.223	1.214.388	2.193.457	3.376.461	2.570.912	15.856.348
010.12.WA.6135		51 BELANJA PEGAWAI	216.650	520.730	1.055.523	500.104	505.706	1.056.803	668.880	637.429	813.878	788.283	847.604	1.303.277	8.914.867
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	159.197	238.208	187.467	130.395	127.331	210.912	285.794	400.511	1.405.173	1.893.738	743.394	5.782.121
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635.119	524.241	1.159.360
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.736	5.500	431.102	442.338
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.736	5.500	431.102	442.338
		PERKIRAAN PENERIMAAN	0	0	168.320	152.540	27.041	79.641	1.742.513	5.273.775	1.689.222	24.297	27.950	740	9.186.038
		- PNB (425151)	0	0	0	0	741	741	741	2.383	26.662	10.122	12.200	740	54.329
		- PNB (425421)	0	0	168.320	152.540	26.300	78.900	1.741.772	5.265.092	1.563.335	0	0	0	8.996.259

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506137/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:5316-2923-1507-0003

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (506137) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		- PNBPN (425429)	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	99.225	14.175	15.750	0	135.450

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506137/2025
IV A. B L O K I R**



DS:5316-2923-1507-0003

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [12] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [506137] PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
506137	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	110.000
	52 Belanja Barang	Rp.	60.000
	53 Belanja Modal	Rp.	50.000
010.12.WA	Program Dukungan Manajemen		
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia		
6133.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	50.000
	Inpres nomor 1 tahun 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
6133.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	521211 Belanja Bahan(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	6.768
	Inpres nomor 1 tahun 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	53.232
	Inpres nomor 1 tahun 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.506137/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:5316-2923-1507-0003

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [12] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [506137] PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BUKIT TINGGI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.12.2.027177/2025**



DS:7081-8444-2811-3842

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 17

Tanggal : 12 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
4. Kode>Nama Satker : (027177) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR
- Sebesar : Rp. 22.896.330.000 (DUA PULUH DUA MILIAR DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	17.289.734.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	5.606.596.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MAKASSAR I (054) Rp. 22.896.330.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027177/2025



DS:7081-8444-2811-3842

Satker : (027177) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	22.896.330.000
01.03	PELAYANAN UMUM	Rp.	18.254.465.000
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	4.641.865.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027177/2025



DS:7081-8444-2811-3842

Satker : (027177) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR

CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	4.641.865.000
CM.6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Rp.	4.641.865.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	18.254.465.000
WA.6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	18.141.181.000
WA.6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	113.284.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027177/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7081-8444-2811-3842

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (027177) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR

Halaman : I A. 1

Program	:	010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa			4.641.865.000
Kegiatan	:	6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri			4.641.865.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 02	Jumlah Pembinaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri			
		2. 03	Jumlah Pengembangan Kompetensi Standarisasi dan Sertifikasi			
		3. 04	Jumlah Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri			
		4. 05	Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan			
		5. 06	Jumlah Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis			
		6. 07	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda			
		7. 08	Jumlah KDH dan WKDH yang mengikuti orientasorientasi			
		8. 09	Jumlah Camat yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pembangunan			
		9. 11	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Perda dan Perkada			
		10. 12	Jumlah Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah			
		11. 99	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi perencanaan dan penganggaran SPM			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6144.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	646,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	4.560.361.000
Rincian Output	:	01 FAC.009	Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	646.00	Orang	4.560.361.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6144.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	60,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja	81.504.000
Rincian Output	:	01 UAC.002	Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	60.00	Orang	81.504.000
Program	:	010.12.WA	Program Dukungan Manajemen			18.254.465.000
Kegiatan	:	6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia			18.141.181.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027177/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7081-8444-2811-3842

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (027177) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR

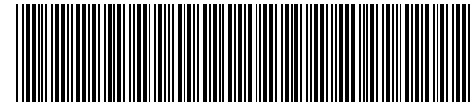
Halaman : I A. 2

Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 2. 02 Presentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP
- 3. 03 Presentase Penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu
- 4. 04 Presentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan
- 5. 05 Presentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan
- 6. 06 Hasil Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 7. 07 Presentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu

Klasifikasi Rincian Output	1	:	6133.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	16.927.946.000
Rincian Output		:	01	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	32.752.000
		:	02	EBA.994 Layanan Perkantoran	2,00	Layanan	16.895.194.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6133.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	67,00	Unit, m2, Paket	1.023.507.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	67,00	Unit	1.023.507.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6133.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	189.728.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	63.964.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	77.180.000
		:	03	EBD.955 Pengelolaan keuangan	1,00	Dokumen	48.584.000
Kegiatan		:	6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia			113.284.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027177/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7081-8444-2811-3842

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (027177) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	4	:	6135.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	65,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	113.284.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	65,00	Orang	113.284.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027177/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



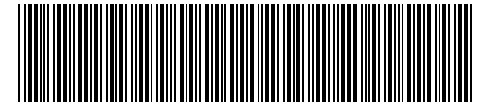
DS:7081-8444-2811-3842

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (027177) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR	11.452.674	10.420.149	1.023.507	-	-	22.896.330		
010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	-	4.641.865	-	-	-	4.641.865		
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	4.641.865	-	-	-	4.641.865		
6144.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	4.560.361	-	-	-	4.560.361	19 . 51	
04	PNBP	-	4.560.361	-	-	-	4.560.361	054	
6144.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	81.504	-	-	-	81.504	19 . 51	
01	RM	-	81.504	-	-	-	81.504	054	
010.12.WA	Program Dukungan Manajemen	11.452.674	5.778.284	1.023.507	-	-	18.254.465		
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.452.674	5.665.000	1.023.507	-	-	18.141.181		
6133.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	11.452.674	5.475.272	-	-	-	16.927.946	19 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027177/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7081-8444-2811-3842

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (027177) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR
Kewenangan : (KD)

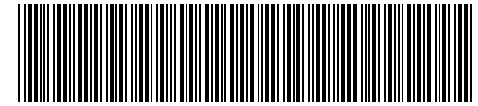
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		11.452.674	5.457.544	-	-	-	16.910.218	054	
04 PNBP		-	17.728	-	-	-	17.728	054	
6133.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	-	1.023.507	-	-	1.023.507	19 . 51	
04 PNBP		-	-	1.023.507	-	-	1.023.507	054	
6133.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	189.728	-	-	-	189.728	19 . 51	
01 RM		-	189.728	-	-	-	189.728	054	
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	113.284	-	-	-	113.284		
6135.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (19.51 SULAWESI SELATAN / KOTA MAKASSAR)	-	113.284	-	-	-	113.284	19 . 51	
01 RM		-	108.284	-	-	-	108.284	054	
04 PNBP		-	5.000	-	-	-	5.000	054	
JUMLAH		11.452.674	10.420.149	1.023.507	-	-	22.896.330		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027177/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



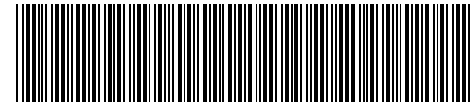
DS:7081-8444-2811-3842

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (027177) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	027177	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.022.524	1.257.582	2.219.209	985.222	997.764	1.823.833	1.264.193	2.111.795	2.331.348	3.318.664	2.785.723	2.778.473	22.896.330
		BELANJA PEGAWAI	780.854	766.655	1.607.798	775.134	762.981	1.600.217	810.811	812.943	838.463	836.880	790.015	1.069.924	11.452.674
		BELANJA BARANG	241.670	490.927	611.411	210.088	234.782	223.616	453.382	1.298.852	1.492.885	2.408.673	1.140.033	1.613.828	10.420.149
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.111	855.675	94.721	1.023.507
010.12.CM.6144		Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	0	0	0	0	8.653	8.724	184.150	1.034.144	1.104.340	1.293.994	1.641	1.006.220	4.641.865
010.12.WA.6133		52 BELANJA BARANG DAN JASA Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	8.653	8.724	184.150	1.034.144	1.104.340	1.293.994	1.641	1.006.220	4.641.865
010.12.WA.6135		51 BELANJA PEGAWAI	780.854	766.655	1.607.798	775.134	762.981	1.600.217	810.811	812.943	838.463	836.880	790.015	1.069.924	11.452.674
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	241.670	490.927	543.653	210.088	226.097	214.286	267.420	260.276	384.390	1.113.848	1.138.392	573.953	5.665.000
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.111	855.675	94.721	1.023.507
		Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	67.758	0	33	607	1.812	4.432	4.156	831	0	33.655	113.284
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	67.758	0	33	607	1.812	4.432	4.156	831	0	33.655	113.284
		PERKIRAAN PENERIMAAN	0	420.800	1.553.400	17.000	0	1.812.578	1.270.512	720.873	324.566	111.169	154.950	0	6.385.848
		- PNBP (425151)	0	0	0	0	0	0	0	17.612	4.941	11.469	0	0	34.022
		- PNBP (425421)	0	420.800	1.553.400	17.000	0	1.812.578	1.270.512	591.436	319.625	74.500	123.450	0	6.183.301

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027177/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7081-8444-2811-3842

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (19) SULAWESI SELATAN
Kode>Nama Satker : (027177) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH		
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		- PNBPN (425429)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.825	0	25.200	31.500	0	168.525

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027177/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7081-8444-2811-3842

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [12] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [027177] PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027177/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:7081-8444-2811-3842

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [12] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : [19] SULAWESI SELATAN
Kode dan Nama Satker : [027177] PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL MAKASSAR

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

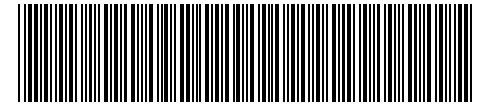
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 010.12.2.027114/2025**



DS:8146-2049-9224-8909

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 19

Tanggal : 24 Desember 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (027114) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 32.762.103.000 (TIGA PULUH DUA MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH DUA JUTA SERATUS TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	24.367.421.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	8.394.682.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 32.762.103.000

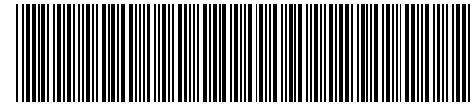
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027114/2025

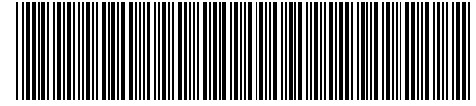


DS:8146-2049-9224-8909

Satker : (027114) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA

01	PELAYANAN UMUM	Rp.	32.762.103.000
01.03	PELAYANAN UMUM	Rp.	25.711.859.000
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	7.050.244.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027114/2025

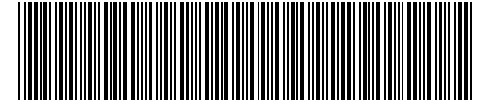


DS:8146-2049-9224-8909

Satker : (027114) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA

CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp.	7.050.244.000
CM.6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	Rp.	7.050.244.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	25.711.859.000
WA.6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	25.703.844.000
WA.6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	8.015.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027114/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8146-2049-9224-8909

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (027114) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	: 010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa				7.050.244.000
Kegiatan	: 6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri				7.050.244.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 02	Jumlah Pembinaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri				
	: 2. 03	Jumlah Pengembangan Kompetensi Standarisasi dan Sertifikasi				
	: 3. 04	Jumlah Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri				
	: 4. 05	Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajemen Kepemimpinan				
	: 5. 06	Jumlah Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis				
	: 6. 07	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda				
	: 7. 08	Jumlah KDH dan WKDH yang mengikuti orientasorientasi				
	: 8. 09	Jumlah Camat yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pembangunan				
	: 9. 11	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Penyusunan Perda dan Perkada				
	: 10. 12	Jumlah Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pengelolaan keuangan daerah				
	: 11. 99	Jumlah Pengembangan Kompetensi Aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi perencanaan dan penganggaran SPM				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 6144.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	1.384,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja		6.963.476.000
Rincian Output	: 01 FAC.009	Aparatur yang mengikuti Kompetensi Aparatur Kemendagri dan Pemda lingkup Regional	1384.00	Orang		6.963.476.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 6144.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	60,00	Orang, KL, Daerah, Unit Kerja		86.768.000
Rincian Output	: 01 UAC.002	Aparatur yang mengikuti pengembangan Kompetensi Perencanaan dan Penganggaran SPM	60.00	Orang		86.768.000
Program	: 010.12.WA	Program Dukungan Manajemen				25.711.859.000
Kegiatan	: 6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia				25.703.844.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Presentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027114/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8146-2049-9224-8909

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (027114) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA

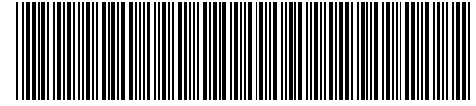
Halaman : I A. 2

Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

- 2. 02 Presentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP
- 3. 03 Presentase Penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu
- 4. 04 Presentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan
- 5. 05 Presentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan
- 6. 06 Hasil Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 7. 07 Presentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat waktu

Klasifikasi Rincian Output	1	:	6133.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	22.242.377.000
Rincian Output		:	01	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	136.724.000
		:	02	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	22.105.653.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6133.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	159,00	Unit, m2, Paket	3.326.206.000
Rincian Output		:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	159,00	Unit	3.326.206.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6133.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	135.261.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	69.649.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	10.652.000
		:	03	EBD.955 Pengelolaan keuangan	1,00	Dokumen	54.960.000
Kegiatan		:	6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia			8.015.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027114/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8146-2049-9224-8909

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (027114) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	4	:	6135.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	98,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	8.015.000	
Rincian Output		:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	98.00	Orang	8.015.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027114/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8146-2049-9224-8909

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (027114) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA	16.418.012	13.017.885	3.326.206	-	-	32.762.103		
010.12.CM	Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	-	7.050.244	-	-	-	7.050.244		
6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	-	7.050.244	-	-	-	7.050.244		
6144.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	6.963.476	-	-	-	6.963.476	04 . 51	
04	PNBP	-	6.963.476	-	-	-	6.963.476	030	
6144.UAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	86.768	-	-	-	86.768	04 . 51	
01	RM	-	86.768	-	-	-	86.768	030	
010.12.WA	Program Dukungan Manajemen	16.418.012	5.967.641	3.326.206	-	-	25.711.859		
6133	Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.418.012	5.959.626	3.326.206	-	-	25.703.844		
6133.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	16.418.012	5.824.365	-	-	-	22.242.377	04 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027114/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8146-2049-9224-8909

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (027114) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		16.418.012	5.824.365	-	-	-	22.242.377	030	
6133.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	-	3.326.206	-	-	3.326.206	04 . 51	
01 RM		-	-	1.975.000	-	-	1.975.000	030	
04 PNBP		-	-	1.351.206	-	-	1.351.206	030	
6133.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	135.261	-	-	-	135.261	04 . 51	
01 RM		-	55.261	-	-	-	55.261	030	
04 PNBP		-	80.000	-	-	-	80.000	030	
6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	8.015	-	-	-	8.015		
6135.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	8.015	-	-	-	8.015	04 . 51	
01 RM		-	8.015	-	-	-	8.015	030	
JUMLAH		16.418.012	13.017.885	3.326.206	-	-	32.762.103		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027114/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



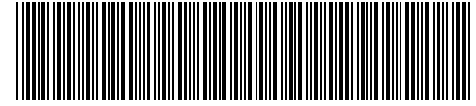
DS:8146-2049-9224-8909

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (027114) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	027114	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.206.230	1.418.187	3.081.044	1.462.603	1.444.822	2.684.716	1.458.550	1.505.071	2.919.270	4.668.514	4.332.213	6.580.883	32.762.103
		BELANJA PEGAWAI	1.147.163	1.151.175	2.370.238	1.133.659	1.111.220	2.303.489	1.134.029	1.144.599	1.250.492	1.214.030	1.248.486	1.209.431	16.418.012
		BELANJA BARANG	59.067	267.011	710.806	328.944	333.602	381.226	324.521	360.472	1.668.778	3.266.865	2.204.281	3.112.310	13.017.885
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.619	879.445	2.259.142	3.326.206
	010.12.CM.6144	Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	0	0	0	59.312	99.561	21.029	48.354	106.259	1.196.520	2.730.538	1.712.098	1.076.573	7.050.244
	010.12.WA.6133	52 BELANJA BARANG DAN JASA Pengelolaan keuangan, BMN, dan Umum Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	59.312	99.561	21.029	48.354	106.259	1.196.520	2.730.538	1.712.098	1.076.573	7.050.244
		51 BELANJA PEGAWAI	1.147.163	1.151.175	2.370.238	1.133.659	1.111.220	2.303.489	1.134.029	1.144.599	1.250.492	1.214.030	1.248.486	1.209.431	16.418.012
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	59.067	261.612	710.806	269.632	234.041	360.197	276.167	254.213	472.258	533.712	492.183	2.035.737	5.959.626
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187.619	879.445	2.259.142	3.326.206
	010.12.WA.6135	Pengelolaan Organisasi dan SDM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	5.399	0	0	0	0	0	0	0	2.615	0	1	8.015
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	5.399	0	0	0	0	0	0	0	2.615	0	1	8.015
		PERKIRAAN PENERIMAAN	24.250	29.286	26.300	321.610	42.080	5.260	5.082.933	2.994.630	908.206	0	0	0	9.434.555
		- PNBP (425151)	0	0	0	1.610	0	0	0	0	0	0	0	0	1.610
		- PNBP (425421)	24.250	29.286	26.300	320.000	42.080	5.260	5.082.933	2.950.530	821.896	0	0	0	9.302.535

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027114/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8146-2049-9224-8909

Kementerian Negara/Lembaga : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : (12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (027114) PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		- PNBPN (425429)	0	0	0	0	0	0	0	0	44.100	86.310	0	0	0	130.410

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027114/2025
IV A. B L O K I R**



DS:8146-2049-9224-8909

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [12] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027114] PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 010.12.2.027114/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:8146-2049-9224-8909

Kementerian Negara/Lembaga : [010] KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Unit Organisasi : [12] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [027114] PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL DI YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ttd.
Dr. Sugeng Hariyono
NIP. 196610171992031001